



Dinas Komunikasi dan Informatika
KOTA TEBING TINGGI



LAPORAN AKHIR

ANALISIS EKONOMI MAKRO

KOTA TEBING TINGGI

2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan Akhir yang berjudul "*Analisis Ekonomi Makro Kota Tebing Tinggi*" ini dapat kami selesaikan dengan baik. Kajian ini merupakan hasil kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi dengan Konsultan.

Laporan ini berisi mengenai pertumbuhan ekonomi serta proyeksi estimate pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi, inflasi, nilai ICOR dari investasi, gini ratio dan elastisitas tenaga kerja. Perlu diketahui bahwa dalam kurun waktu 2016-2020 berdasarkan data PDRB ADHK 2010, pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi memiliki *pattern* (pola) tumbuh positif yang tidak berbeda jauh dengan Provinsi Sumatera Utara. Sektor atau lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar adalah Perdagangan Besar & Eceran dan Reparasi Mobil & Sepeda Motor dengan kontribusi terbesar.

Tim Konsultan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dari mulai awal sampai dengan terselesaikannya Laporan Akhir ini. Semoga laporan ini dapat menjawab kebutuhan dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi dan dapat digunakan sebagai data dan informasi, selanjutnya berguna untuk pengambilan kebijakan dan keputusan pembangunan daerah Kota Tebing Tinggi.

Medan, 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1-1
1.1 Latar Belakang Masalah	1-1
1.2 Maksud dan Tujuan	1-3
1.3 Sasaran	1-3
BAB 2 LANDASAN TEORI	2-1
2.1 Konsep dan Definisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	2-1
2.2 Turunan Produk Domestik Regional Bruto	2-3
2.3 Metode Perhitungan PDRB	2-4
2.4 Perhitungan PDRB menurut Lapangan Usaha	2-7
2.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi	2-8
2.6 Inflasi	2-9
2.7 Dampak Inflasi	2-10
2.8 Sumber-Sumber Penyebab Inflasi	2-11
2.9 Investasi	2-12
2.10 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	2-13
2.11 Pengertian Output.....	2-16
2.12 Pengertian Nilai Tambah	2-17
2.13 Ketenagakerjaan.....	2-17
2.14 Tingkat Pengangguran	2-20
2.15 Produktivitas Tenaga Kerja (PTK)	2-21
2.16 Kemiskinan	2-22
BAB 3 METODE PENELITIAN	3-1
3.1 Kajian Literatur.....	3-1
3.2 Ekonomi Daerah	3-1
3.3 Keuangan Daerah.....	3-7
3.4 Metode Pendekatan.....	3-10
3.5 Menganalisis Kondisi Ekonomi Tebing Tinggi	3-10
BAB 4 GAMBARAN UMUM WILAYAH	4-1
4.1 Letak Geografis	4-1
4.2 Wilayah Administrasi dan Pemerintahan	4-2
4.3 Kondisi Demografi Daerah.....	4-4

4.4	Kondisi Sosial	4-5
4.4.1	Pendidikan	4-5
4.4.2	Kesehatan	4-6
4.4.3	Keluarga Berencana.....	4-7
4.5	Kondisi Ekonomi.....	4-7
4.5.1	Industri, Pertambangan dan Energi.....	4-7
4.5.2	Pertanian dan Peternakan.....	4-8
4.5.3	Pariwisata.....	4-8
4.5.4	Pendapatan Regional.....	4-9
BAB 5	RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH.....	5-1
5.1	RPJMD Kota Tebing Tinggi	5-1
5.2	Renstra Organisasi Perangkat Daerah	5-2
BAB 6	KONDISI TERKINI EKONOMI DAERAH	6-1
6.1	Ketenagakerjaan.....	6-1
6.2	Penduduk Usia Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	6-2
6.3	Lapangan Pekerjaan.....	6-3
6.4	Status Pekerjaan	6-5
6.5	Konsumsi Rumah Tangga	6-7
6.6	PDRB Kota Tebing Tinggi.....	6-9
6.7	Struktur Perekonomian Kota Tebing Tinggi	6-10
6.8	Pertumbuhan Ekonomi	6-11
6.9	Perkembangan PDRB Menurut Lapangan Usaha	6-13
6.9.1	Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan.....	6-13
6.9.2	Pertambangan dan Penggalian.....	6-16
6.9.3	Industri Pengolahan	6-17
6.9.4	Pengadaan Listrik dan Gas	6-19
6.9.5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6-20
6.9.6	Konstruksi	6-21
6.9.7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6-22
6.9.8	Transportasi dan Pergudangan.....	6-24
6.9.9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6-26
6.9.10	Informasi dan Komunikasi.....	6-27
6.9.11	Jasa Keuangan dan Asuransi	6-28

	6.9.12 Real Estate.....	6-29
	6.9.13 Jasa Perusahaan	6-30
	6.9.14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6-31
	6.9.15 Jasa Pendidikan.....	6-32
	6.9.16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.....	6-32
	6.9.17 Jasa Lainnya.....	6-33
	6.10 Perbandingan Pengeluaran PDRB Untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap Ekspor.....	6-34
	6.11 Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga Terhadap PMTB6- 35	
	6.12 Perbandingan Konsumsi Akhir Terhadap PDRB	6-36
	6.13 Perbandingan Ekspor Terhadap PMTB	6-37
	6.14 Perbandingan PDRB Terhadap Impor	6-38
	6.15 Neraca Perdagangan.....	6-38
	6.16 Kemiskinan	6-39
	6.17 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	6-40
	6.18 PDRB Per Kapita	6-41
	6.19 Kesenjangan Distribusi Pendapatan.....	6-42
	6.20 Inflasi	6-42
BAB 7	PROYEKSI DAN ANALISIS	7-1
	7.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Tebing Tinggi.....	7-1
	7.1.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dilihat Dari Perkembangan PDRB Kota Tebing Tinggi	7-1
	7.1.2 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Tebing Tinggi Dilihat Dari Lapangan Usaha.....	7-3
	7.1.3 Jenis-Jenis Lapangan Usaha Yang Terdampak Pandemi COVID-19.....	7-38
	7.1.4 Proyeksi Jumlah Penduduk Miskin di Kota Tebing Tinggi	7-40
	7.1.5 Proyeksi Indikator Kesejahteraan di Kota Tebing Tinggi	7-42
BAB 8	KESIMPULAN DAN SARAN	8-1
	8.1 Kesimpulan.....	8-1
	8.2 Saran	8-3

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Luas Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Tebing Tinggi....	4-3
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020.....	4-4
Tabel 4.3	Jumlah penduduk Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja	4-5
Tabel 6.1	Jumlah Penduduk dan Persentase Berumur 15 tahun ke atas di Kota Tebing Tinggi menurut Penduduk Usia Kerja (Jiwa)	6-2
Tabel 6.2	Komposisi Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas yang bekerja di Kota Tebing Tinggi menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin Tahun 2014-2019.....	6-5
Tabel 6.3	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2019 dan 2020.....	6-6
Tabel 6.4	Rata-rata Pengeluaran Per kapita Sebulan dan Persentasenya menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2019 – 2020.....	6-8
Tabel 6.5	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah) .	6-9
Tabel 6.6	Peranan PDRB Atas Harga Berlaku (ADHB) Kota Tebing Tinggi Menurut Lapangan Usaha, 2016-2020 (Persen) ...	6-10
Tabel 6.7	Pertumbuhan Riil PDRB Kota Tebing Tinggi Menurut Lapangan Usaha 2016-2020 (Persen).....	6-12
Tabel 6.8	PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kota Tebing Tinggi.....	6-14
Tabel 6.9	Peranan Sublapangan Usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian di Kota Tebing Tinggi (Persen).....	6-15

Tabel 6.10	PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian di Kota Tebing Tinggi.....	6-16
Tabel 6.11	PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan di Kota Tebing Tinggi	6-17
Tabel 6.12	Peranan dan Laju Pertumbuhan Sublapangan usaha Industri Pengolahan Kota Tebing Tinggi (Persen)	6-18
Tabel 6.13	Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas di Kota Tebing Tinggi.....	6-19
Tabel 6.14	Peranan dan Laju Pertumbuhan Sublapangan Usaha pada Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas di Kota Tebing Tinggi (Persen)	6-20
Tabel 6.15	Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang di Kota Tebing Tinggi.....	6-21
Tabel 6.16	Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi di Kota Tebing Tinggi	6-22
Tabel 6.17	Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Kota Tebing Tinggi	6-23
Tabel 6.18	Peranan dan Laju Pertumbuhan Sublapangan Usaha pada Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Kota Tebing Tinggi (Persen)	6-24
Tabel 6.19	Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan di Kota Tebing Tinggi.....	6-25
Tabel 6.20	Peranan Sublapangan Usaha pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan di Kota Tebing Tinggi (Persen).....	6-26
Tabel 6.21	Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kota Tebing Tinggi.....	6-26

Tabel 6.22	Peranan dan Laju Pertumbuhan Sublapangan Usaha pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum di Kota Tebing Tinggi (Persen)	6-27
Tabel 6.23	Peranan dan Laju Pertumbuhan Sublapangan Usaha pada Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi di Kota Tebing Tinggi (Persen)	6-27
Tabel 6.24	Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi di Kota Tebing Tinggi.....	6-28
Tabel 6.25	Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Real Estate di Kota Tebing Tinggi.....	6-29
Tabel 6.26	Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Perusahaan di Kota Tebing Tinggi.....	6-30
Tabel 6.27	Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib di Kota Tebing Tinggi	6-31
Tabel 6.28	Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Pendidikan di Kota Tebing Tinggi	6-32
Tabel 6.29	Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial di Kota Tebing Tinggi	6-33
Tabel 6.30	Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Lainnya di Kota Tebing Tinggi	6-34
Tabel 6.31	Perbandingan PDRB Menurut Pengeluaran Untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap Ekspor	6-34
Tabel 6.32	Perbandingan PDRB Menurut Pengeluaran Untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PMTB	6-35
Tabel 6.33	Perbandingan Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi.....	6-36
Tabel 6.34	Perbandingan Ekspor Terhadap PMTB di Kota Tebing Tinggi.....	6-37
Tabel 6.35	Perbandingan PDRB Terhadap Impor di Kota Tebing Tinggi.....	6-38

Tabel 6.36	Neraca Perdagangan Barang dan Jasa di Kota Tebing Tinggi.....	6-39
Tabel 6.37	Garis Kemiskinan (Rp), Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa), dan Persentase Penduduk Miskin Kota Tebing Tinggi (Persen).....	6-39
Tabel 6.38	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tebing Tinggi Menurut Komponen	6-40
Tabel 6.39	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tebing Tinggi.....	6-41
Tabel 6.40	Koefisien Gini Kota Tebing Tinggi.....	6-42
Tabel 6.41	Tingkat Inflasi Kota Tebing Tinggi.....	6-43
Tabel 7.1	Proyeksi pertumbuhan Ekonomi Dilihat Dari Nilai PDRB (ADHK) (Dalam Milyar Rupiah).....	7-2
Tabel 7.2	Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Dalam Milyar Rupiah)	7-4
Tabel 7.3	Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian(Dalam Milyar Rupiah).....	7-6
Tabel 7.4	Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Industri Pengolahan (Dalam Milyar Rupiah)	7-8
Tabel 7.5	Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Industri Pengolahan (Dalam Milyar Rupiah)	7-9
Tabel 7.6	Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Pengadaaan Listrik dan Gas (Dalam Milyar Rupiah)	7-10
Tabel 7.7	Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (Dalam Milyar Rupiah).....	7-13
Tabel 7.8	Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Konstruksi (Dalam Milyar Rupiah)	7-14
Tabel 7.9	Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Dalam Milyar Rupiah).....	7-17

Tabel 7.10	Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan (Dalam Milyar Rupiah) ...	7-19
Tabel 7.11	Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Dalam Milyar Rupiah)	7-22
Tabel 7.12	Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi (Dalam Milyar Rupiah)	7-24
Tabel 7.13	Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi (Dalam Milyar Rupiah)	7-26
Tabel 7.14	Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Jasa Real Estate (Dalam Milyar Rupiah)	7-27
Tabel 7.15	Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Jasa Perusahaan (Dalam Milyar Rupiah)	7-30
Tabel 7.16	Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (Dalam Milyar Rupiah).....	7-32
Tabel 7.17	Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Jasa Pendidikan (Dalam Milyar Rupiah)	7-33
Tabel 7.18	Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Dalam Milyar Rupiah)	7-36
Tabel 7.19	Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Jasa Lainnya (Dalam Milyar Rupiah)	7-37
Tabel 7.20	Perbandingan Pertumbuhan Lapangan Usaha di Kota Tebing Tinggi Sebelum dan Sesudah Pandemi COVID-19 .	7-40
Tabel 7.21	Proyeksi Jumlah Penduduk Miskin di Kota Tebing Tinggi (dalam ribu).....	7-41
Tabel 7.22	Proyeksi Indikator Kesejahteraan di Kota Tebing Tinggi .	7-42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Partisipasi Angkatan Kerja	2-19
Gambar 6.1	Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Tebing Tinggi 2016-2020	6-41
Gambar 7.1	Proyeksi pertumbuhan Ekonomi Dilihat Dari Nilai PDRB (ADHK) (Dalam Milyar Rupiah).....	7-3
Gambar 7.2	Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan(Dalam Milyar Rupiah)	7-5
Gambar 7.3	Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Pengadaaan Listrik dan Gas (Dalam Milyar Rupiah) ...	7-11
Gambar 7.4	Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (Dalam Milyar Rupiah).....	7-13
Gambar 7.5	Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Konstruksi (Dalam Milyar Rupiah)	7-15
Gambar 7.6	Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Dalam Milyar Rupiah)	7-18
Gambar 7.7	Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan (Dalam Milyar Rupiah)...	7- 20
Gambar 7.8	Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Dalam Milyar Rupiah)	7-22
Gambar 7.9	Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi (Dalam Milyar Rupiah).....	7-24
Gambar 7.10	Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi (Dalam Milyar Rupiah) .	7-26

Gambar 7.11	Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Real Estate (Dalam Milyar Rupiah)	7-28
Gambar 7.12	Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Jasa Perusahaan (Dalam Milyar Rupiah)	7-30
Gambar 7.13	Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (Dalam Milyar Rupiah)	7-32
Gambar 7.14	Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Jasa Pendidikan (Dalam Milyar Rupiah)	7-34
Gambar 7.15	Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Dalam Milyar Rupiah)	7-36
Gambar 7.16	Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Jasa Lainnya (Dalam Milyar Rupiah)	7-38
Gambar 7.17	Proyeksi Jumlah Penduduk Miskin di Kota Tebing Tinggi (dalam ribu)	7-42

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2020, Indonesia mengalami pandemi COVID 19 yang juga dialami oleh hampir seluruh negara-negara di dunia. Virus yang pertama kali berkembang di Wuhan ini, mengakibatkan WHO mengambil langkah-langkah preventif dengan tujuan mencegah laju penyebaran virus (Ferguson et al., 2020). Langkah yang diambil adalah dengan menerapkan *physical distancing*. Hal ini merupakan langkah yang paling masuk akal, mengingat belum seluruhnya masyarakat Indonesia yang belum menerima vaksinasi. Pemberlakuan *physical distancing* ini bukannya tanpa akibat, seluruh sektor kehidupan di seluruh dunia mengalami gangguan hebat, baik pada bidang kesehatan (Rhyon, Turner, & Miller, 2020), pendidikan (Afrianti & Aditia, 2020), tidak terkecuali juga pada sektor ekonomi (Lone & Ahmad, 2020). Dengan adanya pembatasan-pembatasan yang diterapkan, praktis kegiatan ekonomi akan melambat, dan menyebabkan tidak termanfaatkannya sumber daya ekonomi yang tersedia. Padahal dalam sudut pandang ilmu ekonomi, sebuah wilayah akan berkembang apabila pemanfaatan sumber daya ekonomi (*economic resources*) yang tersedia dapat digunakan (Mankiw, 2013). Sumber daya tersebut adalah sumber daya tenaga kerja (*labour*) dan sumber daya modal atau kapital (*capital*). Kedua sumber daya tersebut disebut sebagai faktor-faktor produksi (*factors of production*). Pembangunan ekonomi bertujuan meningkatkan pencapaian indikator – indikator ekonomi secara makro.

Perkembangan perekonomian di Kota Tebing Tinggi itu sendiri diharapkan berhasil memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus diiringi dengan terbukanya lapangan pekerjaan baru sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Fokus pemerintah saat ini berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi jumlah penduduk miskin. Era otonomi daerah telah memberikan kesempatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengembangkan sendiri potensi daerah yang dimilikinya. Dengan kata lain, daerah diberi wewenang untuk mengelola sendiri keuangannya sekaligus menentukan arah pembangunan yang akan dilaksanakan demi tercapainya kemakmuran penduduk di wilayahnya, dengan mempertimbangkan segenap potensi, sumber daya serta faktor-faktor lainnya, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat.

Dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah, ketersediaan data atau indikator statistik regional mutlak diperlukan. Data digunakan sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi dalam proses pembangunan daerah. Pada tahap perencanaan, data merupakan salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan berbagai skala prioritas dan memetakan berbagai persoalan yang harus diselesaikan melalui program pembangunan.

Sementara dalam tahap pelaksanaan pembangunan, data dapat dijadikan sebagai salah satu alat untuk melakukan pengawasan dan pengendalian dari suatu program pembangunan. Sedangkan pada tahap evaluasi, data dapat memenuhi kebutuhan informasi untuk melakukan penilaian apakah suatu program telah memberikan hasil seperti yang telah diinginkan atau belum.

Untuk menghasilkan perencanaan regional yang baik, bagaimanapun memerlukan data yang baik dan sesuai. Bahkan kualitas dari data dasar akan sangat berpengaruh pada kualitas perencanaan regional, data yang buruk akan menghasilkan perencanaan yang buruk pula (*garbage in, garbage out*). Oleh karena itu penyediaan berbagai data dan indikator untuk kebutuhan perencanaan merupakan salah satu tuntutan yang harus dipenuhi dalam menyusun perencanaan regional.

Penyusunan Analisis Makro Ekonomi Kota Tebing Tinggi merupakan salah satu langkah konkret Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk menyusun Data yang akan digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perencanaan pembangunan di Kota Tebing Tinggi itu sendiri.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari kegiatan Analisis Ekonomi Makro Kota Tebing Tinggi ini dimaksudkan untuk menyusun buku Analisis Ekonomi Makro Kota Tebing Tinggi yang merupakan gambaran atau deskripsi kondisi perekonomian kota yang memuat ketenagakerjaan, pertumbuhan ekonomi, investasi, tingkat konsumsi masyarakat, kemiskinan, pendapatan per kapita, dan tingkat pengangguran.

1.3 Sasaran

Sasaran dari kegiatan Analisis Ekonomi Makro Kota Tebing Tinggi ini dimaksudkan adalah sebagai berikut:

- Mengumpulkan data dan informasi tentang ketenagakerjaan, pertumbuhan ekonomi, investasi, tingkat pengangguran, konsumsi masyarakat, dan pendapatan per kapita;
- Menganalisis kondisi pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan pendapatan per kapita;
- Menganalisis efektivitas kebijakan pembangunan, pelayanan publik, dan pemerintahan dalam konteks perekonomian kota;

- Memberikan rekomendasi pola penyusunan kebijakan, strategi dan program serta kegiatan yang tepat untuk pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja; dan
- Proyeksi dan perkiraan perekonomian daerah Kota Tebing Tinggi

ANALISIS EKONOMI MAKRO TAHUN 2021

BAB 2 LANDASAN TEORI

2.1 Konsep dan Definisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB didefinisikan sebagai Produk domestik bruto (PDB) adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi di suatu negara dalam periode waktu tertentu (Mankiw, 2020). Data PDRB dapat dihitung dengan tiga pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan produksi, PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha/ekonomi suatu daerah/wilayah pada suatu periode tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit ekonomi tersebut dalam analisis ini dengan mendasari pada PDRB ADHK 2010 dikelompokkan menjadi lapangan usaha/sektor (Badan Pusat Statistik, n.d.-b) yakni:

- Pertanian, kehutanan dan perikanan
- Pertambangan dan penggalian
- Industri pengolahan
- Pengadaan listrik dan gas
- Pengadaan air
- Konstruksi
- Perdagangan besar dan eceran
- Reparasi mobil dan sepeda motor
- Transportasi dan pergudangan
- Penyediaan akomodasi dan makan minum
- Informasi dan komunikasi
- Jasa keuangan
- Real estat
- Jasa perusahaan
- Administrasi pemerintahan

- Pertahanan dan jaminan sosial wajib
- Jasa pendidikan
- Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
- Jasa lainnya

b. Pendekatan Pengeluaran

Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB merupakan jumlah semua komponen permintaan akhir di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (Badan Pusat Statistik, n.d.-b). Komponen permintaan akhir meliputi:

- Pengeluaran konsumsi rumah tangga
- Pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba
- Pengeluaran konsumsi pemerintah
- Pembentukan modal tetap domestik bruto
- Perubahan inventori/stok dan ekspor neto

c. Pendekatan Pendapatan

Menurut pendekatan pendapatan, PDRB merupakan jumlah seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah/wilayah pada jangka waktu tertentu (Badan Pusat Statistik, n.d.-b). Faktor produksi yang dimaksud adalah: upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan. Semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.

Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan barang modal tetap dan pajak tak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

Jumlah semua komponen pendapatan ini per sektor tersebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu, PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu, PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor.

2.2 Turunan Produk Domestik Regional Bruto

Turunan PDRB atas harga berlaku terbagi atas 3 (tiga) yakni PDRB atas harga berlaku, PDRN atas harga berlaku, dan PDRB atas dasar biaya faktor.

a. PDRB atas Harga Berlaku

PDRB atas harga berlaku adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di daerah/wilayah termasuk penyusutan dan pajak tak langsung netto. Sedangkan menurut BPS, Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku.

b. Produk Domestik Regional Neto (PDRN) atas Harga Berlaku

PDRB atas dasar biaya faktor adalah PDRB atas dasar harga pasar dikurangi pajak tak langsung neto. Pajak tak langsung neto merupakan pajak tak langsung yang dipungut pemerintah dikurangi dengan subsidi pemerintah. Baik pajak tak langsung maupun subsidi, keduanya dikenakan terhadap barang dan jasa yang diproduksi atau dijual. Pajak tak langsung bersifat menaikkan harga jual, sedangkan subsidi sebaliknya. Selanjutnya, PDRB atas dasar biaya faktor disebut sebagai Pendapatan Regional.

c. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar Biaya Faktor

PDRB atas dasar biaya faktor adalah PDRB atas dasar harga pasar dikurangi pajak tak langsung neto. Pajak tak langsung neto merupakan pajak tak langsung yang dipungut pemerintah dikurangi dengan subsidi pemerintah. Baik pajak tak langsung maupun subsidi, keduanya dikenakan terhadap barang dan jasa yang diproduksi atau dijual. Pajak tak langsung bersifat menaikkan harga jual, sedangkan subsidi sebaliknya. Selanjutnya, PDRB atas dasar biaya faktor disebut sebagai Pendapatan Regional.

d. PDRB per Kapita

PDRB per kapita adalah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Terdapat dua ukuran PDRB per kapita, yaitu PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (nominal) dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan (riil).

2.3 Metode Perhitungan PDRB

Penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku dilakukan dengan dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung (Badan Pusat Statistik, n.d.-b).

Pada metode langsung dikenal ada tiga macam pendekatan penghitungan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Sedangkan metode tidak langsung diperlukan dalam penghitungan PDRB jika data tidak tersedia (belum lengkap).

Metode tidak langsung adalah metode penghitungan dengan cara alokasi menggunakan indikator produksi yang sesuai, seperti: jumlah produksi fisik, tenaga kerja, penduduk, dan alokator lainnya. Penghitungan PDRB atas dasar harga konstan bertujuan untuk melihat pertumbuhan PDRB secara riil. Dikenal empat cara untuk menghitung nilai tambah atas dasar harga konstan, yaitu revaluasi, ekstrapolasi, deflasi, dan deflasi berganda

- **Revaluasi**

Prinsip metode revaluasi adalah menilai barang dan jasa pada tahun berjalan dengan menggunakan harga pada tahun dasar. Dalam hal ini, tahun dasar yang dipakai adalah tahun 2010. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan diperoleh dari selisih antara output dan biaya antara masing-masing atas dasar harga konstan. Dalam praktik, sangat sulit melakukan revaluasi terhadap biaya antara yang digunakan dalam proses produksi, karena selain mencakup komponen input yang sangat banyak, data harga yang tersedia juga tidak dapat memenuhi semua keperluan tersebut. Oleh karena itu, biaya antara atas dasar harga konstan biasanya diperoleh dari perkalian antara output atas dasar harga konstan dengan rasio tertentu. Rasio tersebut diperoleh dari hasil bagi biaya antara dengan output pada tahun dasar.

- **Ekstrapolasi**

Menurut metode ekstrapolasi, nilai tambah atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara mengalikan nilai tambah pada tahun dasar 2010 dengan indeks produksi. Indeks produksi sebagai ekstrapolator dapat merupakan indeks dari masing-masing produksi yang dihasilkan ataupun indeks dari berbagai indikator produksi

seperti tenaga kerja, jumlah perusahaan dan lainnya, yang dianggap cocok dengan jenis kegiatannya.

Ekstrapolasi dapat juga dilakukan terhadap output pada tahun dasar 2010. Dengan mengalikan output atas dasar harga konstan dengan rasio tetap nilai tambah terhadap output pada tahun dasar teori pertumbuhan ekonomi 2010, maka diperoleh perkiraan nilai tambah atas dasar harga konstan

- **Deflasi**

Menurut metode deflasi, nilai tambah atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara membagi nilai tambah atas dasar harga berlaku pada tahun berjalan dengan indeks harga yang sesuai. Indeks harga yang dimaksud dapat juga dipakai sebagai inflator, dalam keadaan di mana nilai tambah atas dasar harga berlaku justru diperoleh dengan mengalikan nilai tambah atas dasar harga konstan dengan indeks harga tersebut.

- **Deflasi Berganda**

Dalam metode deflasi berganda ini, yang dideflasi adalah output dan biaya antaranya, sedangkan nilai tambah atas dasar harga konstan diperoleh dari selisih antara output dengan biaya antara hasil deflasi tersebut. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator untuk penghitungan output atas dasar harga konstan biasanya menggunakan indeks harga produsen atau indeks harga perdagangan besar (IHPB) sesuai dengan cakupannya. Sedangkan deflator untuk biaya antara adalah indeks harga dari komponen input terbesar.

Pada kenyataannya sangat sulit melakukan deflasi terhadap biaya antara, karena selain komponennya terlalu banyak, juga karena indeks harganya belum tersedia secara baik. Oleh karena itu dalam penghitungan harga konstan, deflasi berganda ini belum banyak dipakai.

2.4 Perhitungan PDRB menurut Lapangan Usaha

Pada tahun 2015, BPS melakukan perubahan tahun dasar untuk perhitungan PDRB dari tahun dasar 2000 menjadi tahun dasar 2010. Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan berikut (Badan Pusat Statistik, 2008):

- Perekonomian Indonesia tahun 2010 relatif stabil;
- Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terutama dibidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, sumber data dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA2008;
- Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDRB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP2010) dan Indeks harga produsen (Producers Price Index /PPI);
- Tersedianya kerangka kerja SUT yang menggambarkan keseimbangan aliran produksi dan konsumsi (barang dan jasa) dan penciptaan pendapatan dari aktivitas produksi tersebut

Adapun sektor utama PDRB harga konstan 2010 yakni: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi

Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa lainnya.

2.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah (Collier, 2008; Mankiw, 2013, 2020). Suatu wilayah mengalami pertumbuhan secara ekonomi bisa terjadi peningkatan kapasitas produksi dari semua kegiatan ekonomi di dalam wilayah secara terukur. Selama beberapa dekade, seringkali pembangunan daerah selalu berupaya memperoleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tanpa melihat apakah pertumbuhan tersebut bermanfaat bagi kesejahteraan penduduk secara merata atau tidak.

Perkembangan selanjutnya, para pengambil kebijakan pembangunan daerah mulai memperhitungkan manfaat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat, sehingga tingkat pemerataan mulai menjadi suatu indikator bagi kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada penciptaan kesempatan kerja dan berpihak pada penurunan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja sehingga dapat menyerap tenaga kerja secara berkesinambungan. Kesempatan kerja yang semakin luas akan meningkatkan serapan tenaga kerja sehingga menjadi faktor penting dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan.

Di samping itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menjadi indikator semakin tingginya pendapatan masyarakat sehingga tingkat kemiskinan menjadi semakin berkurang.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Istilah “proses” berarti mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi biasanya dilihat dalam kurun waktu tertentu. Jika kurun waktu yang diamati dalam satu tahun, maka pertumbuhan ekonomi direpresentasikan dalam indeks berantai PDRB atas dasar harga konstan dikurangi 100 persen atau diformulasikan sebagai berikut:

$$PE = \frac{PDRB_t - PDRB_{(t-1)}}{PDRB_{(t-1)}}$$

keterangan:

- PE = Pertumbuhan ekonomi
- PDRB_t = Produk Domestik Regional Bruto harga konstan tahun ke t
- PDRB_(t-1) = Produk Domestik Regional Bruto harga konstan tahun ke (t-1)

2.6 Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus (Mankiw, 2013, 2020). Akan tetapi bila kenaikan harga hanya dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau menyebabkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain (Mankiw, 2020). Bahkan mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidak bersamaan. Kenaikan harga barang yang terjadi hanya sekali saja, meskipun dalam persentase yang cukup besar dan terus-menerus, bukanlah merupakan inflasi.

Inflasi adalah keadaan di mana terjadi kelebihan permintaan (Excess Demand) terhadap barang-barang dalam perekonomian secara keseluruhan (Mankiw, 2020). Inflasi sebagai suatu kenaikan harga yang terus menerus dari barang dan jasa secara umum (bukan satu macam barang saja dan sesaat).

Naiknya biaya produksi yang meningkat juga dapat menyebabkan inflasi yang biasa disebut dengan *cost push inflation* dan inflasi yang berasal dari naiknya harga impor secara keseluruhan yang disebut sebagai *imported inflation* (Mankiw, 2013). Menurut definisi ini, kenaikan harga yang sporadis bukan dikatakan sebagai inflasi.

2.7 Dampak Inflasi

Inflasi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan, alokasi faktor produksi serta produk nasional. Efek terhadap distribusi pendapatan disebut dengan *equity effect*, sedangkan efek terhadap alokasi faktor produksi dan pendapatan nasional masing-masing disebut dengan *efficiency* dan *output effects*.

- **Efek terhadap Pendapatan (*Equity Effect*)**

Efek terhadap pendapatan sifatnya tidak merata, ada yang dirugikan tetapi ada pula yang diuntungkan dengan adanya inflasi. Seseorang yang memperoleh pendapatan tetap akan dirugikan oleh adanya inflasi. Demikian juga orang yang menumpuk kekayaannya dalam bentuk uang kas akan memiliki kerugian karena adanya inflasi. Sebaliknya, pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dengan adanya inflasi adalah mereka yang memperoleh kenaikan pendapatan dengan persentase yang lebih besar dari laju inflasi, atau mereka yang mempunyai kekayaan bukan uang di mana nilainya naik dengan persentase lebih besar dari pada laju inflasi. Dengan demikian inflasi dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam pola pembagian pendapatan dan kekayaan masyarakat.

- **Efek terhadap Efisiensi (*Efficiency Effect*)**

Inflasi dapat pula mengubah pola alokasi faktor-faktor produksi. Perubahan ini dapat terjadi melalui kenaikan permintaan akan berbagai macam barang yang kemudian dapat mendorong terjadinya perubahan dalam produksi beberapa barang tertentu. Dengan adanya inflasi permintaan akan barang tertentu mengalami kenaikan yang lebih besar dari barang lain, yang kemudian mendorong terjadinya kenaikan produksi barang tertentu.

- **Efek terhadap Output (*Output Effect*)**

Inflasi mungkin dapat menyebabkan terjadinya kenaikan produksi. Alasannya dalam keadaan inflasi biasanya kenaikan harga barang

mendahului kenaikan upah sehingga keuntungan pengusaha naik. Kenaikan keuntungan ini akan mendorong kenaikan produksi. Namun apabila laju inflasi ini cukup tinggi (hyper inflation) dapat mempunyai akibat sebaliknya, yakni penurunan output. Dalam keadaan inflasi yang tinggi, nilai uang riil turun dengan drastis, masyarakat cenderung tidak mempunyai uang kas, transaksi mengarah ke barter, yang biasanya diikuti dengan turunnya produksi barang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan langsung antara inflasi dan output. Inflasi bisa dibarengi dengan kenaikan output, tetapi bisa juga dibarengi dengan penurunan output.

2.8 Sumber-Sumber Penyebab Inflasi

Adapun sumber-sumber penyebab inflasi *demand pull inflation* dan *cost push inflation* (Keynes, 2018).

- ***Demand Pull Inflation***

Demand-Pull Inflation dihasilkan dari kelebihan permintaan agregat relatif terhadap penawaran agregat (Keynes, 2018). Contohnya, pertimbangkan produk populer di mana permintaan akan produk melebihi penawaran, maka harga produk akan meningkat.

- ***Cost-Push Inflation***

Cost-Push Inflation dihasilkan dari kenaikan umum dalam biaya faktor-faktor produksi (Keynes, 2018). Faktor-faktor ini—termasuk modal, tanah, tenaga kerja, dan kewirausahaan—merupakan input yang diperlukan untuk memproduksi barang dan jasa. Ketika biaya faktor-faktor ini naik, produsen yang ingin mempertahankan margin keuntungan mereka harus menaikkan harga barang dan jasa mereka. Ketika biaya produksi ini naik pada tingkat ekonomi yang luas, hal itu dapat menyebabkan peningkatan harga konsumen di seluruh perekonomian, karena produsen meneruskan peningkatan biaya mereka kepada konsumen. Harga konsumen, pada dasarnya, didorong oleh biaya produksi.

2.9 Investasi

Investasi merupakan salah satu komponen yang penting dalam pembangunan ekonomi karena investasi mempunyai keterkaitan dengan keberlangsungan kegiatan ekonomi di masa yang akan datang. Dengan melakukan investasi diharapkan kapasitas produksi dapat ditingkatkan, yang berarti peningkatan output. Sehingga dengan peningkatan output akan meningkatkan pendapatan.

Dalam jangka panjang akumulasi investasi dapat mendorong perkembangan berbagai aktivitas ekonomi sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah/negara. Pemahaman kondisi tersebut memberikan pengertian pentingnya informasi investasi. Berdasarkan buku panduan yang diterbitkan oleh *United Nations* (PBB) mengenai penyusunan neraca nasional yang disebut *System of National Accounts* (SNA) ("System of National Accounts," 2009), besarnya investasi yang direalisasikan di suatu wilayah/negara pada suatu tahun tertentu adalah sama dengan jumlah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) plus perubahan inventori/stok. PMTB menggambarkan investasi fisik domestik yang telah direalisasikan pada suatu tahun tertentu dalam bentuk berbagai jenis barang modal, seperti: bangunan, mesin-mesin, alat-alat transportasi, dan barang modal lainnya; sedangkan inventori/stok meliputi output setengah jadi, atau input yang belum digunakan, termasuk juga barang jadi yang belum dijual. Inventori/stok termasuk dalam modal kerja yang merupakan bagian investasi yang direncanakan. Perubahan inventori merupakan selisih antara stok akhir dengan stok awal pada suatu periode tertentu.

Investasi dibedakan menjadi tiga jenis yaitu: fisik, finansial, dan sumber daya manusia (SDM). Investasi yang berwujud fisik dapat berupa: jalan, jembatan, gedung, kantor, mesin-mesin, mobil dan sebagainya. Investasi finansial dapat berupa: pembelian surat berharga, pembayaran premi asuransi, penyertaan modal dan investasi keuangan lainnya. Sedangkan investasi SDM dapat berupa pendidikan dan pelatihan. Adapun penekanan investasi di sini lebih kepada investasi yang berupa fisik.

Konsep investasi dalam penghitungan ICOR menggunakan konsep ekonomi nasional. Pengertian investasi yang dimaksud di sini adalah *fixed capitalformation*/pembentukan barang modal tetap yang terdiri dari: tanah gedung/konstruksi, mesin dan perlengkapannya, kendaraan, dan barang modal lainnya. Sementara itu nilai yang diperhitungkan mencakup:

- Pembelian barang baru dan barang bekas dari luar negeri,
- Pembuatan/perbaikan besar yang dilakukan pihak lain,
- Pembuatan/perbaikan besar yang dilakukan sendiri,
- Penjualan barang modal bekas.

Total nilai investasi diperoleh dari penjumlahan seluruh pembelian barang modal baru/bekas, pembuatan/perbaikan besar yang dilakukan oleh pihak lain dan sendiri dikurangi penjualan barang modal bekas.

2.10 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Secara konseptual, PMTB didefinisikan sebagai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah ("Badan Pusat Statistik," n.d.-a). Secara lebih rinci PMTB pada dasarnya meliputi:

- Pembentukan modal berupa bangunan, mesin, angkutan dan perlengkapannya yang mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih.
- Perbaikan besar, maksudnya biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan barang modal untuk meningkatkan mutu barang modal tersebut atau menambah umur pakai barang modal.
- Biaya untuk pengembangan atau perbaikan lahan, penanaman kembali hutan, perluasan daerah pertambangan, penanaman dan peremajaan tanaman keras.

- Pembelian ternak untuk pembiakan, pemerahan susu, atau sebagai alat angkutan, tetapi tidak termasuk ternak potong untuk konsumsi.
- Margin perdagangan dan ongkos-ongkos yang berkaitan dengan transaksi jual beli tanah, hak paten, hak cipta, dan sebagainya

Adapun PMTB yang dapat diklasifikasikan adalah sebagai berikut:

- PMTB menurut jenis barang modal
- PMTB menurut lapangan usaha/sektor
- PMTB menurut institusi.

PMTB menurut jenis barang modal dapat dibedakan atas:

- Pembentukan modal berupa bangunan, yaitu: bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, dan bangunan lainnya seperti: jalan raya, instalasi listrik, jaringan komunikasi, bendungan, pelabuhan, dan sebagainya.
- Pembentukan modal berupa mesin, seperti: mesin pertanian, mesin pertambangan, mesin industri, dan alat perabot serta perlengkapan untuk kantor, hotel, dan restoran.
- Pembentukan modal berupa alat angkutan seperti: mobil, bus, truk, kapal laut, pesawat, sepeda motor, dan sebagainya. yang dimaksud dalam PMTB adalah barang-barang modal yang digunakan untuk keperluan pabrik, kantor maupun usaha rumah tangga, tetapi tidak termasuk yang digunakan untuk konsumsi (durable goods).
- Barang modal lainnya seperti: perluasan hutan; pengembangan/perluasan lahan; penanaman kembali hutan; ternak untuk pembiakan, pemerahan susu atau sebagai alat angkutan; perluasan areal pertambangan; dan sebagainya.

PMTB menurut lapangan usaha/sektor adalah:

- Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
- Pertambangan dan Penggalian;
- Industri Pengolahan;
- Pengadaan Listrik, Gas;

- Pengadaan Air;
- Konstruksi;
- Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- Transportasi dan Pergudangan; I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
- Informasi dan Komunikasi; K. Jasa Keuangan;
- Real Estate;
- Jasa Perusahaan;
- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;
- Jasa Pendidikan;
- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial;
- Jasa lainnya.

PMTB menurut institusi dibedakan atas tiga kelompok berikut:

- Pemerintah. Yang dimaksud dengan pemerintah di sini adalah pemerintah yang menyelenggarakan *general administration*, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengeluaran PMTB oleh pemerintah misalnya untuk membangun gedung kantor, pembelian mesin-mesin, komputer untuk menyelenggarakan tugas pemerintah sebagai *administration*, termasuk juga bila pemerintah mengeluarkan biaya untuk kepentingan masyarakat yang bersifat infrastruktur, seperti: jalan raya, pembangunan irigasi, dan sebagainya.
- Korporasi/Perusahaan Swasta termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam kategori ini hanya pengeluaran investasi yang benar-benar dikuasai BUMN/BUMD, tetapi tidak termasuk pengeluaran biaya oleh kegiatan yang dicakup perusahaan meliputi sektor finansial dan non finansial.
- Rumah tangga dan Lembaga Swasta Nirlaba. Kegiatan membangun rumah baru atau memperbaiki rumah milik sendiri

secara besar-besaran dianggap sebagai bagian dari pembentukan modal. Hal ini sesuai dengan keharusan mengimputasi sewa rumah penduduk (rumah tangga) baik milik sendiri maupun rumah dinas.

2.11 Pengertian Output

Output diartikan sebagai seluruh nilai produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh berbagai sektor produksi. Dengan kata lain, output merupakan “keluaran” atau hasil yang diperoleh dari pendayagunaan seluruh faktor produksi baik berbentuk barang atau jasa seperti: tanah, tenaga kerja, modal dan kewiraswastaan (Mankiw, 2020).

Dari segi ekonomi nasional, output merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi domestik dalam suatu periode tertentu. Dari segi perusahaan, output mencakup nilai barang (komoditi) jadi yang dihasilkan selama suatu periode tertentu ditambah nilai perubahan inventori/stok barang (komoditi) yang masih dalam proses. Output yang dimaksud adalah:

- Barang-barang yang dihasilkan.
- Tenaga listrik yang dijual.
- Selisih nilai stok setengah jadi.

Output ini dihitung atas dasar harga produsen, yaitu harga yang diterima oleh produsen pada tingkat transaksi pertama. Karena masih mengandung nilai penyusutan barang modal, output ini masih bersifat bruto. Untuk mendapatkan output neto atas harga pasar, output bruto atas harga pasar harus dikurangi dengan penyusutan barang modal.

Dalam pengertian ICOR, output adalah tambahan (flow) produk dari hasil kegiatan ekonomi dalam suatu periode atau nilai-nilai yang merupakan hasil pendayagunaan faktor-faktor produksi. Output ini merupakan seluruh nilai tambah atas dasar biaya faktor produksi yang dihasilkan dari seluruh kegiatan usaha. Seluruh output yang dihasilkan dinilai atas dasar harga produsen. Output juga merupakan nilai perolehan produsen atas kegiatan ekonomi produksinya.

2.12 Pengertian Nilai Tambah

Konsep Nilai Tambah berkaitan erat dengan konsep penghitungan output. Nilai Tambah Bruto (NTB) adalah nilai seluruh balas jasa faktor produksi yang meliputi upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tidak langsung (neto). Dengan kata lain, nilai tambah adalah suatu tambahan nilai pada nilai input antara yang digunakan dalam proses menghasilkan barang/jasa. Nilai input antara tersebut bertambah karena input antara tersebut telah mengalami proses produksi yang mengubahnya menjadi barang yang nilainya lebih tinggi.

Sedangkan input antara mencakup nilai seluruh komoditi yang habis atau dianggap habis dalam suatu proses produksi, seperti: bahan baku, bahan bakar, pemakaian listrik, dan sebagainya.

Barang yang digunakan sebagai alat dalam suatu proses produksi dan umurnya kurang dari setahun dan habis dipakai dimasukkan sebagai input antara (bukan barang modal). Penghitungan nilai tambah bruto atas dasar harga pasar dari suatu unit produksi adalah output bruto atas dasar harga produsen dikurangi input antara atas dasar harga pasar. Karena keterbatasan data penyusutan barang modal dan pajak tak langsung, maka pendekatan nilai tambah bruto inilah yang dipakai untuk penghitungan ICOR ini.

2.13 Ketenagakerjaan

Penduduk merupakan sumber daya yang penting dalam pembangunan. Keberadaan mereka dapat menjadi faktor yang mendukung atau menghambat pembangunan, tergantung kualitasnya. Kualitas penduduk dapat diukur dengan beberapa indikator, antara lain:

- **Angka Beban Tanggungan (Dependency Ratio)**

Angka beban tanggungan menunjukkan tingkat ketergantungan penduduk yang dianggap tidak produktif (usia kurang dari 15 tahun atau 65 tahun ke atas) terhadap penduduk usia produktif (15 tahun sampai 64 tahun). Formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$DR = \frac{\text{Jumlah Penduduk} + \text{Jumlah Penduduk}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

Angka beban tanggungan masih merupakan indikator yang sangat sederhana karena produktivitas penduduk hanya dilihat dari usia, bukan dari kegiatan produktifnya (angkatan kerja).

Dalam konsep ketenagakerjaan yang digunakan oleh BPS atas saran dari *The International Labor Organization* (ILO), penduduk dibagi menjadi 2 (dua) golongan yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja.

Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih, yang digolongkan lagi menjadi 2 (dua) yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

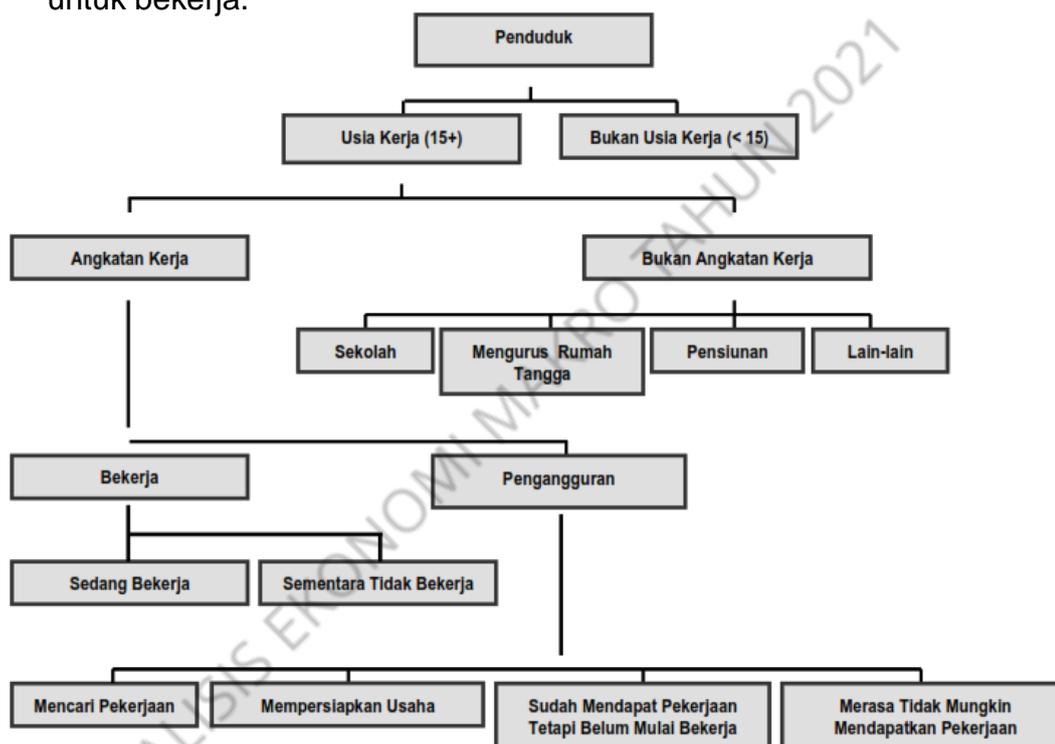
Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, dan yang sedang mencari pekerjaan (pengangguran). Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang kegiatannya tidak bekerja maupun mencari pekerjaan atau penduduk usia kerja dengan kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya, seperti cacat mental atau sebab lain sehingga tidak produktif.

Penduduk bekerja adalah penduduk yang memiliki kegiatan ekonomi dalam rangka memperoleh penghasilan, paling sedikit satu jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu; termasuk kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. Penduduk yang mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah mereka sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok, dan sebagainya. Pengangguran terbuka adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Beberapa konsep pokok ketenagakerjaan adalah:

- Mencari pekerjaan adalah kegiatan dari mereka yang berusaha mendapat pekerjaan. Kegiatan mencari pekerjaan tidak terbatas dalam jangka waktu seminggu yang lalu saja, tetapi bisa dilakukan beberapa waktu yang lalu di mana seminggu yang lalu masih dalam status

menunggu jawaban lamaran. Jadi dalam kategori mencari pekerjaan juga dimasukkan mereka yang sedang memasukkan lamaran.

- Penghasilan mencakup upah/gaji termasuk semua tunjangan, bonus dan hasil usaha berupa sewa, bunga dan keuntungan, baik berupa uang atau natura/barang.
- Hari kerja adalah hari di mana seseorang melakukan kegiatan bekerja paling sedikit 1 jam terus menerus.
- Jam kerja adalah waktu yang dinyatakan dalam jam yang dipergunakan untuk bekerja.



Gambar 2.1 Bagan Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) dengan jumlah penduduk usia kerja, dan biasanya dinyatakan dalam persen.

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$$

TPAK digunakan untuk mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu daerah atau wilayah. Selain itu, TPAK juga digunakan untuk menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja, (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Tingkat Kesempatan Kerja diukur dengan menggunakan rasio jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang sedang bekerja minimal 1 jam secara berturut-turut ataupun mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja di periode pencacahan terhadap total angkatan kerja.

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$$

TKK digunakan untuk mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang bekerja atau sementara tidak bekerja di suatu daerah atau wilayah. Untuk keperluan analisis lebih lanjut, dapat dihitung laju pertumbuhan kesempatan kerja (rKK), yaitu perbandingan antara selisih jumlah kesempatan kerja dalam 2 (dua) periode waktu terhadap jumlah kesempatan kerja pada periode waktu awal, dan biasanya dinyatakan dalam persen. Indikator ini digunakan untuk menyajikan laju pertumbuhan penduduk yang bekerja.

$$r_{KK} = \frac{B_t - B_{t-1}}{B_{t-1}} \times 100\%$$

keterangan:

B_t = Jumlah penduduk yang bekerja tahun t

B_{t-1} = Jumlah penduduk yang bekerja tahun $t-1$

2.14 Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran merupakan salah satu target prioritas pembangunan yang perlu diturunkan. Tingkat pengangguran diindikasikan dengan beberapa ukuran, yaitu:

- **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Tingkat pengangguran terbuka merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja, dan biasanya dinyatakan dalam persen. Kegunaannya adalah memberi indikasi tentang persentase penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran di suatu daerah atau wilayah.

$$TPT = \frac{\text{Jumlah pencari kerja}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$$

Dalam neraca ketenagakerjaan biasanya dilihat jumlah angkatan kerja dan jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Jika angkatan kerja lebih besar dari kesempatan kerja, maka akan terjadi pengangguran. Dengan kata lain, laju pertumbuhan angkatan kerja yang lebih besar dari laju pertumbuhan kesempatan kerja mengakibatkan peningkatan laju pertumbuhan pengangguran, demikian pula berlaku sebaliknya. Secara makro, laju pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi laju pertumbuhan kesempatan kerja. Hubungan kedua variabel tersebut dijelaskan oleh elastisitas kesempatan kerja yang dirumuskan sebagai berikut:

$$E_{kk} = \frac{r_{KK}}{r_{PDRB}}$$

Keterangan:

EKK = Elastisitas kesempatan kerja

rKK = Laju pertumbuhan kesempatan kerja

rPDRB = Laju pertumbuhan ekonomi

Semakin tinggi elastisitas kesempatan kerja berarti setiap laju pertumbuhan ekonomi akan mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas.

2.15 Produktivitas Tenaga Kerja (PTK)

Produktivitas tenaga kerja merupakan indikator kemampuan tenaga kerja dalam penciptaan nilai tambah. Pada kajian ini, produktivitas tenaga kerja diukur dengan membandingkan nilai tambah (PDRB) terhadap jumlah tenaga kerja yang terlibat pada setiap sektor.

Oleh karena itu, produktivitas tenaga kerja yang dimaksud di sini merupakan produktivitas selama satu tahun.

$$PTK_t = \frac{PDRB_i}{TK_i}$$

Keterangan:

PTKi = Produktivitas tenaga kerja sektor ke-i

PDRBi = PDRB sektor ke-i

TKi = Jumlah tenaga kerja sektor ke-i

Laju pertumbuhan produktivitas menunjukkan perkembangan produktivitas pada kurun waktu tertentu.

2.16 Kemiskinan

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi lebih berarti jika diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Kegiatan perekonomian yang bermuara pada orientasi pemerataan akan mengurangi masalah kemiskinan.

Ukuran kemiskinan secara umum dibedakan atas kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut didasarkan pada ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Konsep ini dikembangkan di Indonesia dan dinyatakan sebagai *“inability of the individual to meet basic needs”* yang menyatakan bahwa kemiskinan adalah *“the failure to have certain minimum capabilities”*. Definisi tersebut mengacu pada standar kemampuan minimum tertentu, yang berarti bahwa penduduk yang tidak mampu mencukupi kebutuhan minimum tersebut dapat dianggap sebagai miskin.

Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat hidup secara layak. Nilai standar kebutuhan minimum tersebut digunakan sebagai garis pembatas untuk memisahkan antara penduduk miskin dan tidak miskin. Garis kemiskinan (poverty line) atau batas kemiskinan (poverty treshold).

Garis kemiskinan sesungguhnya merupakan sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan minimum non-makanan yang mendasar, seperti perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan aneka barang dan jasa lainnya. Biaya untuk membayar 2.100 kilo kalori per kapita per hari disebut sebagai Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan biaya untuk membayar kebutuhan minimum non makanan mendasar disebut sebagai Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Individu dengan pengeluaran lebih rendah dari Garis Kemiskinan disebut sebagai penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan atau penduduk miskin. Persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan merupakan indikator kemiskinan yang sering digunakan dan biasa disebut *Head Count Index* (HCI).

Kemiskinan juga identik dengan ketimpangan wilayah, indeks kesenjangan antar wilayah disebut dengan Indeks Williamson, Indeks tersebut pada dasarnya membandingkan antar besaran ekonomi wilayah dengan besaran rata-rata di wilayah yang lebih luas (wilayah induk). Adapun model yang digunakan untuk menyusun indeks tersebut adalah sebagai berikut:

$$WI = \frac{1}{Y} \sqrt{\sum [(Y_i - Y) \cdot (\frac{f_i}{n})]}$$

Keterangan:

WI : Nilai Indeks Williamson Dari Variabel Yang Dimasukkan.

Yi : Nilai Dari Variabel Yang Dimasukkan Masing-Masing Daerah I

Y : Nilai Dari Variabel Yang Dimasukkan Untuk Cakupan Wilayah Yang Membawahi Daerah I.

Fi : Jumlah Penduduk Masing-Masing Daerah I

N : Jumlah Penduduk Keseluruhan Wilayah Yang Membawahi Daerah I.

Dari indeks tersebut, maka dapat diketahui bagaimana posisi satu wilayah, relatif terhadap wilayah induknya. Semakin tinggi angka WI maka tingkat kesenjangan semakin tinggi. Selain itu juga analisis yang dapat menghitung kesenjangan adalah dengan menggunakan indeks penduduk, indikator yang sering dipakai adalah Rasio Gini. Ide dasar perhitungan Rasio Gini sebenarnya berasal dari upaya pengukuran luas suatu kurva yang menggambarkan distribusi pendapatan untuk seluruh kelompok pengeluaran. Secara ilustrasi, luas kurva Lorenz merupakan luas daerah di bawah garis diagonal yang dibatasi dengan kurva pada suatu persegi empat.

Perbandingan antara luas daerah Kurva Lorenz dengan luas daerah di bawah garis diagonal dapat diperoleh nilai Rasio Gini. Secara matematis, untuk menghitung Rasio Gini dapat menggunakan persamaan berikut:

$$\text{Rasio Gini} = 1 - \sum_{i=1}^k \frac{P_i(Q_i + Q_{i-1})}{10.000}$$

Keterangan:

P_i = Persentase penduduk pada kelas pengeluaran ke-i

Q_i = Persentase kumulatif jumlah pengeluaran pada kelas pengeluaran ke-i

k = Jumlah kelas pengeluaran yang dibentuk.

Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya, semakin mendekati 0 distribusi pendapatan penduduk semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna. Nilai Rasio Gini dibagi menjadi tiga tingkatan.

Jika nilai Rasio Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi

ANALISIS EKONOMI MAKRO TAHUN 2021

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Kajian Literatur

Ekonomi makro atau makroekonomi adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Makroekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi (economic growth), stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan.

Meskipun ekonomi makro merupakan bidang pembelajaran yang luas, ada dua area penelitian yang menjadi ciri khas disiplin ini: kegiatan untuk mempelajari sebab dan akibat dari fluktuasi penerimaan negara jangka pendek (siklus bisnis), dan kegiatan untuk mempelajari faktor penentu dari pertumbuhan ekonomi jangka panjang (peningkatan pendapatan nasional). Model makroekonomi yang ada dan prediksi-prediksi yang ada jamak digunakan oleh pemerintah dan korporasi besar untuk membantu pengembangan dan evaluasi kebijakan ekonomi dan strategi bisnis.

Sedangkan ekonomi makro daerah yang dimaksud dalam kegiatan ini adalah hal-hal yang terkait dengan ekonomi makro daerah, khususnya terkait dengan indikator-indikator ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi daerah, ketenagakerjaan, Indeks Harga Konsumen, konsumsi rumah tangga, investasi daerah, keuangan daerah, dan kemiskinan.

3.2 Ekonomi Daerah

Setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah pertama-tama perlu mengenali karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah

lain. Dengan demikian tidak ada strategi pembangunan ekonomi daerah yang dapat berlaku untuk semua daerah. Namun di pihak lain, dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, pemahaman mengenai teori pertumbuhan ekonomi wilayah, yang dirangkum dari kajian terhadap pola-pola pertumbuhan ekonomi dari berbagai wilayah, merupakan satu faktor yang cukup menentukan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah.

Keinginan kuat dari pemerintah daerah untuk membuat strategi pengembangan ekonomi daerah dapat membuat masyarakat ikut serta membentuk bangun ekonomi daerah yang dicita-citakan. Dengan pembangunan ekonomi daerah yang terencana, pembayar pajak dan penanam modal (investasi) juga dapat tergerak untuk mengupayakan peningkatan ekonomi. Kebijakan pertanian yang baik, misalnya, akan membuat pengusaha dapat melihat ada peluang untuk peningkatan produksi pertanian dan perluasan ekspor. Dengan peningkatan efisiensi pola kerja pemerintahan dalam pembangunan, sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, pengusaha dapat mengantisipasi bahwa pajak dan retribusi tidak naik, sehingga tersedia lebih banyak modal bagi pembangunan ekonomi daerah pada tahun depan. Pertumbuhan ekonomi (economic growth) merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi.

Perkembangan sektor ekonomi yang terbentuk dari laju pertumbuhan akan memberikan gambaran tentang tingkat perubahan ekonomi yang terjadi, di mana pergerakan laju pertumbuhan ini merupakan indikator penting untuk mengetahui hasil pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah dan sasaran pembangunan dimasa yang akan datang. Di samping digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi, angka ini juga memberikan indikasi tentang sejauh mana aktivitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode tertentu telah menghasilkan tambahan pendapatan bagi penduduk.

Pertumbuhan ekonomi secara riil disajikan melalui PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha. Laju pertumbuhan PDRB per kapita yang riil biasanya didasarkan atas dasar harga konstan yang umumnya digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur ekonomi rakyat secara keseluruhan dalam arti luas, yaitu berapa banyak barang riil dan jasa-jasa yang dihasilkan untuk keperluan konsumsi dan investasi penduduk. Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan peningkatan perekonomian dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang negatif menunjukkan penurunan perekonomian.

Selain pertumbuhan ekonomi, PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) juga merupakan salah satu indikator pembangunan yang menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam meningkatkan produktivitas. Tinggi rendahnya PDRB per kapita suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu besaran PDRB yang dihasilkan suatu daerah dan jumlah penduduknya. Tingkat pertumbuhan ekonomi per kapita juga dapat dipakai sebagai pertimbangan untuk memacu kemampuan suatu daerah dalam meningkatkan output pada tingkat yang lebih cepat dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan penduduknya.

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. Kinerja ekonomi yang tercipta di suatu daerah dibagikan dengan seluruh penduduk, maka akan diperoleh rata-rata pendapatan setiap penduduk selama setahun. Secara tidak langsung PDRB per kapita menggambarkan tingkat kemakmuran wilayah. Dikatakan tingkat kemakmuran wilayah karena belum memperhitungkan komponen-komponen lain, seperti: penyusutan, pajak tidak langsung neto, dan pendapatan neto yang mengalir dari dan ke daerah lain.

Berdasarkan data PDRB juga dapat diperoleh indikator tingkat inflasi. Akan tetapi, tingkat inflasi ini berbeda dengan tingkat inflasi yang biasa digunakan oleh pemerintah. Inflasi yang diperoleh dari data PDRB merupakan inflasi tingkat produsen, sedangkan inflasi yang biasa digunakan oleh pemerintah adalah inflasi tingkat konsumen.

PDRB atas dasar harga berlaku dapat dihitung melalui 2 (dua) metode penghitungan, yaitu: metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung adalah metode perhitungan dengan menggunakan data yang bersumber dari suatu daerah. Metode tidak langsung adalah metode perhitungan dengan cara alokasi yaitu mengalokasikan PDRB provinsi menjadi PDRB kabupaten/kota dengan memakai berbagai indikator.

Metode langsung dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Pendekatan produksi adalah menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan cara mengurangi biaya antara dari masing-masing nilai produksi bruto tiap-tiap sektor atau sub sektor. Pendekatan ini disebut juga pendekatan nilai tambah. Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara.

Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa faktor produksi atau ikut sertanya dalam proses produksi, seperti: upah/gaji, sewa tanah, bunga, keuntungan, penyusutan, dan pajak tidak langsung neto.

Pendekatan pendapatan adalah menghitung nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi yang dihitung dengan jalan menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi, yaitu: upah/gaji, sewa tanah, bunga, keuntungan, penyusutan, dan pajak tidak langsung neto. Untuk sektor pemerintah dan usaha-usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha (sewa tanah, bunga, keuntungan) tidak diperhitungkan.

Pendekatan Pengeluaran bertitik tolak pada penggunaan akhir dari barang dan jasa di wilayah kabupaten/kota. Jadi, PDRB dihitung dengan cara menghitung berbagai komponen pengeluaran akhir, seperti: pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pengeluaran konsumsi nirlaba, pembentukan modal tetap bruto, ekspor dan impor.

Selanjutnya metode tidak langsung adalah mengalokasikan PDRB pada tingkat wilayah yang lebih tinggi (misalkan provinsi) untuk setiap wilayah lebih rendah (misalkan kabupaten/kota) dengan menggunakan alokator tertentu. Alokator yang digunakan dapat didasarkan atas: a. nilai produksi bruto atau neto, b. jumlah produk fisik, c. jumlah tenaga kerja, d. jumlah penduduk, dan e. alokator lain yang dianggap cocok untuk setiap daerah.

Kemudian, metode perhitungan PDRB atas dasar harga konstan dilakukan dengan 4 (empat) cara, yaitu: revaluasi, ekstrapolasi, deflasi, dan deflasi berganda. Metode revaluasi dilakukan dengan cara menilai produksi dan biaya antara tahun berjalan dengan harga tahun dasar, hasilnya merupakan output dan biaya antara atas dasar harga konstan. Selanjutnya, nilai tambah atas dasar harga konstan diperoleh dengan mengurangi output dengan biaya antara atas dasar harga konstan.

Dalam praktiknya, sangat sulit melakukan revaluasi terhadap biaya antara yang digunakan, karena mencakup komponen input yang sangat banyak. Di samping itu data harga yang tersedia tidak dapat memenuhi semua keperluan tersebut. Oleh karena itu, biaya antara atas dasar harga konstan biasanya diperoleh dari perkalian output atas dasar harga konstan masing-masing tahun dengan rasio tetap biaya antara terhadap output pada tahun dasar.

Metode ekstrapolasi dilakukan dengan cara mengalikan nilai tambah tahun dasar dengan indeks produksi. Indeks produksi yang biasa digunakan sebagai ekstrapolasi adalah indeks tenaga kerja, jumlah perusahaan, dan sebagainya. Ekstrapolasi juga dapat dilakukan terhadap output atas dasar harga konstan, kemudian dengan menggunakan rasio tetap nilai tambah terhadap output akan diperoleh perkiraan nilai tambah atas dasar harga konstan.

Metode deflasi dilakukan dengan cara membagi nilai tambah tahun berjalan dengan indeks harga. Indeks harga yang biasa digunakan sebagai deflator adalah indeks harga konsumen, indeks harga perdagangan besar dan sebagainya.

Dalam deflasi berganda, yang dideflasi adalah output dan biaya antara, sedangkan nilai tambah diperoleh dari selisih antara output dan biaya antara hasil deflasi tersebut. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator untuk perhitungan output atas dasar harga konstan adalah indeks harga konsumen dan indeks harga perdagangan besar sesuai cakupan komoditinya, sedangkan indeks harga untuk biaya antara adalah indeks harga dari komponen input terbesar. Kenyataannya, sangat sulit melakukan deflasi terhadap biaya antara, di samping karena komponen terlalu banyak juga karena indeks harga belum tersedia secara baik. Oleh karena itu, dalam perhitungan harga konstan deflasi berganda belum banyak dipakai.

Selain pertumbuhan ekonomi, PDRB, dan PDRB Per kapita, tingkat inflasi juga merupakan indikator penting dalam melihat kondisi ekonomi suatu negara/wilayah/daerah. Laju pertumbuhan inflasi harus selalu diwaspadai dan dikendalikan, karena berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan. Inflasi yang tinggi mempunyai pengaruh agregatif terhadap perekonomian makro sebagai faktor eksternal dunia industri serta berdampak luas pula terhadap sektor perekonomian mikro yang merupakan faktor internal dunia bisnis. Inflasi yang tinggi akan melemahkan daya beli masyarakat terutama terhadap produksi dalam negeri yang selanjutnya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap nilai mata uang nasional. Oleh sebab itu, pengendalian inflasi merupakan upaya antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang saling bersinergi. Pada era otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai peranan yang sangat besar dalam mengelola daerahnya masing-masing. Adanya otonomi daerah di kabupaten/kota telah mendekatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakatnya. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah kabupaten/kota sangat tergantung oleh Kepala Daerahnya masing-masing.

Meningkatkan daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan. Peningkatan daya beli masyarakat jika diiringi dengan tingkat harga yang stabil dan terkendali akan menambah kesejahteraan mereka. Tingkat harga yang stabil dan terkendali ini dapat dipantau setiap saat, dan salah satu indikatornya adalah angka inflasi. Oleh sebab itu, informasi tentang angka inflasi di daerah sangat diperlukan pada era otonomi daerah.

Pengamatan perkembangan harga dari waktu ke waktu untuk mencari faktor utama penyebab kenaikan harga sangat diperlukan dalam rangka pengendalian harga tersebut. Apabila harga barang/jasa dapat dikendalikan, maka tingkat inflasi juga terkendali. Tingkat inflasi merupakan salah satu variabel dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini menjadi tanggung jawab semua pihak, terutama pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi agar tidak terjadi angka inflasi di daerahnya yang melebihi asumsi APBN tersebut.

3.3 Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan lain yang ditetapkan peraturan pemerintah. Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dituangkan dalam bentuk kebijaksanaan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu pemicu pertumbuhan perekonomian suatu daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjabarkan Asas Umum Pengelolaan Keuangan dengan menambahkan uraian sebagai berikut:

- Taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

3.4 Metode Pendekatan

Pada prinsipnya pekerjaan Analisis Ekonomi Makro Kota Tebing Tinggi tahun 2021 ini adalah kegiatan untuk mendeskripsikan, menggambarkan serta memberikan informasi yang jelas dan terang mengenai kondisi perekonomian di Kota Tebing Tinggi yang meliputi ketenagakerjaan, pertumbuhan ekonomi, investasi, pendapatan perkapita, tingkat konsumsi masyarakat, PDRB, struktur ekonomi, keuangan dan perbankan daerah, tingkat pengangguran, serta indikator ekonomi lainnya yang dianggap relevan dengan kegiatan ini. Oleh karena itu, terkait dengan kebutuhan tersebut maka pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Analisis Ekonomi Makro Kota Tebing Tinggi ini adalah dengan pendekatan teknik deskriptif analisis. Teknik ini pada dasarnya mentabulasi data dalam format grafik, tabel atau gambar, kemudian dilakukan analisis berdasarkan frekuensi dan persentase. Beberapa data terkait juga akan digunakan sebagai dasar *forecasting* untuk memperkirakan kondisi ekonomi Kota Tebing Tinggi kedepannya.

Mengingat kegiatan Analisis Ekonomi Makro Kota Tebing Tinggi ini sangat terkait dengan data-data statistik dan instansional, maka data yang digunakan adalah berbagai publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan *software* pengolahan data.

3.5 Menganalisis Kondisi Ekonomi Tebing Tinggi

Analisis kondisi ekonomi Tebing Tinggi mencakup pertumbuhan ekonomi dan sumber-sumber pendapatan daerah yang dianalisis secara deskriptif. Melalui analisis ini diharapkan dapat diketahui perkembangan capaian pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi sehingga dapat digunakan sebagai pijakan untuk kebijakan tahun-tahun selanjutnya.

Adapun data yang digunakan adalah data empiris makro ekonomi Kota Tebing Tinggi dari tahun 2010. 2010 dipilih sebagai tahun dasar karena tahun 2010 adalah tahun dimana terjadi perubahan terakhir atas harga berlaku. Jenis data adalah data sekunder yang diperoleh dari RPJMD Kota Tebing Tinggi dan BPS (Badan Pusat Statistik).

ANALISIS EKONOMI MAKRO TAHUN 2021

BAB 4 GAMBARAN UMUM WILAYAH

4.1 Letak Geografis

Kota Tebing Tinggi merupakan salah satu pemerintah daerah dari 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 38,438 km². Berjarak sekitar 78 Km dari Kota Medan (ibukota Provinsi Sumatera Utara) serta terletak pada lintas utama Sumatera, yaitu yang menghubungkan Lintas Timur dan Lintas Tengah Sumatera melalui Lintas Diagonal pada ruas jalan Tebing Tinggi – Pematangsiantar – Parapat – Balige – Siborongborong (Lihat Gambar 1). Kota Tebing Tinggi terletak pada 3°19'00"- 3°21'00" Lintang Utara dan 98°11' - 98°21' Bujur Timur. Kota Tebing Tinggi berada di bagian tengah Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai yang dibatasi oleh PTPN III, dengan batas – batas:

- Sebelah Utara dengan PTPN (Perusahaan Terbatas Perkebunan Nusantara) III Kebun Rambutan Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai.
- Sebelah Selatan dengan PTPN IV Kebun Pabatu dan Perkebunan Paya Pinang Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai.
- Sebelah Timur dengan PT. Socfindo Tanah Besi dan PTPN III Kebun Rambutan Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai.
- Sebelah Barat dengan PTPN III Kebun Gunung Pamela, Bandar Bajambu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai.

Berdasarkan letak geografisnya Kota Tebing Tinggi beriklim tropis, dengan ketinggian 18-34 meter dpl (di atas permukaan laut) dengan topografi mendatar 0 – 2 % dan bergelombang 2 – 15 %. Temperatur udara di kota ini cukup panas yaitu berkisar 25⁰ – 27⁰ C. Sebagaimana kota di Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi mempunyai dua musim, penghujan dan kemarau. Selama tahun 2020 Kota Tebing Tinggi mengalami hari hujan sebanyak 138 hari dengan curah hujan berkisar antara 21-337 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan juni, yaitu sebanyak 337 mm. Sementara apabila dilihat berdasarkan jumlah hari, hari hujan terbanyak berada pada bulan November, yaitu selama 21 hari.

Sungai Padang merupakan sungai utama yang melintasi Kota Tebing Tinggi sepanjang ± 2.150 m dengan lebar ± 65 m. Sungai besar lainnya adalah Sungai Bahilang, Sungai Kelembah dan Sungai Sibarau. Sedangkan sungai-sungai kecil yang berada di wilayah Kota yaitu Sungai Sigiling, Sungai Sibarau, Sungai Mandaris, Sungai Marimah, dan Sungai Martebing. Sungai-sungai tersebut mempunyai pola aliran ke arah utara dan timur laut. Adapun kawasan yang rawan genangan air/ banjir di Kota Tebing Tinggi berada di Kelurahan Bandar Utama, Bandar Sakti, Persiakan, Bandar Sono, Mandailing, Bagelen, Rambung, Tambangan, Berohol, dan Rantau Laban.

4.2 Wilayah Administrasi dan Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Tebing Nomor 15 Tahun 2006 tanggal 31 November 2006, Kota Tebing Tinggi terdiri dari 5 kecamatan dan 35 kelurahan. Pusat Pemerintahan Kecamatan terletak di Kelurahan Pabatu untuk Kecamatan Padang Hulu, Kelurahan Tanjung Marulak untuk Kecamatan Rambutan, Kelurahan Tebing Tinggi untuk Kecamatan Padang Hilir, Kelurahan Pinang Mancung untuk Kecamatan Bajenis, dan Kelurahan Mandailing untuk Kecamatan Tebing Tinggi Kota. Setiap Kelurahan berjarak kurang dari lima kilometer dari pusat pemerintahan masing-masing kecamatan. Luas kecamatan dan kelurahan Se-Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut.

Luas Kota Tebing Tinggi yang terdiri dari 5 kecamatan dan 35 kelurahan dengan luas wilayah 38,438 km². Kecamatan Padang Hilir merupakan kecamatan yang terluas dengan luas 11,441 km² atau 29,76 persen dari luas Kota Tebing Tinggi. Sedangkan kelurahan terluas adalah Kelurahan Berohol (Kecamatan Bajenis) dengan luas 246,60 Ha. Sebagian besar (45,55 persen) lahan di Kota Tebing Tinggi digunakan sebagai lahan pertanian.

Tabel 4.1 Luas Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Tebing Tinggi

Kecamatan	Kelurahan	Luas (ha)
1. Padang Hilir		1.144,10
	Tebing Tinggi	357,38
	Damar Sari	97,62
	Tambangan	137,34
	Tambangan Hulu	239,16
	Satria	58,90
	Bagelen	191,23
	Deblod Sundoro	62,47
2. Padang Hulu		851,10
	Pabatu	116,33
	Padang Merbau	149,67
	Bandar Sono	139,70
	Persiakan	90,20
	Tualang	113,20
	Lubuk Baru	140,11
	Lubuk Raya	101,89
3. Rambutan		593,50
	Tanjung Marulak	48,19
	Tanjung Marulak Hilir	65,31
	Rantau Laban	11,63
	Mekar Sentosa	88,17
	Lalang	89,70
	Sri Padang	61,30
	Karya Jaya	229,20
4. Bajenis		907,80
	Bulian	150,10
	Bandar Sakti	78,10
	Pinang Mancung	126,83
	Teluk Karang	36,17
	Pelita	129,60
	Berohol	246,60
	Durian	140,40
5. Tebing Tinggi Kota		347,30
	Pasar Gambir	33,40
	Badak Bejuang	43,30

Kecamatan	Kelurahan	Luas (ha)
	Pasar Baru	28,20
	Bandar Utama	98,00
	Rambung	72,20
	Tebing Tinggi Lama	48,00
	Mandailing	24,20
Kota Tebing Tinggi		3.843,80

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)

4.3 Kondisi Demografi Daerah

Penduduk Kota Tebing Tinggi berdasarkan hasil SP2020 adalah sebanyak 172.838 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 86.032 jiwa, dan penduduk perempuan sebanyak 86.806 jiwa. Hal ini berarti rasio jenis kelamin tahun 2020 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan adalah 99,11.

Kepadatan penduduk di Tebing Tinggi tahun 2020 mencapai 4,49 ribu jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga adalah sebanyak 5 orang. Kepadatan penduduk di 5 kecamatan cukup beragam, namun kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Tebing Tinggi Kota, dengan kepadatan sebesar 6,97 ribu jiwa/km². Sementara kepadatan penduduk terendah terletak di Kecamatan Padang Hilir, yaitu sebesar 3,40 ribu jiwa/km².

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total
	2020	2020	2020
Padang Hulu	16.211	16.319	32.530
Tebing Tinggi Kota	11.870	12.322	24.192
Rambutan	18.974	19.268	38.242
Bajenis	19.442	19.491	38.933
Padang Hilir	19.535	19.406	38.941
Tebing Tinggi	86.032	86.806	172.838

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)

Apabila data penduduk dilihat berdasarkan angkatan kerja atau bukan angkatan kerja, dari total 126.080 sebanyak 87.334 penduduk berada pada usia angkatan kerja, sementara 37.746 berada di usia bukan angkatan kerja. Dari total angkatan kerja, sebanyak 78.615 penduduk telah bekerja, sementara yang berstatus pengangguran terbuka ada sebanyak 8.719 penduduk.

Tabel 4.3 Jumlah penduduk Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja

Kegiatan utama	Jenis kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Angkatan Kerja	51.371	35.963	87.334
Bekerja	46.242	31.373	78.615
Pengangguran terbuka	5.129	3.590	8.719
Bukan Angkatan Kerja	10.494	28.252	38.746
Sekolah	4.080	4.960	9.040
Mengurus rumah tangga	1.899	20.990	22.889
Lainnya	4.515	2.302	6.187
Jumlah	61.865	64.215	126.080

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)

4.4 Kondisi Sosial

4.4.1 Pendidikan

Pendidikan sangat penting karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) para pelaku ekonomi, termasuk di dalamnya pengusaha kecil, menengah dan koperasi. Tingkat pendidikan memiliki hubungan linear terhadap kualitas sumber daya manusia para



pengusaha dan tenaga kerja pada UKMK.

Peningkatan proses belajar dan mengajar pendudukpun tentunya harus didukung oleh fasilitas yang memadai agar penyampaian ilmu pengetahuan dapat berjalan dengan maksimal. Pada tahun ajaran 2020/2021, sarana gedung sekolah Dasar (SD) ada sebanyak 98 unit, sementara itu untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) berjumlah 25 unit. Untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan SMK berjumlah 31 unit. Apabila dilihat dari tenaga pendukung, jumlah guru SD di Kota Tebing Tinggi ada sebanyak 1091 orang, guru SLTP sebanyak 591 orang, dan guru SLTA dan SMK sebanyak 827 orang. Fasilitas tersebut untuk melayani sebanyak 18.503 orang murid SD, 10257 murid SLTP, dan 12.984 murid SLTA dan SMK.

4.4.2 Kesehatan

Untuk melayani kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan, Kota Tebing Tinggi menyediakan 57 unit fasilitas kesehatan, serta 1.196 tenaga medis dan 194 tenaga non medis. Dari sisi kapasitas tempat tidur yang tersedia pada rumah sakit, puskesmas, dan klinik di Kota Tebing Tinggi berjumlah sebanyak 790 tempat tidur.

Dilihat dari 3 penyakit terbanyak, selama tahun 2020, kasus penyakit ISPA merupakan kasus tertinggi, dengan jumlah kasus sebanyak 11.460 kasus, diikuti penyakit tekanan darah tinggi sebanyak 5.605 kasus, dan penyakit infeksi pada usus sebanyak 3.627 kasus.



4.4.3 Keluarga Berencana

Pada tahun 2020, jumlah akseptor aktif ada sebanyak 11.648 pasangan (81.39 persen dari jumlah Pasangan Usia Subur), dengan akseptor baru sebanyak 4.873 pasangan.



Dari seluruh akseptor aktif, sebagian memilih suntik dan implan sebagai alat kontrasepsi, dengan jumlah masing-masing sebanyak 8.433 pasangan (45,92%) dan 3.827 pasangan (20,84%).

4.5 Kondisi Ekonomi

4.5.1 Industri, Pertambangan dan Energi

Salah satu sektor yang penting untuk pertumbuhan ekonomi adalah industri. Berdasarkan data Tebing Tinggi Dalam Angka 2020, jumlah pelanggan yang dilayani PLN Ranting Kota Tebing Tinggi tahun 2020 adalah sebanyak 75.645 pelanggan. Pelanggan terbesar adalah pelanggan pasca bayar, dengan jumlah sebanyak 47.224 unit pelanggan. Untuk jumlah energi listrik yang terjual tahun 2020 mencapai 191.217 KWH, dengan nilai penjualan sebesar 224 Milyar Rupiah.



Pada tahun 2020, PDAM Tirta Bulian Tebing Tinggi melayani kebutuhan air bersih untuk 10.392 pelanggan dan menyalurkan 2.235.263 m³ air bersih. Pengguna air bersih terbesar adalah kelompok konsumen rumah tangga, dengan jumlah sebanyak 9.054 pelanggan dengan volume pemakaian sebesar 1.799.353 m³.

4.5.2 Pertanian dan Peternakan

Pertanian memiliki peranan yang penting pada perekonomian Kota Tebing Tinggi, hal ini tercermin dengan sebagian besar (45,5%) lahan digunakan sebagai lahan pertanian. Komoditi tanaman bahan makanan yang dihasilkan di Kota Tebing



Tinggi meliputi padi sawah, jagung, kacang tanah, kedelai, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Komoditi tanaman bahan makanan yang masih relatif banyak di Kota Tebing Tinggi adalah padi sawah dan ubi kayu. Produksi padi sawah pada tahun 2020 menorehkan jumlah sebesar 3.244,38 ton. Sementara itu, komoditi sayur-sayuran pada tahun 2020 memproduksi bawah merah sebanyak 46 kw, cabai sebanyak 250 kw, petsai sebanyak 419 kw, dan tomat sebanyak 12 kw.

Dari sisi peternakan, populasi ternak pada tahun 2020 terdiri dari 72 ekor sapi perah, 2.487 ekor sapi potong, 6.875 ekor kambing, 6.570 ekor domba, dan babi sebanyak 877 ekor. Populasi ayam dan bebek berjumlah masing-masing sebanyak 227.749 ekor dan 11.000 ekor.

4.5.3 Pariwisata

Di Kota Tebing Tinggi, hanya terdapat 14 hotel. Seluruh hotel yang terdapat di Kota Tebing Tinggi merupakan hotel non-bintang. Dari sisi jumlah kamar hotel yang tersedia, di Kota Tebing Tinggi tersedia 443 kamar, dengan jumlah tempat tidur sebanyak 712 buah tempat tidur.



4.5.4 Pendapatan Regional

PDRB Kota Tebing Tinggi atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2020 mencapai 6,05 triliun rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) adalah sebesar 3,93 triliun rupiah. Selama lima tahun terakhir (2016-2020), PDRB Kota Tebing Tinggi terus mengalami peningkatan secara harga berlaku (ADHB). Namun apabila dilihat dari harga konstan (ADHK), PDRB mengalami penurunan pada tahun 2020.

Hal ini merupakan dampak atas melambatnya perekonomian yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 terhadap perekonomian riil di Kota Tebing Tinggi di tahun 2020. Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Utara, maka PDRB Kota Tebing Tinggi pada tahun 2020 menduduki peringkat ke-26 di Sumatera Utara. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan daerah lain di sekitar Kota Tebing Tinggi, seperti Kota Tanjung Balai, Kota Binjai, Kota Pematang Siantar, Kota Medan, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batu Bara, dan Kabupaten Deli Serdang. Adapun peranan PDRB ADHB Kota Tebing Tinggi terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020 adalah sebesar 0,74 persen.

BAB 5 RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

5.1 RPJMD Kota Tebing Tinggi

RPJMD merupakan dokumen yang memuat Visi, Misi, Janji-janji Kampanye, program prioritas Walikota dan Wakil Walikota beserta penjabarannya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dasar penyusunan RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2017 – 2022 berdasar pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

RPJMD ini bertujuan untuk pedoman arah perencanaan dan pembangunan Kota Tebing Tinggi yang mengacu pada kondisi, permasalahan, isu strategis di daerah guna dasar penyusunan program, kerangka pendanaan dan indikator kinerja. Dokumen RPJMD ini juga menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tebing Tinggi, Renstra dan Renja OPD.

Setelah memperhatikan dan melakukan review singkat atas RPJMD Kota Tebing Tinggi, khususnya kinerja indikator utama (IKU) Kota Tebing Tinggi yang terkait dengan ekonomi makro, diperoleh indikator kinerja seperti pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, PDRB Per kapita, konsumsi rumah tangga, tingkat kemiskinan, nilai investasi, dan tingkat pengangguran.

Selanjutnya indikator kinerja ekonomi makro ini akan dianalisis berdasarkan data *time series* yang tersedia dan dilakukan proyeksi sampai dengan tahun akhir rencana RPJMD Kota Tebing Tinggi yaitu tahun 2022. Hasil analisis ekonomi makro dan proyeksi ini kemudian dirumuskan sebagai masukan kebijakan pembangunan ekonomi daerah Kota Tebing Tinggi.

5.2 Renstra Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 dibentuklah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi, di mana Perda dimaksud merupakan tindaklanjut atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Selanjutnya diundangkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi No. 18 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi sebagai turunan Perda Nomor 3 Tahun 2016.

Kemudian, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disusunlah Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi tahun 2017-2022. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Di dalam RENSTRA tersebut memuat tentang Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan OPD, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi dalam melaksanakan tugas menjalankan sebagian urusan daerah dibidang informasi yang berbasis TIK, di samping beban tugas lain yang tak kalah pentingnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka dibutuhkan suatu perencanaan sebagai arah kebijakan dan sasaran yang akan dituju. Dalam hal ini, ada 2 (dua) perencanaan yang harus dilakukan, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi 2017 – 2022. Rencana Strategis sebagaimana dimaksud, menjadi landasan dan pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi dalam merencanakan pembangunan 5 Tahun ke depan. Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi Tahun 2017 – 2022, diwujudkan melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi. sekaligus untuk mendukung tercapainya Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi terpilih yaitu; “Menjadikan Kota Tebing Tinggi Sebagai Kota Jasa dan Perdagangan yang Cerdas, Layak, Mandiri dan Sejahtera dengan Sumber daya Manusia yang Beriman dan Berkualitas”.

Dan selanjutnya Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintah dan penyampaian pelayanan kepada masyarakat khususnya pada Bidang Komunikasi dan Informatika dengan memanfaatkan teknologi Komunikasi dan Informatika dalam upaya mempercepat proses modernisasi menuju terwujudnya masyarakat informasi atau masyarakat berbasis ilmu pengetahuan yang berdaya saing.

Dengan memperhatikan RPJMD Kota Tebing Tinggi dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika terkait dengan misi pertama yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kota Tebing Tinggi yang Baik. Selanjutnya program yang sangat terkait dengan data-data ekonomi makro adalah program pengembangan data/informasi statistik daerah.

Dengan kegiatan analisis ekonomi makro ini, maka Dinas akan terbantu dengan tersedianya data dan informasi ekonomi makro selain data-data terbitan BPS Kota Tebing Tinggi. Dan selanjutnya dapat digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam menunjang pengelolaan data dan informasi ekonomi makro daerah.

ANALISIS EKONOMI MAKRO TAHUN 2021

BAB 6 KONDISI TERKINI EKONOMI DAERAH

6.1 Ketenagakerjaan

Sektor Ketenagakerjaan (work force sector) merupakan salah satu faktor penting bagi pembangunan ekonomi nasional dan khususnya dalam upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, melalui pelbagai program yang sering kali berhasil meningkatkan tingkat pendapatan. Demikian juga dengan program yang bertujuan meningkatkan ketrampilan, perluasan kesempatan kerja dan berusaha serta produktivitas dari mereka yang berpenghasilan rendah.

Masalah ketenagakerjaan, akhir-akhir ini diperkirakan akan semakin kompleks dan membutuhkan perhatian yang cukup serius dari berbagai pihak yang terkait, baik dari pemerintah, pengusaha maupun tenaga kerja itu sendiri. Indikasi ini terlihat dari penambahan penduduk usia kerja setiap tahunnya, masih banyaknya pengangguran terbuka maupun terselubung atau bekerja kurang, sebagai akibat dari budaya bercorak agraris, lapangan pekerjaan yang sangat terbatas karena situasi perekonomian yang belum membaik serta semakin menumpuknya pengangguran terdidik, banyaknya sarjana dan tenaga kerja yang tidak produktif sebagai konsekuensi dari peningkatan taraf pendidikan masyarakat sementara lapangan pekerjaan sudah semakin sempit.

Buruknya kondisi perekonomian kita terakhir ini juga mempunyai dampak yang kurang menguntungkan bagi pemberdayaan sumber daya manusia karena berakibat kepada tingginya harga bahan baku, peralatan/mesin serta biaya produksi lainnya yang dapat menyebabkan bangkrut/tutup perusahaan-perusahaan, terutama pabrik-pabrik yang menyerap tenaga kerja. Dampak yang lebih lanjut merupakan tingginya angka pengangguran karena PHK yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

Untuk mengetahui kondisi ketenagakerjaan di Kota Tebing Tinggi, maka dalam bagian ini akan diulas secara singkat keadaan ketenagakerjaan, yang dilihat dari penduduk usia kerja, status pekerjaan, lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan jam kerja, serta indikator-indikator ketenagakerjaan yang meliputi: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

6.2 Penduduk Usia Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Penduduk termasuk kategori usia kerja apabila berumur 15 tahun ke atas, yang dapat digolongkan menjadi : Angkatan Kerja (AK), bila mereka bekerja atau mencari pekerjaan; dan Bukan Angkatan Kerja (BAK), bila mereka bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Di Kota Tebing Tinggi, jumlah penduduk usia kerja dalam beberapa tahun terakhir ini, mengalami kenaikan sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk dari tahun ke tahun.

Tabel 6.1 Jumlah Penduduk dan Persentase Berumur 15 tahun ke atas di Kota Tebing Tinggi menurut Penduduk Usia Kerja (Jiwa)

Tahun	Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	Jumlah Penduduk Usia Kerja	TPAK (persen)
2006	55.561	37.145	92.706	59,9
2007	51.200	40.345	91.445	56,0
2008	55.963	41.134	97.097	57,6
2009	59.717	39.198	98.915	60,4
2010	72.686	37.810	110.496	65,8
2011	66.394	32.251	98.645	67,3
2012	65.196	34.361	99.557	65,5
2013	65.619	39.531	105.150	62,4
2014	71.024	39.196	110.220	64,4
2015	70.362	41.669	112.031	62,8
2016	NA	NA	NA	NA

Tahun	Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	Jumlah Penduduk Usia Kerja	TPAK (persen)
2017	73.227	42.356	115.583	63,4
2018	80.439	36.800	117.239	68,6
2019	79.388	39.607	118.995	66,7
2020	87.334	38.746	126.080	69,3

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dapat menggambarkan partisipasi penduduk usia 15 tahun ke atas, ke dalam pasar kerja. Semakin tinggi TPAK berarti semakin besar keterlibatan mereka.

Dilihat dari tabel 6.1, dapat dilihat bahwa TPAK Kota Tebing tinggi berfluktuatif dari tahun ke tahun, namun trennya terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Penurunan terjadi pada tahun 2007, 2012, 2013, 2015, dan 2019. Menariknya, di tahun 2020 dimana tahun tersebut merupakan awal terpuruknya perekonomian yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19, kota tebing tinggi justru mengalami peningkatan TPAK, yang awalnya 66,7% menjadi 69,3%.

6.3 Lapangan Pekerjaan

Keterlibatan penduduk yang bekerja di suatu lapangan pekerjaan, biasanya di pengaruhi oleh faktor keterampilan/kondisi alam maupun situasi ekonomi di suatu daerah. Untuk dapat melihat sejauh mana setiap lapangan usaha menyerap tenaga kerja, maka lapangan usaha dapat dibagi atas tiga lapangan usaha, yaitu: pertanian (*agriculture*), industri (*manufacture*), dan jasa-jasa (*services*). Sektor pertanian terdiri dari pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan. Sementara untuk sektor manufaktur terdiri dari sektor pertambangan, industri, listrik, gas dan air, serta

bangunan. Sektor terakhir adalah sektor jasa, dimana terbagi atas sektor perdagangan, transportasi, keuangan dan jasa kemasyarakatan.

Dapat dilihat pada tabel 6.3, di Kota Tebing Tinggi sebagian besar tenaga kerja bekerja di lapangan usaha jasa, dapat tercermin dari jumlah persentase yang selalu diatas 50% di tiap tahunnya. Hal yang sama juga terjadi apabila tenaga kerja dibagi atas laki-laki dan perempuan. Kedua jenis kelamin paling banyak bekerja di lapangan usaha jasa. Lapangan usaha kedua yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Kota Tebing Tinggi adalah lapangan usaha Industri, dan yang terakhir adalah pertanian. Pada tahun 2020, tenaga kerja berjenis kelamin laki-laki sebanyak 71,13% bekerja di lapangan usaha jasa; 22,89% di lapangan usaha industri; dan 5,98% bekerja di lapangan usaha pertanian. Untuk tenaga kerja berjenis kelamin perempuan, pada tahun 2020 sebanyak 80,63% tenaga kerja perempuan bekerja di lapangan usaha jasa; sebanyak 14,96% bekerja di lapangan usaha industri, dan sisanya sebanyak 4,41% bekerja di lapangan usaha pertanian

Tabel 6.2 Komposisi Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas yang bekerja di Kota Tebing Tinggi menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin Tahun 2014-2019

Tahun	Jenis Kelamin	Pertanian	Industri	Jasa
2014	L	6,36	26,12	67,52
	P	3,97	5,37	90,66
2015	L	12,50	9,45	78,04
	P	6,55	3,16	90,29
2016	NA	NA	NA	NA
2017	L	10,26	25,21	64,54
	P	4,61	15,02	80,37
2018	L	9,13	25,57	65,30
	P	3,57	9,84	86,59
2019	L	7,95	30,73	61,32
	P	2,39	11,50	86,11
2020	L	5,98	22,89	71,13
	P	4,41	14,96	80,63

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah).

6.4 Status Pekerjaan

Selain dibedakan menurut jenis pekerjaan yang dilakukan, penduduk yang bekerja dapat dibagi atas 7 macam status pekerjaan, di mana dalam hal ini dapat dilihat apakah mereka sebagai pengusaha, buruh atau hanya sebagai pekerja keluarga yang tidak menerima upah/gaji. Adapun ketujuh macam status pekerjaan tersebut adalah:

- Berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain.
- Berusaha dengan dibantu anggota rumah tangga/buruh tidak tetap.
- Berusaha dengan buruh tetap.
- Buruh/karyawan Pemerintah/swasta.
- Pekerja bebas di pertanian
- Pekerja bebas di non pertanian
- Pekerja keluarga.

Namun pada tahun 2020, BPS melakukan perubahan dengan menggabungkan pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di non pertanian. Sehingga secara keseluruhan menjadi 6 status pekerjaan utama, yaitu:

- Berusaha sendiri
- Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar
- Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar
- Buruh/karyawan Pemerintah/swasta.
- Pekerja bebas
- Pekerja keluarga/tak dibayar

Pada umumnya pekerja keluarga, pengusaha tanpa buruh dan pengusaha dengan bantuan pekerja keluarga lebih menonjol pada sektor dan jenis pekerja yang relatif tradisional, sedangkan sektor dan jenis yang relatif modern terdapat lebih banyak buruh dan karyawan dan pengusaha dengan buruh tetap. Untuk Kota Tebing Tinggi, status buruh/karyawan/pegawai dan berusaha sendiri merupakan status pekerjaan yang paling dominan di antara tujuh status pekerjaan yang tersebut di atas. Pada tabel 6.4 dapat dilihat bahwa status pekerjaan utama masyarakat di kota Tebing tinggi adalah buruh/karyawan/petani, dengan persentase laki-laki sebesar 48,89% dan perempuan sebesar 46,18%. Namun sesungguhnya status pekerjaan utama ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2019, masyarakat yang berstatus pekerjaan buruh/karyawan/pegawai ada sebanyak 57,97% untuk laki-laki dan 51,06% untuk perempuan

Tabel 6.3 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2019 dan 2020

Status Pekerjaan Utama	2019		2020	
	L	P	L	P
1. Berusaha Sendiri	25,08	27,20	25,62	22,52
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar	4,50	7,20	6,85	9,83
3. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	5,75	2,42	5,81	4,35
4. Buruh/Karyawan/Pegawai	57,97	51,06	48,89	46,18

5. Pekerja bebas di pertanian	3,49	3,80	6,99	3,4
7. Pekerja keluarga/tak dibayar	3,21	8,31	5,84	13,7 2

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)

6.5 Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran di dalam suatu rumah tangga sangat erat kaitannya dengan pendapatan. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari gambaran jumlah pendapatan yang diterima. Akan tetapi gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan pendapatan sulit dilakukan karena adanya hambatan teknis di lapangan, terutama pada saat wawancara petugas dengan responden. Oleh karena itu pendapatan rumah tangga diperkirakan dari data pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan keadaan kesejahteraan penduduk. Secara umum, pengeluaran rumah tangga dibedakan atas pengeluaran untuk makan dan bukan makanan. Semakin tinggi pendapatan, maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan dari pengeluaran bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi.

Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi barang bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk dan perubahan komposisinya sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Apabila dilihat dari tabel 6.5, terlihat bahwa terjadi pergeseran pola pengeluaran atas kelompok komoditas yang dilakukan oleh masyarakat Kota Tebing Tinggi. Pada tahun 2019, pengeluaran masyarakat lebih banyak pada pengeluaran untuk bukan makanan, yaitu sebanyak Rp 561.810,- (50,96%). Sementara untuk pengeluaran kelompok komoditas makanan adalah sebanyak Rp 540.712,- (49,04%). Pada tahun 2020 terjadi perubahan, dimana pengeluaran terbanyak yang dilakukan oleh

masyarakat Kota Tebing Tinggi adalah pada kelompok komoditas makanan, dengan jumlah Rp 643.559,- (51,69%), dan kelompok komoditas bukan makanan adalah sebesar Rp 601.371,- (48,31%). Apabila dilihat secara lebih rinci, baik pada tahun 2019 dan 2020, kelompok komoditas makanan dan minuman jadi menjadi pengeluaran masyarakat terbesar untuk kategori kelompok komoditas makanan, dengan jumlah masing-masing sebesar Rp 187.081,- (36,4%) dan Rp 222.707,- (34,61%). Sementara yang kelompok pengeluaran terkecil ada pada umbi-umbian, dengan jumlah Rp 3.831,- (0,71%) pada tahun 2019 dan Rp 5.206,- (0,81%) pada tahun 2020. Dari kelompok komoditas bukan makanan, perumahan dan fasilitas rumah tangga menjadi pengeluaran terbesar pada masyarakat Kota Tebing Tinggi, dengan jumlah sebesar Rp 276.949 (49,3%) pada tahun 2019, dan Rp 290.396,- (48,29%) pada tahun 2020. Sementara untuk pengeluaran terkecil dari kelompok komoditas bukan makanan adalah untuk keperluan pesta dan upacara/kenduri.

Menariknya, jumlah pengeluaran untuk keperluan pesta dan upacara/kenduri justru tetap terjadi peningkatan walaupun pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19. Pada tahun 2019 pengeluaran untuk keperluan pesta dan upacara/kenduri adalah sebesar Rp 13.949,- (2,48%). Namun, pada tahun 2020 melonjak menjadi Rp 27.120,- (4,51%).

Tabel 6.4 Rata-rata Pengeluaran Per kapita Sebulan dan Persentasenya menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2019 – 2020

Kelompok Komoditas	2019		2020	
	Angka	Persen	Angka	Persen
Makanan/Food				
Padi-padian	58.745	10,86	63.047	9,80
Umbi-umbian	3.831	0,71	5.206	0,81
Ikan/udang/cumi/kerang	63.239	11,70	72.152	11,21
Daging	17.297	3,20	19.935	3,10
Telur dan susu	38.624	7,14	43.934	6,83
Sayur-sayuran	43.766	8,09	56.066	8,71
Kacang-kacangan	6.790	1,26	8.527	1,32
Buah-buahan	23.537	4,35	28.966	4,50
Minyak dan kelapa	14.239	2,63	16.631	2,58
Bahan minuman	15.055	2,78	17.888	2,78
Bumbu-bumbuan	8.391	1,55	9.938	1,54
Konsumsi lainnya	5.837	1,08	6.977	1,08

Kelompok Komoditas Makanan/Food	2019		2020	
	Angka	Persen	Angka	Persen
Makanan dan minuman jadi	187.081	34,60	222.707	34,61
Rokok	54.280	10,04	71.585	11,12
JUMLAH	540.712	100,00	643.559	100,00
Bukan makanan				
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	276.949	49,30	290.396	48,29
Aneka komoditas dan jasa	145.985	25,98	150.115	24,96
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	40.335	7,18	45.741	7,61
Komoditas tahan lama	39.170	6,97	41.792	6,95
Pajak, pungutan, dan asuransi	45.422	8,08	46.207	7,68
Keperluan pesta dan upacara/kenduri	13.949	2,48	27.120	4,51
JUMLAH	561.810	100,00	601.371	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)

6.6 PDRB Kota Tebing Tinggi

PDRB Kota Tebing Tinggi atas dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2020 mencapai 6,05 triliun rupiah, sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) adalah sebesar 3,93 triliun rupiah. Selama lima tahun terakhir (2016-2020), Kota Tebing Tinggi terus menorehkan peningkatan PDRB dari sisi ADHB. Namun dari ADHK, PDRB 2020 Kota Tebing Tinggi mengalami penurunan. Hal tersebut secara tidak langsung menggambarkan efek pandemi COVID-19 terhadap perekonomian riil di Kota Tebing Tinggi.

Tabel 6.5 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah)

Tahun	ADH Berlaku	ADH Konstan
2016	4.725,48	3.400,75
2017	5.123,02	3.575,51
2018	5.515,52	3.760,50
2019	5.924,20	3.954,03
2020	6.049,16	3.926,39

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, PDRB Kota Tebing Tinggi pada tahun 2020 menduduki peringkat ke-26, atau menyumbang 0,74% dari PDRB Provinsi Sumatera

Utara, jauh lebih kecil dibanding daerah lain yang berada di sekitarnya, seperti Kota Tanjung Balai (1,12%), Kota Binjai (1,43%), Kota Pematang Siantar (1,69%), Kota Medan (29,46%), Kabupaten Serdang Bedagai (3,48%), Kabupaten Batu Bara (4,26%), dan Kabupaten Deli Serdang (13,4%).

6.7 Struktur Perekonomian Kota Tebing Tinggi

Berdasarkan strukturnya, lapangan usaha yang berkontribusi terbesar pada perekonomian Kota Tebing Tinggi berturut-turut dari yang terbesar adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; Industri Pengolahan; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial.

Besaran peranan masing-masing lapangan usaha tersebut terhadap pembentukan PDRB Kota Tebing Tinggi adalah 24,03% untuk lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil, 14,22% untuk lapangan usaha konstruksi. Industri pengolahan menyumbang sebesar 11,98%, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial berperan sebesar 11,53% terhadap PDRB kota Tebing Tinggi. Sementara, lapangan usaha lainnya hanya berperan dibawah 10%.

Lapangan usaha penyumbang PDRB terkecil adalah lapangan usaha pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Listrik dan gas; dan Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur ulang, dengan kontribusi masing-masing secara berurutan adalah sebesar 0,14%, 0,14% dan 0,23%.

Tabel 6.6 Peranan PDRB Atas Harga Berlaku (ADHB) Kota Tebing Tinggi Menurut Lapangan Usaha, 2016-2020 (Persen)

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,31	1,27	1,28	1,25	1,29
Pertambangan dan Penggalian	0,16	0,15	0,14	0,14	0,14
Industri Pengolahan	13,12	13,3	12,81	12,26	11,98
Pengadaan Listrik dan Gas	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,24	0,25	0,24	0,23	0,23
Konstruksi	14,2	14,45	14,76	14,94	14,22
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	21,52	21,98	22,73	23,72	24,03
Transportasi dan Pergudangan	8,01	8,07	7,98	7,95	8,05
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,16	4,15	4,13	4,14	3,99
Informasi dan Komunikasi	1,88	1,89	1,89	1,91	2,02
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,56	5,31	5,18	4,95	4,97
Real Estat	8,37	8,32	8,33	8,3	8,51
Jasa Perusahaan	0,49	0,48	0,46	0,45	0,46
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	12,25	11,93	11,61	11,33	11,53
Jasa Pendidikan	6,52	6,26	6,24	6,24	6,39
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,09	1,1	1,15	1,16	1,17
Jasa Lainnya	0,98	0,94	0,92	0,89	0,89

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)

6.8 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kota Tebing Tinggi tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif, atau terkontraksi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2019. Laju pertumbuhan PDRB ADHK Kota Tebing tinggi pada tahun 2020 adalah -0,7%, dibandingkan tahun sebelumnya yang mampu tumbuh cukup baik, yakni sebesar 5,15%. Padahal sejak tahun 2016 hingga 2018, pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi terus mengalami percepatan yang baik, hanya pada tahun 2019 mengalami sedikit perlambatan, dan kemudian diperparah pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, yang mana memang berdampak pada perekonomian tidak hanya nasional, tetapi juga global.

Namun, masih ada beberapa lapangan usaha yang masih mampu mencatatkan pertumbuhan positif meskipun ditempa Pandemi COVID-19, adapun lapangan usaha tersebut adalah pertambangan dan penggalian yang tumbuh sebesar 3,84%; jasa keuangan dan asuransi yang mampu mencatat pertumbuhan sebesar 2,91%; lalu lapangan usaha informasi dan komunikasi dengan pertumbuhan yang besar, yaitu sebesar 7,27%.

Pertumbuhan lapangan usaha informasi dan komunikasi mampu menjadi lapangan usaha dengan pertumbuhan riil yang besar adalah dampak dari pembatasan mobilitas masyarakat, dimana tidak memungkinkannya perjumpaan atau komunikasi secara fisik (langsung), mau tidak mau harus dilakukan secara virtual (daring).

Pada tahun 2019 (sebelum pandemi COVID-19), lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan riil PDRB paling besar adalah lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan pertumbuhan sebesar 8,77%. Namun pada tahun 2020, lapangan usaha ini jauh merosot dibandingkan tahun 2019, dengan pertumbuhan yang -0,39%

Tabel 6.7 Pertumbuhan Riil PDRB Kota Tebing Tinggi Menurut Lapangan Usaha 2016-2020 (Persen)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,56	4,58	4,09	3,38	2,32
Pertambangan dan Penggalian	4,40	5,07	3,40	2,24	3,84
Industri Pengolahan	3,00	2,65	2,06	1,79	-0,27
Pengadaan Listrik dan Gas	3,40	4,35	2,95	5,40	5,11
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,41	6,94	3,08	3,36	-0,42
Konstruksi	6,62	6,87	5,42	5,79	-5,92
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,37	8,40	8,76	8,77	-0,39

Lapangan Usaha	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Transportasi dan Pergudangan	5,24	7,07	4,95	4,95	-1,69
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,02	5,27	6,24	6,55	-2,28
Informasi dan Komunikasi	5,78	6,07	6,00	6,00	7,27
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,45	-0,06	1,98	1,64	2,91
Real Estate	4,83	4,93	3,53	2,91	1,99
Jasa Perusahaan	2,96	2,03	1,54	2,34	-0,60
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,82	1,13	4,01	3,81	-0,45
Jasa Pendidikan	3,80	3,89	4,99	4,99	1,62
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,69	7,94	7,35	5,19	-0,99
Jasa Lainnya	3,18	3,60	3,21	3,21	-0,99
PDRB	5,11	5,14	5,17	5,15	-0,70

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)

6.9 Perkembangan PDRB Menurut Lapangan Usaha

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dirinci ke dalam 17 lapangan usaha. Sebagian besar lapangan usaha terinci lagi menjadi sublapangan usaha. Perincian tersebut disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2009). Adapun perkembangan Kondisi PDRB tiap-tiap lapangan usaha dijelaskan dibawah ini.

6.9.1 Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan

Jenis lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan terdiri dari:

- a. Sublapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan (terdiri atas tanaman pangan; tanaman hortikultura semusim; perkebunan semusim; tanaman hortikultura tahunan dan lainnya; perkebunan tahunan; peternakan; serta jasa pertanian dan perburuan);
- b. Sublapangan usaha kehutanan dan penebangan kayu; dan
- c. Sublapangan Usaha Perikanan.

Berdasarkan tabel 6.9 terlihat bahwa tahun 2020, nilai PDRB ADHB lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai 78,16 miliar rupiah, sedangkan nilai PDRB ADHK-nya mencapai 56,84 miliar rupiah. Lapangan usaha ini memberi kontribusi pembentukan PDRB total sebesar 1,29%, meningkat dibanding tahun sebelumnya, yang sebesar 1,25%. Namun, dari sisi pertumbuhan masih mengalami perlambatan, dari 3,38% pada tahun 2019 menjadi 2,32% pada tahun 2020. Apabila dilihat lebih rinci lagi berdasarkan sublapangan usaha, pertumbuhan tercepat terjadi pada sublapangan usaha pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian, disusul oleh sublapangan usaha perikanan, dan yang terakhir adalah sublapangan usaha kehutanan & penebangan kayu.

Tabel 6.8 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kota Tebing Tinggi

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai PDRB (dalam Miliar Rp)					
- ADHB	62,09	65,29	70,58	74,27	78,16
- ADHK 2010	49,33	51,59	53,7	55,52	56,81
Proporsi terhadap total PDRB (dalam % - ADHB)	1,31	1,27	1,28	1,25	1,29
Pertumbuhan PDRB (dalam % -ADHK 2010)	4,56	4,58	4,09	3,38	2,32
a. Pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian	4,58	4,58	4,25	3,61	2,38
b. Kehutanan & penebangan kayu	0,6	0,81	0,92	0,31	0,28
c. Perikanan	5,36	5,86	1,96	-0,043	1,58

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)

Tabel 6.9 Peranan Sublapangan Usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian di Kota Tebing Tinggi (Persen)

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	93,44	93,30	93,43	93,60	93,75
a. Tanaman pangan	66,18	65,46	65,37	65,30	64,57
b. Tanaman hortikultura semusim	2,77	2,78	2,68	2,69	2,58
c. Perkebunan semusim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Tanaman hortikultura tahunan dan lainnya	1,91	1,92	1,78	1,72	1,71
e. Perkebunan tahunan	0,62	0,63	0,59	0,57	0,60
f. Peternakan	27,56	28,18	25,59	28,72	29,56
g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,91	1,03	0,98	0,99	0,98
Kehutanan dan Penebangan Kayu	1,40	1,35	1,31	1,30	1,28
Perikanan	5,16	5,35	5,26	5,09	4,97

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)

Jika dilihat berdasarkan sublapangan usahanya, diketahui bahwa penyumbang terbesar pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan di Kota Tebing Tinggi pada tahun 2020 adalah sublapangan usaha pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian (93,75%), diikuti oleh sublapangan usaha perikanan (4,97%) dan kemudian sublapangan usaha kehutanan dan penebangan kayu (1,28%).

Untuk untuk sublapangan usaha pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian, tercatat bahwa penyumbang terbesar adalah tanaman pangan (64,57%), diikuti dengan peternakan (29,56%). Sementara itu, laju pertumbuhan (ADHK) yang mengalami peningkatan pertumbuhan adalah peternakan; perkebunan tahunan; serta tanaman hortikultura tahunan dan lainnya. Adapun sublapangan usaha lainnya tercatat mengalami perlambatan pada pertumbuhan ekonomi.

6.9.2 Pertambangan dan Penggalian

PDRB ADHB lapangan usaha pertambangan dan penggalian pada tahun 2020 menorehkan catatan sebesar 8,52 miliar rupiah. Sumbangan lapangan usaha ini terhadap pembentukan total PDRB di Kota Tebing Tinggi terbilang kecil, yaitu hanya 0.14%,.

Laju pertumbuhan lapangan usaha pertambangan dan penggalian ini selalu menunjukkan nilai yang positif, meskipun angkanya fluktuatif. Pertumbuhan lapangan usaha tersebut pada tahun 2020 adalah sebesar 3,84%, dimana cukup meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yang hanya sebesar 2,24%.

Tabel 6.10 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian di Kota Tebing Tinggi

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai PDRB (dalam Miliar Rp)					
- ADHB	7,4	7,57	7,84	8,1	8,52
- ADHK 2010	5,77	6,06	6,27	6,41	6,65
Proporsi terhadap total PDRB (dalam % - ADHB)	0,16	0,15	0,14	0,14	0,14
Pertumbuhan PDRB (dalam % -ADHK 2010)	4,4	5,07	3,4	2,24	3,84

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)

Di Kota Tebing Tinggi, sublapangan usaha yang berperan terhadap PDRB ADHB lapangan usaha jenis ini hanyalah dari pertambangan dan penggalian selain minyak, gas, panas bumi, batubara, lignit, dan bijih logam. Hal tersebut dikarenakan pertambangan minyak, gas dan panas bumi; pertambangan batubara dan lignit; dan pertambangan bijih logam masih belum ada di Kota Tebing Tinggi.

6.9.3 Industri Pengolahan

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) untuk industri pengolahan pada tahun 2020 di Kota Tebing Tinggi adalah sebesar 724,73 miliar rupiah, sementara nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mencapai 492,10 miliar rupiah. Jenis lapangan usaha ini berkontribusi sebesar 11,98% terhadap total PDRB Kota Tebing Tinggi pada tahun 2020. Dapat dikatakan kontribusi lapangan usaha industri pengolahan di Kota Tebing Tinggi terus menurun sejak tahun 2016.

Tabel 6.11 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan di Kota Tebing Tinggi

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai PDRB (dalam Miliar Rp)	619,87	681,51	706,29	726,29	724,73
- ADHB	462,78	475,04	484,84	493,54	492,19
- ADHK 2010	13,12	13,30	12,81	12,26	11,98
Proporsi terhadap total PDRB (dalam % - ADHB)	3,00	2,65	2,06	1,79	-0,27
Pertumbuhan PDRB (dalam % -ADHK 2010)	619,87	681,51	706,29	726,29	724,73

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)

Laju pertumbuhan industri pengolahan tahun 2020 mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif sebesar -0,27% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain tren lapangan usaha ini yang memang mengalami penurunan pertumbuhan, pertumbuhan negatif ini juga adalah dampak pandemi COVID-19 dimana permintaan dari pasar terus menurun, khususnya terhadap komoditi dengan tujuan ekspor ke luar negeri, seperti komoditi karet olahan SIR-20 pada sub lapangan usaha industri karet, barang dan karet dan plastik yang merupakan penyumbang terbesar pada kategori lapangan usaha industri pengolahan.

Tabel 6.12 Peranan dan Laju Pertumbuhan Sublapangan usaha Industri Pengolahan Kota Tebing Tinggi (Persen)

Sub lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
Peranan					
a. Industri karet, barang dari karet dan plastik	80,04	79,46	78,43	77,96	77,93
b. Industri makanan dan minuman	15,45	16,28	17,22	17,62	17,64
c. Industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik	1,62	1,58	1,63	1,66	1,62
d. Industri Furnitur	1,29	1,18	1,19	1,20	1,20
e. Lainnya	1,59	1,50	1,53	1,55	1,60
Laju Pertumbuhan	3,00	2,65	20,60	1,79	-0,27
a. Industri karet, barang dari karet dan plastik	2,14	2,19	1,24	1,47	-0,01
b. Industri makanan dan minuman	7,81	5,45	6,12	3,14	-1,46
c. Industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik	2,67	3,09	2,98	2,98	-1,52
d. Industri Furnitur	3,94	-0,59	2,12	1,94	-1,97

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)

Sublapangan usaha yang menyumbang peranan terbesar pada tahun 2020 adalah industri karet, barang dari karet dan plastik yaitu sebesar 77,93%, diikuti oleh industri makanan dan minuman, yaitu sebesar 17,64%, kemudian diikuti oleh industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik dengan sumbangsih sebesar 1,62%. Selanjutnya, sublapangan usaha industri furnitur menyumbang 1,2% dari total PDRB untuk lapangan usaha industri pengolahan Kota Tebing Tinggi pada tahun 2020. Jenis industri lainnya masing-masing hanya berkontribusi dibawah 1%. Untuk laju pertumbuhannya sendiri, seluruh sublapangan usaha dari lapangan usaha industri pengolahan mengalami kontraksi. Laju pertumbuhan sublapangan usaha industri karet, barang dari karet dan plastik sebagai kontributor terbesar justru sublapangan yang tumbuh minus sebesar -0,01% dibandingkan tahun sebelumnya yang masih bernilai positif.

Namun hal ini masih baik, mengingat sublapangan usaha ini pada tahun 2019 justru sublapangan usaha yang mengalami laju pertumbuhan terkecil dibandingkan tiga sublapangan usaha terbesar lainnya.

6.9.4 Pengadaan Listrik dan Gas

Lapangan usaha pengadaan listrik dan gas berkontribusi sebesar 0,14% terhadap perekonomian Kota Tebing Tinggi pada tahun 2020. Nilai tersebut tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Total nilai PDRB yang dihasilkan dari lapangan usaha ini secara ADHB maupun ADHK masing-masing adalah sebesar 8,72 miliar rupiah dan 7,88 miliar rupiah, dimana angka ini merupakan peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 6.13 Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas di Kota Tebing Tinggi

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai PDRB (dalam Miliar Rp)					
- ADHB	6,33	7,16	7,72	8,30	8,72
- ADHK 2010	6,62	6,91	7,11	7,50	7,88
Proporsi terhadap total PDRB (dalam % - ADHB)	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14
Pertumbuhan PDRB (dalam % -ADHK 2010)	3,40	4,35	2,95	5,40	5,11

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)

Laju pertumbuhan ekonomi lapangan usaha ini pada tahun 2020 adalah sebesar 5,11%, dimana angka ini merupakan perlambatan dibandingkan tahun 2019, yang mampu mencatat pertumbuhan sebesar 5,4%. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan pada sublapangan usaha ketenagalistrikan yang secara umum memang mengalami perlambatan di tahun 2020.

Tabel 6.14 Peranan dan Laju Pertumbuhan Sublapangan Usaha pada Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas di Kota Tebing Tinggi (Persen)

Sub lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
Peranan					
a. Ketenagalistrikan	98,21	86,67	87,37	88,18	88,67
b. Pengadaan gas dan produksi es	12,79	13,33	12,63	11,82	11,33
Laju Pertumbuhan					
a. Ketenagalistrikan	3,80	3,97	3,03	5,91	5,57
b. Pengadaan gas dan produksi es	0,00	8,19	2,23	0,41	0,45

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)

Apabila dilihat berdasarkan peranannya, lapangan usaha pengadaan listrik dan gas yang memiliki proporsi peran terbesar adalah sublapangan usaha ketenagalistrikan yang selalu berperan diatas 85%. Sementara itu, sublapangan usaha pengadaan gas dan produksi es menyumbang 11,33%. Untuk laju pertumbuhan, sublapangan usaha ketenagalistrikan mengalami penurunan pertumbuhan, yang awalnya sebesar 5,91% pada tahun 2019 menjadi sebesar 5,57% pada tahun 2020. Hal berbeda terjadi pada sublapangan usaha pengadaan gas dan produksi es yang mencatat sedikit kenaikan, dari 0,41% pada tahun 2019 menjadi tumbuh 0,45% pada tahun 2020.

6.9.5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Lapangan usaha ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga serta industri. Termasuk juga didalamnya kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan dan lain-lain. Tidak termasuk pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian

Tabel 6.15 Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang di Kota Tebing Tinggi

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai PDRB (dalam Miliar Rp)					
- ADHB	11,12	12,82	13,30	13,77	13,79
- ADHK 2010	8,23	8,80	9,07	9,38	9,34
Proporsi terhadap total PDRB (dalam % - ADHB)	0,24	0,25	0,24	0,23	0,23
Pertumbuhan PDRB (dalam % -ADHK 2010)	6,41	6,94	3,08	3,36	-0,42

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)

Untuk nilai PDRB Kota Tebing Tinggi pada lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang di tahun 2020 secara ADHB mencapai 13,79 miliar rupiah atau tumbuh sebesar 0,23 persen. Secara ADHK 2010, nilai PDRB lapangan usaha ini menyumbang 9,34 miliar. Namun angka ini merupakan pertumbuhan minus, dimana pada tahun sebelumnya sumbangsih Secara ADHK untuk PDRB Kota Tebing Tinggi adalah sebesar 9,38 miliar rupiah, atau berkontraksi sebesar -0,42 persen.

6.9.6 Konstruksi

Lapangan usaha ini termasuk salah satu jenis lapangan usaha dengan andil terbesar terhadap perekonomian Kota Tebing Tinggi sejak tahun 2016. Pada 2020, jenis lapangan usaha ini berperan sebesar 14,22% atau setara dengan PDRB ADHB sebesar 860,09 miliar rupiah. Apabila dihitung berdasarkan ADHK, PDRB Kota Tebing Tinggi yang bersumber dari lapangan usaha ini adalah sebesar 561,39 miliar rupiah, atau bisa diartikan jika faktor inflasi dihilangkan, nilai PDRB lapangan usaha ini tercatat menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 6.16 Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi di Kota Tebing Tinggi

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai PDRB (dalam Miliar Rp)					
- ADHB	670,9	740,05	813,57	885,21	860,09
- ADHK 2010	500,69	535,08	564,07	596,72	561,39
Proporsi terhadap total PDRB (dalam % - ADHB)	14,20	14,45	14,76	14,94	14,22
Pertumbuhan PDRB (dalam % -ADHK 2010)	6,62	6,87	5,42	5,79	-5,92

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)

Laju pertumbuhan lapangan usaha konstruksi di Kota Tebing Tinggi sejak tahun 2016 hingga 2020 dapat dikatakan berfluktuasi. Pada tahun 2016 hingga 2017, pertumbuhan mengalami percepatan dengan nilai pertumbuhan sebesar 6,87%. Namun tercatat melambat pada 2018 menjadi 5,42%. Pada tahun 2019 kembali terjadi percepatan pertumbuhan menjadi 5,79%. Namun sayangnya diakibatkan oleh Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020, pertumbuhan lapangan usaha Konstruksi di Kota Tebing Tinggi terjerembab cukup dalam, alih-alih mengalami pertumbuhan positif, justru jenis lapangan usaha konstruksi terpaksa harus mengalami berkontraksi menjadi -5,92%.

6.9.7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan salah satu lapangan usaha yang juga turut memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian di Kota Tebing Tinggi.

Tabel 6.17 Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Kota Tebing Tinggi

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai PDRB (dalam Miliar Rp)					
- ADHB	1.017,09	1.126,28	1.253,06	1.404,95	1.453,71
- ADHK 2010	728,57	798,81	858,97	934,32	930,67
Proporsi terhadap total PDRB (dalam % - ADHB)	21,52	21,98	22,73	23,72	24,03
Pertumbuhan PDRB (dalam % - ADHK 2010)	8,37	8,40	8,76	8,77	-0,39

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)

Sejak tahun 2016, lebih dari seperlima PDRB Kota Tebing Tinggi bersumber dari lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Mencapai puncaknya pada tahun 2020, dengan sumbangsih lapangan usaha ini yang sebesar 24,03% dari keseluruhan PDRB Kota Tebing Tinggi, atau setara dengan 1,45 triliun rupiah (ADHB). Namun, tidak terkecuali, jenis lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor di Kota Tebing Tinggi turut terdampak perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Jenis lapangan usaha ini menurun drastis dari yang awalnya tumbuh sebesar 8,77% pada tahun 2019, menjadi -0,39% pada tahun 2020.

Tabel 6.18 Peranan dan Laju Pertumbuhan Sublapangan Usaha pada Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Kota Tebing Tinggi (Persen)

Sub lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
Peranan					
a. Perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya	5,60	5,22	5,01	4,87	4,77
b. Perdagangan besar dan eceran	94,40	94,78	94,99	95,13	95,23
Laju Pertumbuhan					
a. Perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya	1,59	0,76	3,24	3,24	-0,56
b. Perdagangan besar dan eceran	8,78	8,84	9,04	9,04	-0,38

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)

Dilihat berdasarkan sublapangan usahanya, diketahui bahwa setiap tahunnya lebih dari 90% sumbangsih lapangan usaha ini terhadap PDRB bersumber dari sublapangan usaha perdagangan besar dan eceran. Dari sisi laju pertumbuhan, kedua sublapangan usaha terbilang konstan sejak tahun 2016 hingga 2019. Namun kedua lapangan usaha ini tumbuh minus pada tahun 2020 akibat perlambatan ekonomi nasional dan global dengan munculnya pandemi COVID-19.

6.9.8 Transportasi dan Pergudangan

Lapangan usaha transportasi dan pergudangan terdiri dari 6 sublapangan usaha, yaitu:

- a. Angkutan rel;
- b. Angkutan darat;
- c. Angkutan laut;
- d. Angkutan sungai, danau dan penyeberangan
- e. Angkutan udara; dan
- f. Pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir.

Peranan lapangan usaha ini terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi pada tahun 2016 hingga 2020 dapat terbilang cukup stabil, yakni selalu berada di kisaran angka 8%. Untuk besaran sumbangsih jenis lapangan usaha ini terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi adalah 314,97 miliar rupiah jika dihitung berdasarkan ADHK dan 486,66 miliar rupiah apabila ditinjau dari ADHB.

Pada tahun 2020, pertumbuhan jenis lapangan usaha ini sangat merosot jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. Saat 2019, jenis lapangan usaha transportasi dan pergudangan di Kota Tebing Tinggi masih mampu tumbuh sebesar 4,95 persen, namun pada tahun 2020 terkontraksi sangat dalam menjadi -1,69%. Jika melihat trennya selama lima tahun terakhir, nilai pertumbuhan ini merupakan nilai pertumbuhan yang terkecil. Tak pelak hal ini merupakan dampak dari Pandemi COVID-19 yang melahap perekonomian di hampir semua sektor.

Tabel 6.19 Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan di Kota Tebing Tinggi

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai PDRB (dalam Miliar Rp)					
- ADHB	378,68	413,33	439,91	470,83	486,66
- ADHK 2010	271,65	290,85	305,25	320,37	314,97
Proporsi terhadap total PDRB (dalam % - ADHB)	8,01	8,07	7,98	7,95	8,05
Pertumbuhan PDRB (dalam % - ADHK 2010)	5,24	7,07	4,95	4,95	-1,69

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)

Apabila ditinjau dari sublapangan usaha, dapat terlihat bahwa kontribusi terbesar pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan berasal dari angkutan darat yang memberi sumbangsih lebih dari setengah total kontribusi PDRB lapangan usaha transportasi dan pergudangan, yaitu 60,94% pada tahun 2020. Terbesar kedua berasal dari sublapangan usaha pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir yang berkontribusi sebesar 38,22% pada tahun 2020. Sementara, 0,85% sisanya berasal dari sublapangan usaha angkutan rel. Tiga sublapangan usaha lain, yaitu angkutan laut; angkutan sungai; danau dan penyeberangan; serta angkutan udara tidak memiliki sumbangsih PDRB di Kota Tebing Tinggi, karena ketiga sublapangan usaha tersebut tidak memiliki aktivitas perekonomian di Kota Tebing Tinggi hingga tahun 2020.

Tabel 6.20 Peranan Sublapangan Usaha pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan di Kota Tebing Tinggi (Persen)

Sub lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
Peranan					
a. Angkutan darat	63,22	61,26	61,18	61,44	60,94
b. Pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan Kurir	36,75	37,74	37,86	37,62	38,22
c. Angkutan rel	1,03	0,99	0,96	0,93	0,85

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)

6.9.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Pada perekonomian Kota Tebing Tinggi tahun 2020, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum berkontribusi sebesar 3,99% atau menyumbang PDRB Kota Tebing Tinggi sebesar 241,13 miliar rupiah jika dihitung dari ADHB, dan 176,37 miliar rupiah apabila dihitung berdasarkan ADHK.

Tabel 6.21 Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kota Tebing Tinggi

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai PDRB (dalam Miliar Rp)					
- ADHB	196,47	212,39	227,83	245,26	241,13
- ADHK 2010	151,46	159,45	169,40	180,49	176,37
Proporsi terhadap total PDRB (dalam % - ADHB)	4,16	4,15	4,13	4,14	3,99
Pertumbuhan PDRB (dalam % - ADHK 2010)	5,02	5,27	6,24	6,55	-2,28

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)

Jika ditinjau berdasarkan sublapangan usaha, diketahui bahwa setiap tahunnya, penyumbang terbesar untuk lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum di Kota Tebing Tinggi berasal dari sublapangan usaha penyediaan makan minum, dengan persentase sekitar 95% setiap tahunnya.

Dari sisi laju pertumbuhan, lapangan usaha ini mencatatkan laju pertumbuhan negatif untuk kedua sublapangan usahanya. Pada tahun 2020, penyediaan akomodasi mengalami pertumbuhan -1,45%, padahal pada tahun 2019 masih mampu mencatat pertumbuhan 3,73%. Untuk sublapangan usaha penyediaan makan minum pun tidak terhindar dari pertumbuhan negatif, bahkan mengalami penurunan yang jauh lebih parah, yaitu -2,33% dibandingkan tahun sebelumnya, dimana tahun 2019 mencatatkan pertumbuhan yang cukup besar, yaitu 6,71%.

Tabel 6.22 Peranan dan Laju Pertumbuhan Sublapangan Usaha pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum di Kota Tebing Tinggi (Persen)

Sub lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
Peranan					
a. Penyediaan akomodasi	5,51	5,22	5,07	4,94	4,99
b. Penyediaan makan minum	94,49	94,78	94,93	95,06	95,01
Laju Pertumbuhan					
a. Penyediaan akomodasi	-0,35	0,96	3,51	3,73	-1,45
b. Penyediaan makan minum	5,37	5,54	6,40	6,71	-2,33

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)

6.9.10 Informasi dan Komunikasi

Lapangan usaha informasi dan komunikasi berperan penting sebagai penunjang aktivitas pada tiap bidang-bidang perekonomian. Hal ini semakin penting terutama di era globalisasi yang tengah terjadi saat ini. Untuk perekonomian Kota Tebing Tinggi sendiri, lapangan usaha ini berkontribusi 2,02% pada PDRB tahun 2020.

Tabel 6.23 Peranan dan Laju Pertumbuhan Sublapangan Usaha pada Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi di Kota Tebing Tinggi (Persen)

Sub lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
Peranan	1,88	1,89	1,89	1,91	2,02
Laju Pertumbuhan	5,78	6,07	6,00	6,00	7,27

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)

Peranan lapangan usaha ini terhadap perekonomian Kota Tebing Tinggi selama tahun 2016 sampai 2020 relatif stabil dengan selalu berada di kisaran 2 persen. Laju pertumbuhannya sendiri cukup tinggi yakni dikisaran 6% sejak tahun 2017. Pada tahun 2020, laju pertumbuhannya bahkan semakin meningkat menjadi 7,27%. Hal ini merupakan dampak dari pergeseran komunikasi dan pelaksanaan pekerjaan yang serba daring.

Apabila jeli, ini merupakan peluang bagi pihak-pihak yang bergerak pada bisnis lapangan usaha informasi dan komunikasi, dan merupakan tanggung jawab pihak terkait untuk meningkatkan kualitas pelayanan ditengah tingginya permintaan atas layanan ini di masa pandemi COVID-19.

6.9.11 Jasa Keuangan dan Asuransi

Pertumbuhan nilai tambah pada lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi di Kota Tebing Tinggi pada tahun 2020 mengalami percepatan pertumbuhan sebesar 2,91% pada tahun 2020, yang awalnya 1,64% pada tahun 2019. Dari nilai PDRB yang disumbangkan dari lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi sendiri adalah sebesar 300,38 miliar rupiah apabila dihitung berdasarkan ADHB, atau sebesar 187,7 miliar rupiah jika dihitung berdasarkan ADHK. Sejak tahun 2016, kontribusi lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi terbilang cukup besar, yakni sebesar 5%, dan pada tahun 2020 berkontribusi sebesar 4,97%

Tabel 6.24 Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi di Kota Tebing Tinggi

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai PDRB (dalam Miliar Rp)					
- ADHB	262,85	272,24	285,76	293,24	300,38
- ADHK 2010	176,08	175,97	179,44	182,40	187,70
Proporsi terhadap total PDRB (dalam % - ADHB)	5,56	5,31	5,18	4,95	4,97
Pertumbuhan PDRB (dalam % - ADHK 2010)	2,45	- 0,06	1,98	1,64	2,91

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)

Bila dilihat lebih rinci lagi, sublapangan usaha yang menjadi penyumbang terbesar pada lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi di Kota Tebing Tinggi adalah sublapangan usaha Jasa Perantara Keuangan, yang berkontribusi sebesar 79%, diikuti oleh sublapangan Jasa Keuangan lainnya dengan kontribusi sebesar 12%. Penyumbang terbesar ketiga adalah sublapangan usaha asuransi dan dana pensiun dengan kontribusi sebesar 8%. Untuk sublapangan usaha jasa penunjang keuangan sendiri memiliki kontribusi yang tidak signifikan, yang hanya 0,01%.

6.9.12 Real Estate

Lapangan usaha real estate memiliki kontribusi yang relatif stabil sejak 5 tahun terakhir, yaitu selalu di kisaran 8%. Pada tahun 2020 sendiri, kontribusi lapangan usaha real estate terhadap pembentukan PDRB Kota Tebing Tinggi adalah sebesar 8,51% atau setara 515,02 miliar rupiah jika dihitung berdasarkan ADHB, dan 322,81% bila dihitung berdasarkan ADHK. Namun, dari sisi pertumbuhan lapangan usaha real estate mengalami perlambatan pada tahun 2020 yakni menjadi 1,99% atau tercatat sebagai yang terlambat selama lima tahun terakhir dimana sebelumnya sejak tahun 2016 hingga tahun 2018 yang berada di kisaran kurang lebih 4%.

Tabel 6.25 Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Real Estate di Kota Tebing Tinggi

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai PDRB (dalam Miliar Rp)					
- ADHB	395,35	426,01	459,40	491,46	515,02
- ADHK 2010	283,13	297,08	307,57	316,51	322,81
Proporsi terhadap total PDRB (dalam % - ADHB)	8,37	8,32	8,33	8,30	8,51
Pertumbuhan PDRB (dalam % - ADHK 2010)	4,83	4,93	3,53	2,91	1,99

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)

6.9.13 Jasa Perusahaan

Lapangan usaha jasa perusahaan termasuk salah satu lapangan usaha yang berkontribusi kecil terhadap PDRB Kota Tebing tinggi. Dapat dilihat pada kontribusi yang tidak lebih dari setengah persen selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, peran lapangan usaha ini terhadap total PDRB bahkan hanya sebesar 0,46%. Pada tahun 2020 juga, pertumbuhannya mengalami kontraksi menjadi -0,6%, jauh menurun dibandingkan pertumbuhan pada 2019 yang sebesar 2,34%. Secara total, jenis lapangan usaha ini menghasilkan nilai tambah sebesar 27,87 miliar rupiah pada tahun 2020 apabila dihitung berdasarkan ADHB, atau sebesar 16,74 miliar rupiah jika berdasarkan ADHK.

Tabel 6.26 Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Perusahaan di Kota Tebing Tinggi

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai PDRB (dalam Miliar Rp)					
- ADHB	23,09	24,62	25,35	26,57	27,87
- ADHK 2010	15,88	16,20	16,45	16,84	16,74
Proporsi terhadap total PDRB (dalam % - ADHB)	0,49	0,48	0,46	0,45	0,46
Pertumbuhan PDRB (dalam % -ADHK 2010)	2,96	2,03	1,54	2,34	-0,6

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)

6.9.14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib meliputi kegiatan yang bersifat pemerintahan, dimana umumnya urusan ini dilakukan oleh pemerintah, termasuk juga kegiatan perundang-undangan dan peneterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Sejak 2016 hingga 2019, lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib memiliki nilai pertumbuhan yang positif.

Namun, pada 2020 jenis lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib terkoreksi cukup dalam menjadi -0,45%. Padahal, lapangan usaha ini termasuk pada salah satu lapangan usaha yang menyumbangkan PDRB terbanyak untuk perekonomian Kota Tebing Tinggi, yaitu disekitaran 11 sampai 12 persen pada lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, sumbangsih lapangan usaha administrasi, pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib menyumbangkan 11,53% dari total PDRB Kota Tebing Tinggi. Jika dilihat berdasarkan ADHB, PDRB yang disumbangkan pada perekonomian Kota Tebing Tinggi adalah sebesar 697,2 miliar rupiah, dan jika dihitung berdasarkan ADHK adalah sebesar 397,65 miliar rupiah.

Tabel 6.27 Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib di Kota Tebing Tinggi

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai PDRB (dalam Miliar Rp)					
- ADHB	579,1	611,35	639,86	671,4	697,2
- ADHK 2010	365,82	369,94	384,77	399,44	397,65
Proporsi terhadap total PDRB (dalam % - ADHB)	12,25	11,93	11,61	11,33	11,53
Pertumbuhan PDRB (dalam % -ADHK 2010)	1,82	1,13	4,01	3,81	-0,45

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)

6.9.15 Jasa Pendidikan

Sejak lima tahun terakhir, lapangan usaha jasa pendidikan berkontribusi di kisaran angka 6% pada perekonomian Kota Tebing Tinggi. Pada 2020, apabila dihitung berdasarkan ADHB, nilai PDRB yang disumbangkan lapangan usaha jasa pendidikan adalah sebesar 386,58 miliar rupiah. Sementara, apabila dihitung berdasarkan ADHK, nilai PDRB Kota Tebing Tinggi yang disumbang dari lapangan usaha Jasa Pendidikan adalah sebesar 245,91 miliar rupiah.

Jika dilihat laju pertumbuhannya, sejak 2016 lapangan usaha jasa pendidikan selalu menorehkan catatan positif. Namun seperti jenis lapangan usaha yang lain, lapangan usaha jasa pendidikan mengalami penurunan pertumbuhan pada tahun 2020, yang awalnya tumbuh 4,99% pada tahun 2019, menjadi 1,62% pada tahun 2020.

Tabel 6.28 Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Pendidikan di Kota Tebing Tinggi

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai PDRB (dalam Miliar Rp)					
- ADHB	308,30	320,69	343,91	366,61	386,58
- ADHK 2010	211,32	219,53	230,48	241,99	245,91
Proporsi terhadap total PDRB (dalam % - ADHB)	6,52	6,26	6,24	6,24	6,39
Pertumbuhan PDRB (dalam % -ADHK 2010)	3,80	3,89	4,99	4,99	1,62

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)

6.9.16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Jenis lapangan usaha ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas. Nilai PDRB pada lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial terus meningkat sejak tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2020, berdasarkan ADHB, lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial menyumbangkan 70.51 miliar rupiah, sementara jika dilihat berdasarkan ADHK, lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial berkontribusi sebesar 48.17 miliar rupiah terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi.

Proporsi jenis lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial selama lima tahun terakhir selalu berada di kisaran 1%. Untuk pertumbuhannya sendiri, lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial terus mengalami penurunan sejak tahun 2017. Pada tahun 2017, lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial mengalami pertumbuhan PDRB sebesar 7,94%, sementara pada tahun 2018 turun menjadi 7,35%.

Pada tahun 2019, laju pertumbuhan terus mengalami penurunan menjadi 5,19%. Penurunan semakin besar ketika pada tahun 2020 terjadi Pandemi COVID-19, dimana laju pertumbuhan lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial terkoreksi cukup dalam menjadi -0,99% dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 6.29 Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial di Kota Tebing Tinggi

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai PDRB (dalam Miliar Rp)					
- ADHB	51,73	56,49	63,22	68,66	70,51
- ADHK 2010	39,91	43,08	46,25	48,65	48,17
Proporsi terhadap total PDRB (dalam % - ADHB)	1,09	1,10	1,15	1,16	1,17
Pertumbuhan PDRB (dalam % -ADHK 2010)	7,69	7,94	7,35	5,19	-0,99

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)

6.9.17 Jasa Lainnya

Kontribusi lapangan usaha jasa lainnya terhadap perekonomian Kota Tebing Tinggi dapat terbilang relatif kecil dibandingkan lapangan usaha lain, yaitu hanya di sekitaran 1%. Pada tahun 2020 sendiri, peranan lapangan usaha jasa lainnya adalah sebesar 0,89%, setara dengan nilai PDRB sebesar 53,65 miliar rupiah apabila dihitung berdasarkan ADHB, dan 39,54 jika dihitung berdasarkan ADHK.

Sejak lima tahun lalu, lapangan usaha jasa lainnya selalu menorehkan pertumbuhan positif, dengan angka pertumbuhan selalu di kisaran 3%. Namun pada tahun 2020 dengan adanya pandemi COVID-19,

lapangan usaha jasa lainnya mengalami penurunan pertumbuhan cukup besar, yaitu sebesar -0,99% dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 6.30 Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Lainnya di Kota Tebing Tinggi

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai PDRB (dalam Miliar Rp)					
- ADHB	46,33	48,39	50,91	52,97	53,65
- ADHK 2010	36,19	37,49	38,69	39,93	39,54
Proporsi terhadap total PDRB (dalam % - ADHB)	0,98	0,94	0,92	0,89	0,89
Pertumbuhan PDRB (dalam % -ADHK 2010)	3,18	3,60	3,21	3,21	-0,99

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)

6.10 Perbandingan Pengeluaran PDRB Untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap Ekspor

Indikator ini berguna untuk menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi rumah tangga di wilayah domestik, dengan produk yang diekspor. Selama ini, konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam pengeluaran PDRB di Kota Tebing Tinggi, dengan persentase diatas 50%. Hal ini berarti bahwa lebih dari setengah produk barang dan jasa yang dihasilkan di Kota Tebing Tinggi digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Adapun sebagian lain dari produk barang dan jasa tersebut juga ada yang diekspor. Secara nominal, nilai PDRB untuk konsumsi rumah tangga maupun yang digunakan untuk ekspor terus meningkat sejak 5 tahun lalu. Namun, bila dibandingkan, dapat terlihat bahwa nilai PDRB yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga selalu lebih besar daripada yang digunakan untuk ekspor.

Tabel 6.31 Perbandingan PDRB Menurut Pengeluaran Untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap Ekspor

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Total Konsumsi RT (dalam juta - ADHB)	3.405.721,63	3.623.618,12	3.906.129,87	4.172.534,36	4.194.447,80
Total Ekspor (dalam juta -ADHB)	1.670.598,95	1.798.598,95	1.968.157,63	2.141.008,88	2.155.570,57
Perbandingan konsumsi RT terhadap ekspor	2,04	2,01	1,98	1,95	1,95

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)

Pada tahun 2016, produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga dibandingkan dengan yang digunakan untuk ekspor adalah sebesar 2,04%, yang berarti bahwa produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga lebih banyak sekitar dua kali lipat dibandingkan dengan yang digunakan untuk ekspor. Hingga tahun 2020, rasio keduanya terus dikisaran 2, dan pada tahun 2020 perbandingan keduanya adalah 1,95. Hal ini berarti bahwa penyediaan (*supply*) domestik lebih banyak dua kali lipat saat diserap untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir rumah tangga dibandingkan untuk digunakan sebagai ekspor. Perbedaan mencolok tersebut salah satunya disebabkan oleh perbedaan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tercatat lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor.

6.11 Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga Terhadap PMTB

Rasio PDRB yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memberikan informasi mengenai perbandingan antara besar produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga dengan besar produk yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap).

Tabel 6.32 Perbandingan PDRB Menurut Pengeluaran Untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PMTB

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Total Konsumsi RT (dalam juta - ADHB)	3.405.721,63	3.623.618,12	3.906.129,87	4.172.534,36	4.194.447,80
Total PMTB (dalam juta - ADHB)	1.488.052,75	1.804.577,59	2.026.603,23	2.209.191,21	2.284.372,44
Perbandingan konsumsi RT terhadap PMTB	2,29	2,01	1,93	1,89	1,84

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)

Secara nominal, terlihat bahwa sejak 5 tahun terakhir nilai PDRB yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga adalah selalu lebih besar dibandingkan yang digunakan untuk PMTB. Adapun perbandingannya adalah selalu berada di kisaran 2 kali lipat. Pada tahun 2020 sendiri rasionya menjadi lebih kecil, yaitu 1,84.

Hal ini dapat diartikan bahwa produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga lebih ada sebanyak hampir dua kali lipat dibandingkan dengan yang digunakan untuk investasi fisik. Namun demikian, dari tahun ke tahun, rasionya semakin mengecil, dimana ini berarti pengeluaran yang digunakan untuk investasi fisik menjadi semakin banyak dibandingkan dengan yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga.

6.12 Perbandingan Konsumsi Akhir Terhadap PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah pengeluaran berbagai produk barang dan jasa akhir (baik itu berasal dari produk domestik maupun impor) untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, lembaga nonprofitt yang melayani rumah tangga (LNRPT) dan pemerintah. Walaupun ketiganya memiliki fungsi yang berbeda pada sistem perekonomian, namun ketiganya sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 6.33 Perbandingan Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Konsumsi Akhir (dalam juta - ADHB)					
a. Rumah Tangga	3.405.721,63	3.623.618,12	3.906.129,87	4.172.534,36	4.194.447,80
b. LNRPT	17.120,01	17.816,92	19.546,54	21.883,79	22.262,04
c. Pemerintah	907.751,40	1.015.952,64	1.095.195,32	1.115.194,88	1.120.310,45
Jumlah	4.330.593,04	4.657.387,68	5.020.871,73	5.309.613,03	5.337.020,29
PDRB (dalam juta - ADHB)	4.725.478,51	5.123.015,86	5.512.517,21	5.924.199,35	6.049.163,10
Perbandingan konsumsi akhir terhadap total PDRB (dalam %)	91,64	90,91	91,08	89,63	88,23

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)

Dapat dilihat bahwa mayoritas barang dan jasa yang berada di wilayah Kota Tebing Tinggi digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir. Pada tahun 2016, nilai konsumsi akhir oleh ketiga pelaku konsumsi mencapai 91,46% dari keseluruhan nilai PDRB (4,33 triliun rupiah).

Nilai konsumsi akhir tersebut terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2020 mencapai 5,34 triliun rupiah atau 88,23% dari total PDRB. Hal ini mengindikasikan begitu signifikannya konsumsi akhir di Kota Tebing Tinggi. Namun, dari persentase dapat terlihat bahwa PDRB lima tahun terakhir yang digunakan untuk konsumsi akhir terus berkurang nilainya, atau dapat diartikan bahwa penggunaan selain konsumsi akhir, seperti investasi fisik, perubahan inventori dan perdagangan netto di Kota Tebing Tinggi menjadi semakin besar tiap tahunnya.

6.13 Perbandingan Ekspor Terhadap PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik dan diperdagangkan ke luar wilayah. Untuk menghasilkan produk yang diekspor, kemungkinan besar menggunakan kapital atau PMTB. Sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital.

Tabel 6.34 Perbandingan Ekspor Terhadap PMTB di Kota Tebing Tinggi

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Ekspor (dalam juta - ADHB)	1.670.598,9 5	1.798.598,9 5	1.968.157,6 3	2.141.008,8 8	2.155.570,5 7
Total PMTB (dalam juta -ADHB)	1.488.052,7 5	1.804.577,5 9	2.026.603,2 3	2.209.191,2 1	2.284.372,4 4
Perbandingan ekspor terhadap PMTB	1,12	1,00	0,97	0,97	0,94

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)

Pada 2016, nilai barang yang diekspor ke daerah lain adalah lebih tinggi daripada nilai PMTB. Namun sejak 2017 mulai terjadi perbedaan, dimana nilai PMTB menjadi lebih besar dibanding nilai ekspor. Hal tersebut terjadi karena nilai PMTB tumbuh dengan signifikan.

Pada tahun 2020 rasionya tercatat 0,94, sementara pada 2016 adalah 1,12. Ini berarti bahwa pada 5 tahun terakhir lebih banyak terjadi investasi fisik dibandingkan ekspor.

6.14 Perbandingan PDRB Terhadap Impor

Rasio PDRB terhadap impor dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu, data tersebut juga dapat menggambarkan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh wilayah lain. Apabila semakin besar rasio PDRB terhadap impor, berarti semakin tinggi ketergantungannya, begitu pula sebaliknya.

Tabel 6.35 Perbandingan PDRB Terhadap Impor di Kota Tebing Tinggi

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB (dalam juta - ADHB)	4.725.478,5 1	5.123.015,8 6	5.512.517,2 1	5.924.199,3 5	6.049.163,1 0
Total Impor(dalam juta - ADHB)	2.805.491,2 2	3.182.978,2 5	3.555.966,3 2	3.790.333,9 0	3.795.486,3 5
Rasio PDRB terhadap Impor	1,68	1,61	1,55	1,56	1,59

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)

Pada 2016, rasio PDRB terhadap impor adalah sebesar 1,68 dan sempat menurun hingga tahun 2018 menjadi sebesar 1,55. Namun sejak tahun 2019 kembali naik, hingga pada tahun 2020 menjadi 1,59. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan Kota Tebing Tinggi semakin besar terhadap impor.

6.15 Neraca Perdagangan

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar wilayah (non-residen) serta dari daerah lain dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara ekspor dan impor disebut sebagai ekspor neto. Jika nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, sedangkan jika terjadi sebaliknya disebut defisit.

Tabel 6.36 Neraca Perdagangan Barang dan Jasa di Kota Tebing Tinggi

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Ekspor (dalam juta - ADHB)	1.670.598,95	1.798.598,95	1.968.157,63	2.141.008,88	2.155.570,57
Impor (dalam juta -ADHB)	2.805.491,22	3.182.978,25	3.555.966,32	3.790.333,90	3.795.486,35
Net Ekspor	-	-	-	-	-
	1.134.892,27	1.384.379,30	1.587.808,69	1.649.325,02	1.639.915,78
Rasio	-0,60	-0,57	-0,55	-0,56	-0,57

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)

Pada 2016, nilai impor Kota Tebing Tinggi lebih banyak 1,13 triliun rupiah dibanding nilai eksportnya, atau memiliki rasio sebesar -0,6. Angka rasio cenderung konstan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2020 rasio menyentuh angka -0,57.

6.16 Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Dari tabel 6.36, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan di Kota Tebing Tinggi terus mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Pada 2016, sebanyak 11,7% penduduk kota tebing tinggi hidup dibawah garis kemiskinan. Pada tahun 2017 persentase penduduk miskin sedikit meningkat menjadi 11,9%. Namun pada tahun 2018 terus mengalami penurunan, hingga pada 2020 angka persentase penduduk miskin menurun menjadi 9,85%.

Tabel 6.37 Garis Kemiskinan (Rp), Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa), dan Persentase Penduduk Miskin Kota Tebing Tinggi (Persen)

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2016	383.650	18,52	11,70
2017	415.307	19,06	11,90

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2018	426.469	16,64	10,27
2019	460.533	16,30	9,94
2020	493.227	16,32	9,85

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)

6.17 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Secara umum, pembangunan manusia di Kota Tebing Tinggi terus mengalami kemajuan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2016 IPM Kota Tebing Tinggi adalah 73,58, dan pada 2020 meningkat menjadi 75,17. Namun, biarpun mengalami peningkatan IPM, laju pertumbuhan IPM pada 2020 mengalami perlambatan.

Pada 2018, pertumbuhan IPM di Kota Tebing Tinggi adalah sebesar 0,84. Pada 2019 laju pertumbuhan IPM Kota Tebing Tinggi sebesar 0,78, hingga akhirnya pada 2020 menurun menjadi 0,12. Hal ini disebabkan karena situasi perekonomian yang memburuk di tengah pandemi COVID-19.

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Seiring dengan meningkatnya IPM, maka indeks masing-masing komponen juga mengalami peningkatan.

Tabel 6.38 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tebing Tinggi Menurut Komponen

Komponen	2016	2017	2018	2019	2020
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	70,21	70,28	70,47	70,76	70,87
Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,65	12,66	12,68	12,71	12,72
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	10,07	10,09	10,24	10,28	10,31

Komponen	2016	2017	2018	2019	2020
Pengeluaran per Kapita (ribu)	11.747	12.055	12.434	12.895	12.876
IPM	73,58	73,90	74,50	75,08	75,15
Pertumbuhan IPM (persen)	1,06	0,43	0,84	0,78	0,12

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)

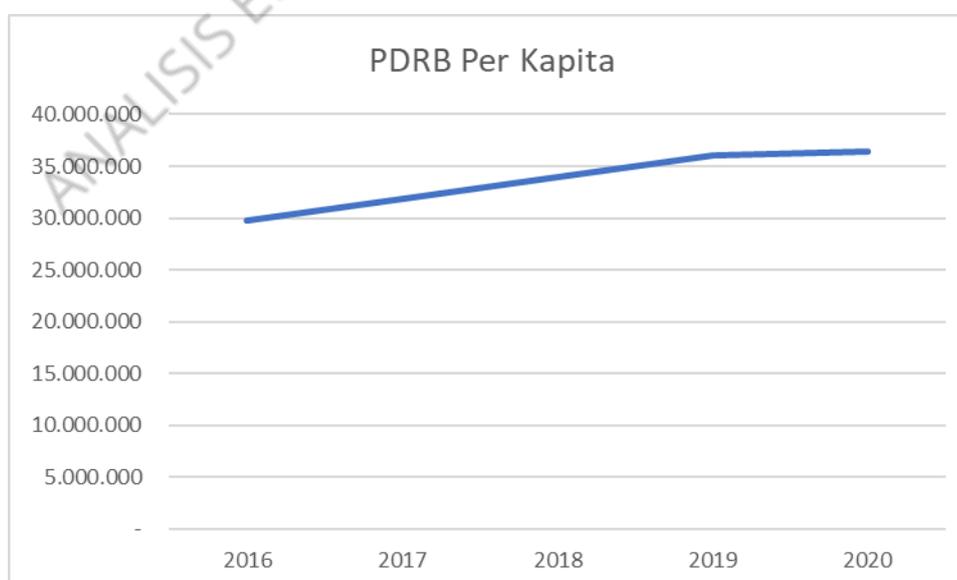
6.18 PDRB Per Kapita

Meskipun terjadi Pandemi COVID-19, PDRB per kapita masih mampu melanjutkan tren peningkatan yang terus terjadi sejak 2016. Pada 2016, PDRB per kapita adalah sebesar Rp 29.750.906,- dan terus meningkat setiap tahunnya hingga 2020 menjadi Rp 36.418.803. Namun jika dilihat, memang peningkatan di 2020 tidak sebesar pada tahun-tahun sebelum terjadinya Pandemi COVID-19. Nilai PDRB per kapita Kota Tebing Tinggi dapat dilihat selengkapnya pada tabel 6.38 dan gambar 6.1.

Tabel 6.39 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tebing Tinggi

Tahun	Jumlah
2016	29.750.906
2017	31.882.154
2018	33.906.282
2019	36.034.837
2020	36.418.803

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)



Gambar 6.1 Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Tebing Tinggi 2016-2020

6.19 Kesenjangan Distribusi Pendapatan

Untuk melihat kesenjangan distribusi pendapatan, digunakan koefisien gini atau dikenal juga sebagai Gini Ratio. Gini ratio bernilai antara 0 dan 1. Jika Gini Ratio bernilai 0, maka pembagian pendapatan merata secara sempurna, tetapi jika bernilai 1, hal ini mengindikasikan pembagian pendapatan yang timpang total. Selanjutnya, bila Ratio Gini kurang dari 0,3 dapat diartikan sebagai ketimpangan rendah.

Jika Gini Ratio antara 0,3-0,4 dapat diartikan sebagai ketimpangan sedang, dan bila diatas 0,4 sebagai ketimpangan tinggi. Data yang terkumpul hanya sampai 2019, dikarenakan ketersediaan data yang didapat oleh penulis. Berdasarkan hasil perhitungan koefisien Gini Kota Tebing Tinggi, diperoleh bahwa koefisien gini Kota Tebing Tinggi adalah 0,34. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan masih masuk dalam kategori sedang.

Tabel 6.40 Koefisien Gini Kota Tebing Tinggi

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Koefisien Gini	0,4	0,36	0,3	0,34	0,34

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)

6.20 Inflasi

Dikarenakan IHK Kota Tebing Tinggi mengikuti IHK Kota Pematangsiantar, maka penghitungan inflasi di Kota Tebing Tinggi pun mengikuti angka inflasi yang ada di kota Pematangsiantar. Sebagai pedoman, tingkat inflasi yang berada di kisaran 2 sampai 4 persen dapat dikategorikan sebagai inflasi rendah. Selanjutnya, inflasi 4 sampai 7 persen masuk pada kategori sedang. Sementara tingkat inflasi 7 sampai 10 persen masuk pada kategori inflasi yang tinggi. Pada tahun 2020, inflasi yang terjadi di Kota Tebing Tinggi meningkat dibanding tahun 2019, menjadi sebesar 2,78%. Padahal sebelumnya, sejak 2016 kota Tebing Tinggi selalu mencatatkan penurunan inflasi hingga tahun 2019, dengan angka inflasi. Tingkat inflasi Kota Tebing Tinggi selengkapnya dapat dilihat pada tabel 6.40.

Tabel 6.41 Tingkat Inflasi Kota Tebing Tinggi

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Inflasi	4,76	3,10	2,15	1,54	2,78

Sumber: Badan Pusat Statistik Pematangsiantar (diolah)

ANALISIS EKONOMI MAKRO TAHUN 2021

BAB 7 PROYEKSI DAN ANALISIS

7.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Tebing Tinggi

Meski perekonomian Indonesia masih diwarnai optimisme pemulihan ekonomi di tahun 2020, namun Pandemi COVID-19 diperkirakan masih akan memberikan ketidakpastian, baik di tingkat daerah maupun nasional. Kemampuan masyarakat dalam menerapkan kebiasaan baru dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan merupakan kunci atas usaha mewujudkan pemulihan ekonomi. Jika dilihat dari outlook indikator-indikator ekonomi, sebenarnya sinyal atas pemulihan ekonomi sudah mulai tampak.

Proyeksi pertumbuhan di tahun mendatang yang digunakan pada kajian ini adalah metode Exponential Smoothing (ETS). Exponential Smoothing adalah metode *forecasting* yang digunakan untuk memproyeksi data *time series*, terutama data yang memiliki jangka waktu yang pendek (Gardner, 1985). Perkembangan pertumbuhan yang dianalisis pada kajian ekonomi Kota Tebing Tinggi ini dilihat dari beberapa sisi yaitu dari perkembangan PDRB; perkembangan tiap lapangan usaha; maupun tiap sub lapangan usaha.

7.1.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dilihat Dari Perkembangan PDRB Kota Tebing Tinggi

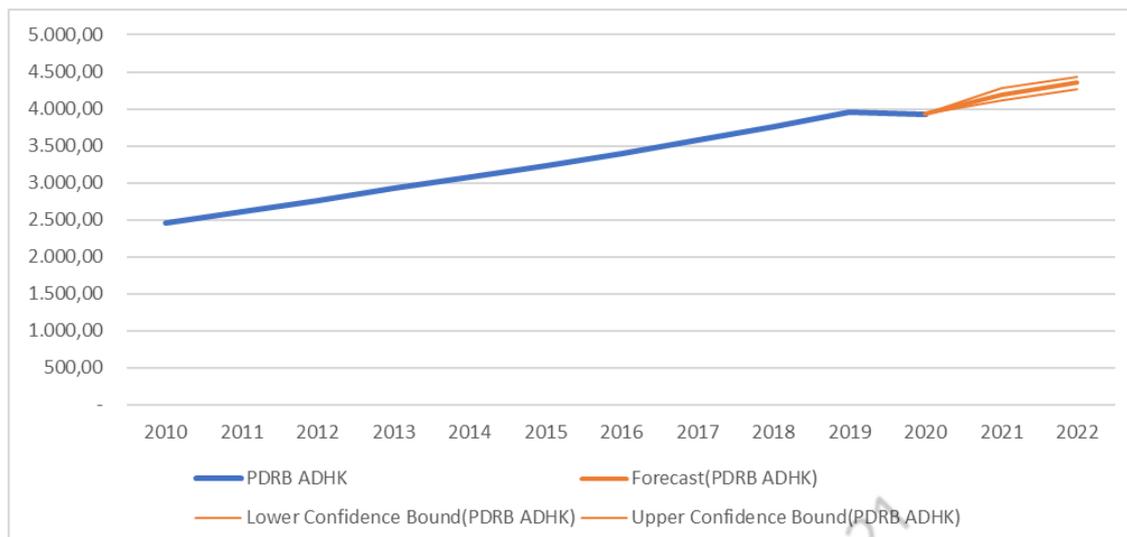
Sejak tahun 2010, PDRB ADHK Kota Tebing Tinggi selalu mengalami pertumbuhan positif. Pada 2010, PDRB ADHK Kota Tebing Tinggi adalah sebesar 2,46 triliun rupiah, terus meningkat hingga 2019 menjadi 3,95 triliun rupiah.

Namun pada 2020, terjadi pertumbuhan negatif yang diakibatkan oleh terjadinya Pandemi COVID-19, sehingga nilai PDRB ADHK di Kota Tebing Tinggi menurun menjadi 3,93 triliun rupiah. Berdasarkan tren pertumbuhan PDRB ADHK Kota Tebing Tinggi sejak 2010, diproyeksikan PDRB ADHK Kota Tebing Tinggi mampu *rebound* di tahun 2021 menjadi sekitar 4,1 triliun rupiah, dan meningkat di tahun 2022 menjadi 4,27 triliun rupiah. Namun jika menggunakan proyeksi paling konservatif, maka PDRB ADHK yang diproyeksikan adalah sebesar sekitar 4,2 triliun rupiah pada 2021, dan 4,35 triliun rupiah pada 2022. *Forecasting* PDRB ADHK Kota Tebing Tinggi selengkapnya dapat dilihat pada tabel 7.1 dan gambar 7.1.

Tabel 7.1 Proyeksi pertumbuhan Ekonomi Dilihat Dari Nilai PDRB (ADHK) (Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	PDRB ADHK		
	Lower Confidence Bound	Middle	Upper Confidence Bound
2010		2.456,99	
2011		2.608,86	
2012		2.758,87	
2013		2.924,75	
2014		3.084,17	
2015		3.235,30	
2016		3.400,75	
2017		3.575,51	
2018		3.760,50	
2019		3.954,03	
2020		3.926,39	
2021	4.108,30	4.191,94	4.275,57
2022	4.266,02	4.349,65	4.433,29

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)



Gambar 7.1 Proyeksi pertumbuhan Ekonomi Dilihat Dari Nilai PDRB (ADHK) (Dalam Milyar Rupiah)

7.1.2 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Tebing Tinggi Dilihat Dari Lapangan Usaha

Sub bab ini akan menganalisis pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Tebing Tinggi per lapangan usaha. Data yang digunakan adalah nilai PDRB ADHK 17 lapangan usaha yang ada di Kota Tebing Tinggi sejak tahun 2010. Data PDRB berdasarkan ADHK dipilih agar PDRB riil dari tahun ke tahun mencerminkan perubahan dalam kuantitas output tanpa dipengaruhi oleh inflasi. Selain itu data 2010 dipilih sebagai baseline *forecasting* karena tahun 2010 adalah tahun terakhir dilakukannya perubahan harga konstan. Analisis forecasting untuk tiap lapangan usaha dapat dilihat di bagian berikut.

7.1.2.1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Kota Tebing Tinggi termasuk lapangan usaha yang mengalami volatilitas pertumbuhan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan menyumbangkan 40.82 milyar rupiah.

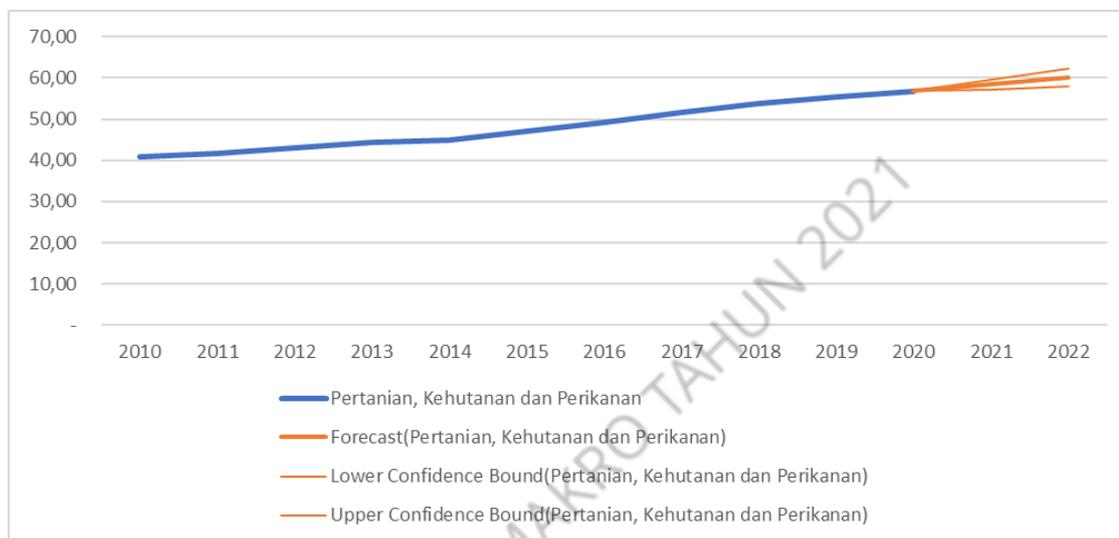
Nilai PDRB yang berasal dari lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan terus meningkat hingga tahun 2019. Untuk tahun 2020, lapangan usaha ini termasuk lapangan usaha yang masih mampu tumbuh positif, walaupun angka pertumbuhannya mengalami penurunan, yang pada tahun 2019 tumbuh 3,38% menjadi 2,32% atau 56,81 milyar rupiah. Pada tahun 2021 dan 2022, lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan diramalkan akan terus mampu mengalami pertumbuhan positif. Tahun 2021 lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan diramalkan mampu menyumbangkan 58,44 milyar rupiah, dan 60,06 milyar rupiah pada tahun 2022. Bahkan dengan asumsi kemungkinan terburuk, batas bawah *forecasting* untuk lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan juga diramalkan masih dapat tumbuh positif, setidaknya hingga 27,22 milyar rupiah pada tahun 2021 dan 57,97 milyar rupiah pada 2022. Angka *forecasting* PDRB (ADHK) lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 7.3 dan gambar 7.3

Tabel 7.2 Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Dalam Milyar Rupiah) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Tahun	Lower Confidence Bound	Middle	Upper Confidence Bound
2010		40,82	
2011		41,76	
2012		42,98	
2013		44,29	
2014		44,81	
2015		47,18	
2016		49,33	
2017		51,59	
2018		53,70	
2019		55,52	
2020		56,81	
2021	57,22	58,44	59,65

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			
Tahun	Lower Confidence Bound	Middle	Upper Confidence Bound
2022	57,87	60,06	62,25

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)



Gambar 7.2 Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Dalam Milyar Rupiah)

7.1.2.2 Pertambangan dan Penggalian

Lapangan usaha Pertambangan dan penggalian adalah lapangan usaha yang justru mampu tumbuh cukup pesat di masa pandemi COVID-19. Sejak tahun 2010, lapangan usaha pertambangan dan penggalian terus mengalami pertumbuhan yang positif, meskipun tingkat pertumbuhannya fluktuatif. Pada tahun 2010, PDRB ADHK Kota Tebing Tinggi yang disumbangkan dari lapangan usaha pertambangan dan penggalian adalah sebesar 4,39 milyar rupiah, terus meningkat hingga tahun 2020 mampu menyentuh 6,65 milyar.

Namun jika dilihat dari persentase pertumbuhan, sejak 5 tahun terakhir pertumbuhan lapangan usaha pertambangan dan penggalian memiliki persentase kenaikan yang fluktuatif. Pada tahun 2016, pertumbuhannya sebesar 4,4%, naik menjadi 5,07% pada 2017. Namun pada 2018 terus menurun menjadi 3,4% hingga pada 2019 turun lagi menjadi 2,24%. Ketika banyak lapangan usaha yang terpuruk akibat Pandemi COVID-19, lapangan usaha pertambangan dan penggalian justru mengalami kenaikan pertumbuhan menjadi 3,84%.

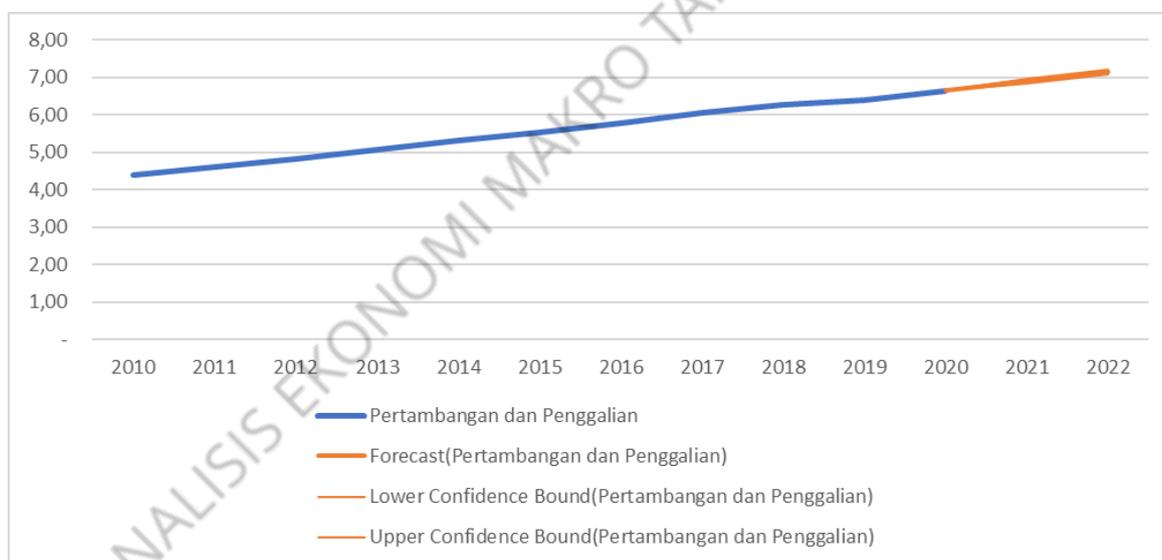
Berdasarkan data histori sejak 2010, lapangan usaha pertambangan dan penggalian diramalkan dapat terus tumbuh positif hingga tahun 2020. Pada tahun 2021, lapangan usaha pertambangan dan penggalian diramalkan dapat menyumbang PDRB Kota Tebing tinggi sekitar 6,91 milyar rupiah, dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 7,14 milyar rupiah. Jika didasarkan pada estimasi yang pragmatis dan konservatif, diramalkan pada tahun 2021 dan 2022 pun lapangan usaha pertambangan dan penggalian masih dapat menyumbang PDRB Kota Tebing tinggi setidaknya sebesar sekitar 6,86 milyar rupiah dan sekitar 7,09 milyar rupiah. *Forecasting* lapangan usaha pertambangan dan penggalian Kota Tebing Tinggi selengkapnya dapat dilihat pada tabel 7.4 dan gambar 7.4.

Tabel 7.3 Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian (Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Pertambangan dan Penggalian		
	Lower Confidence Bound	Middle	Upper Confidence Bound
2010		4,39	
2011		4,60	
2012		4,84	
2013		5,08	
2014		5,31	
2015		5,53	

Pertambahan dan Penggalian			
Tahun	Lower Confidence Bound	Middle	Upper Confidence Bound
2016		5,77	
2017		6,06	
2018		6,27	
2019		6,41	
2020		6,65	
2021	6,86	6,91	6,97
2022	7,09	7,14	7,20

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)



Gambar 7.4. Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Pertambahan dan Penggalian(Dalam Milyar Rupiah)

7.1.2.3 Industri Pengolahan

Industri Pengolahan Kota Tebing Tinggi termasuk lapangan usaha yang cukup ter dampak Pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, lapangan usaha industri pengolahan di Kota Tebing Tinggi mengalami pertumbuhan negatif, turun menjadi 4492,19 milyar rupiah, yang awalnya 493,54 milyar rupiah pada 2019 atau mengalami pertumbuhan -0,27%. Namun

sebenarnya walaupun terus mengalami pertumbuhan, sejak 2016 hingga 2019, lapangan usaha industri pengolahan terus mengalami penurunan pertumbuhan, yang awalnya 3%, turun terus menjadi 1,79% pada 2019. Sehingga memang tren peningkatan pertumbuhannya pun memang terus menurun, dan diperparah dengan terjadinya Pandemi COVID-19.

Lapangan usaha industri pengolahan di Kota Tebing Tinggi diramalkan dapat terus tumbuh positif hingga tahun 2022. Pada tahun 2021, *forecasting* PDRB Kota Tebing Tinggi diramalkan dapat tumbuh sebesar 501,6 milyar rupiah, dan meningkat pada tahun 2022 sebesar 508,35 milyar rupiah.

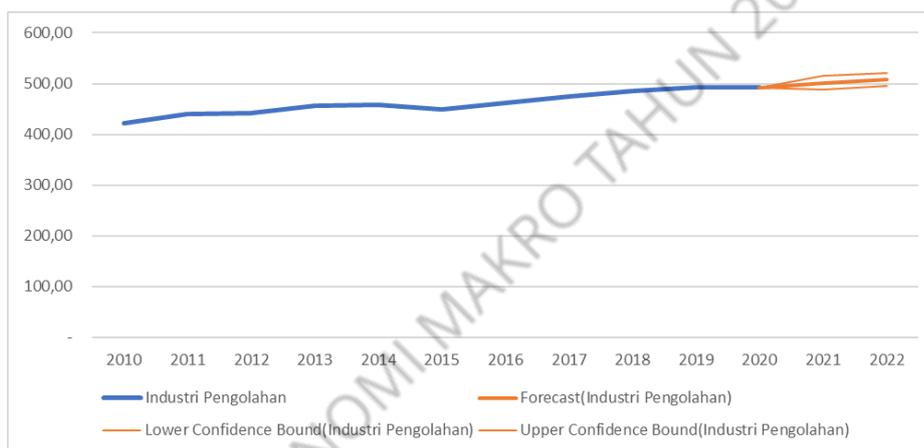
Namun, jika menganut prinsip konservatif dan dengan asumsi penanganan pandemi tidak dilakukan dengan baik, diramalkan pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan negatif, menjadi 488,6 milyar rupiah. Walau begitu, pada tahun 2022, dengan asumsi paling konservatif pun, lapangan usaha industri pengolahan di Kota Tebing Tinggi akan mampu *rebound*, dengan nilai PDRB sebesar 494,93 milyar rupiah. Forecasting lapangan usaha industri pengolahan Kota Tebing Tinggi selengkapnya dapat dilihat pada tabel 7.5 dan gambar 7.5.

Tabel 7.4 Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Industri Pengolahan (Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Industri Pengolahan		
	Lower Confidence Bound	Middle	Upper Confidence Bound
2010		422,28	
2011		439,49	
2012		441,95	
2013		455,75	
2014		457,56	
2015		449,81	
2016		462,78	
2017		475,04	

Industri Pengolahan			
Tahun	Lower Confidence Bound	Middle	Upper Confidence Bound
2018		484,84	
2019		493,54	
2020		492,19	
2021	488,60	501,60	514,60
2022	494,93	508,34	521,74

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)



Tabel 7.5 Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Industri Pengolahan (Dalam Milyar Rupiah)

7.1.2.4 Pengadaan Listrik dan Gas

Lapangan usaha pengadaan listrik dan gas di Kota Tebing Tinggi sebenarnya termasuk lapangan usaha yang fluktuatif dalam hal pertumbuhan ekonomi. Jika melihat tren sejak terjadi perubahan harga konstan untuk PDRB ADHK pada 2010, lapangan usaha pengadaan listrik dan gas terus mengalami pertumbuhan positif, meskipun persentase tingkat pertumbuhannya tidak selalu meningkat dari tahun ke tahun. Untuk tren lima tahun terakhir, pada tahun 2016, lapangan usaha pengadaan listrik dan gas menyumbangkan nilai PDRB sebesar 6,62 milyar rupiah.

Pada tahun 2017, nilai PDRB yang berasal dari lapangan usaha pengadaan listrik dan gas di Kota Tebing Tinggi adalah sebesar 6,91 milyar rupiah, atau tumbuh positif sebesar 6,94%. Pada tahun 2018, PDRB yang berasal dari lapangan usaha ini adalah sebesar 7,11 milyar rupiah, sehingga dapat disimpulkan nilai pertumbuhannya turun menjadi 2,95%. Namun tahun 2018 mampu meningkat sebesar 5,4% atau sebesar 7,5 milyar rupiah.

Ketika terjadi Pandemi COVID-19 pada 2020, lapangan usaha pengadaan listrik dan gas masih mampu tumbuh positif, meskipun sedikit mengalami penurunan persentase pertumbuhan sebesar 5,11%, sehingga nilai PDRB yang berasal dari lapangan usaha pengadaan listrik dan gas adalah sebesar 7,88 milyar rupiah.

Berdasarkan data historis sejak 2010, dengan tren yang ada diramalkan bahwa pada tahun 2021 dan 2022, lapangan usaha pengadaan listrik dan gas masih mampu terus tumbuh positif, pada 2021, lapangan usaha pengadaan listrik dan gas diperkirakan akan mampu menyumbangkan PDRB sebesar 8,2 milyar rupiah, sedangkan pada 2022 adalah sebesar 8,51 milyar rupiah.

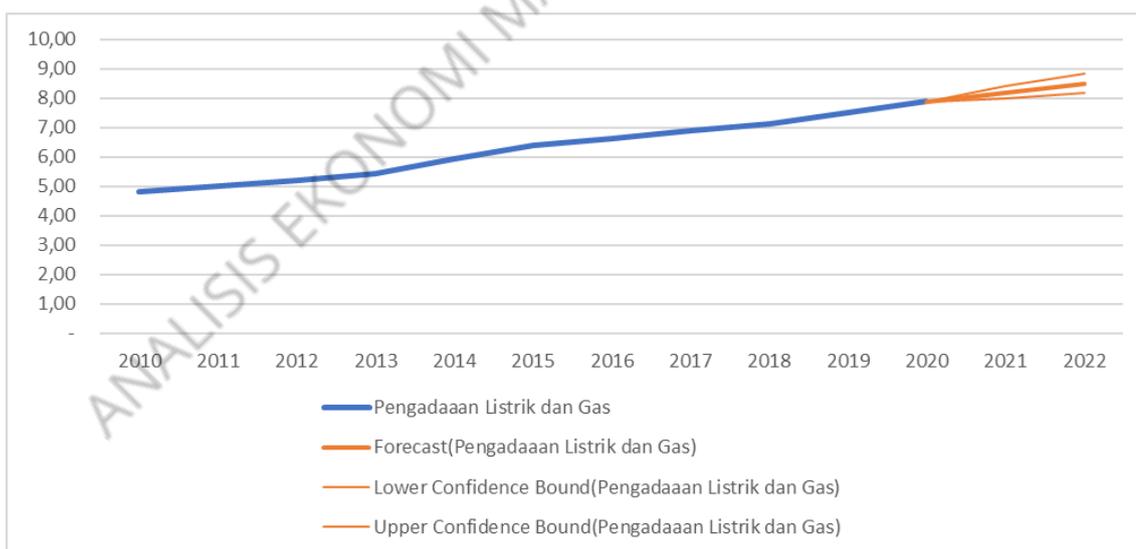
Dengan asumsi *forecast* paling konservatif seperti misalnya angka penurunan COVID-19 di kota tebing tinggi masih tinggi sehingga aktivitas ekonomi masih harus dibatasi, lapangan usaha pengadaan listrik dan gas diramalkan masih dapat terus tumbuh positif, dengan angka perkiraan 7,98 milyar rupiah pada 2021, dan 8,19 milyar rupiah pada tahun 2022. *Forecast* lengkap untuk lapangan usaha pengadaan listrik dan gas di Kota Tebing Tinggi selengkapnya dapat dilihat pada tabel 7.6 dan gambar 7.6.

Tabel 7.6 Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas (Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Pengadaan Listrik dan Gas		
	Lower Confidence Bound	Middle	Upper Confidence Bound
2010		4,81	
2011		5,02	

Pengadaan Listrik dan Gas			
Tahun	Lower Confidence Bound	Middle	Upper Confidence Bound
2012		5,21	
2013		5,44	
2014		5,92	
2015		6,40	
2016		6,62	
2017		6,91	
2018		7,11	
2019		7,50	
2020		7,88	
2021	7,98	8,20	8,41
2022	8,19	8,51	8,83

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)



Gambar 7.3 Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas (Dalam Milyar Rupiah)

7.1.2.5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur ulang di Kota Tebing Tinggi merupakan salah satu lapangan usaha yang sangat berdampak sejak terjadinya pandemi COVID-19. Sejak tahun 2010, lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang di kota tebing tinggi selalu mengalami pertumbuhan positif, meskipun jika dilihat berdasarkan persentase pertumbuhannya, persentase pertumbuhannya fluktuatif.

Pada tahun 2020, lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang mengalami pertumbuhan negatif, yakni sebesar -0,42% atau turun menjadi 9,34 milyar rupiah, yang pada tahun sebelumnya masih mampu menyumbangkan nilai PDRB Kota Tebing Tinggi sebesar 9,38 milyar rupiah berdasarkan ADHK.

Berdasarkan data historis sejak 2010, meski pada 2020 mengalami pertumbuhan negatif, diramalkan lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang di Kota Tebing Tinggi masih dapat terus tumbuh positif hingga 2022.

Pada 2021, diramalkan lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dapat menyumbangkan nilai PDRB sebesar 10,25 milyar rupiah, dan 10,72 milyar rupiah pada 2022. Dengan asumsi paling konservatif pun, diproyeksikan lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang di Kota Tebing Tinggi dapat terus tumbuh positif hingga tahun 2022, dengan estimasi PDRB sebesar 9,8 milyar rupiah pada 2021, dan 10,25 milyar rupiah pada 2022. *Forecast* PDRB ADHK untuk lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang di Kota Tebing Tinggi selengkapnya dapat dilihat pada tabel 7.7 dan gambar 7.7.

Tabel 7.7 Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Lower Confidence Bound	Middle	Upper Confidence Bound
2010		5,16	
2011		5,60	
2012		6,07	
2013		6,57	
2014		7,12	
2015		7,74	
2016		8,23	
2017		8,80	
2018		9,07	
2019		9,38	
2020		9,34	
2021	9,80	10,25	10,71
2022	10,25	10,72	11,18

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)



Gambar 7.4 Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (Dalam Milyar Rupiah)

7.1.2.6 Konstruksi

Lapangan Usaha Konstruksi termasuk lapangan usaha yang sangat terdampak cukup besar atas terjadinya Pandemi COVID-19. Padahal lapangan usaha konstruksi termasuk lapangan usaha dengan kontribusi terbesar pada PDRB Kota Tebing Tinggi. Walaupun sempat terjadi penurunan persentase pertumbuhan pada tahun 2018, namun sebenarnya tren pertumbuhan lapangan usaha konstruksi di Kota Tebing Tinggi terus positif sejak tahun 2010.

Tetapi ketika terjadi pandemi COVID-19, alih-alih tetap tumbuh positif, lapangan usaha konstruksi justru mengalami pertumbuhan yang negatif, dengan penurunan yang cukup dalam, yaitu -5,92%, atau turun menjadi 561,39 milyar rupiah yang awalnya adalah sebesar 596,72 milyar rupiah pada tahun 2019.

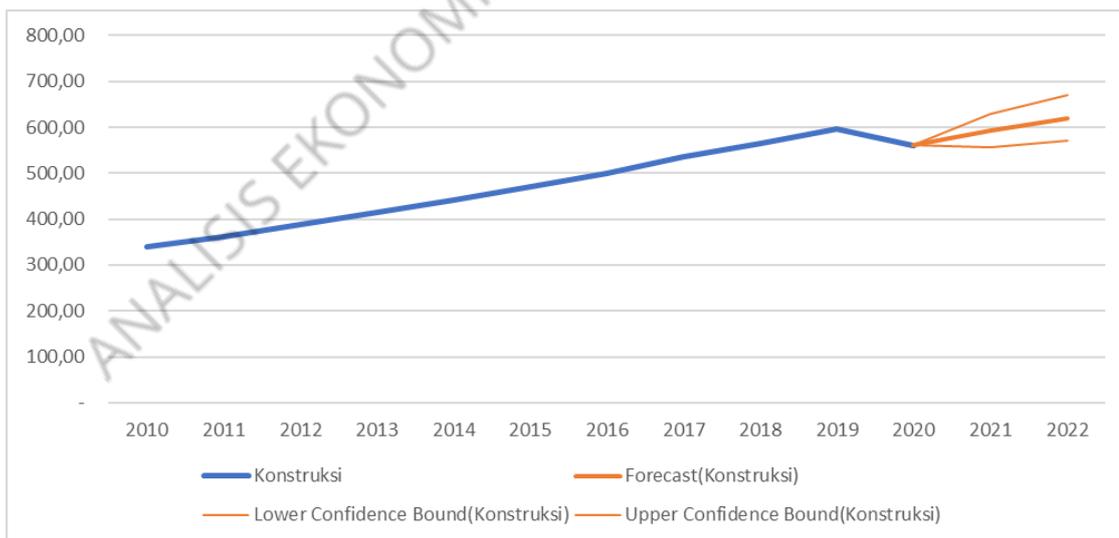
Dengan nilai penurunan yang cukup dalam sejak terjadinya pandemi seperti ini, maka jika menggunakan asumsi yang paling konservatif, lapangan usaha konstruksi di Kota Tebing tinggi diramalkan akan turun pada tahun 2021, dengan sumbangsih nilai PDRB sebesar 556,66 milyar rupiah secara ADHK, walaupun pada 2022 diramalkan akan mampu rebound menjadi 569,95 milyar rupiah. Jika diasumsikan penanganan penyebaran virus COVID-19 di Kota Tebing Tinggi dapat dilakukan dengan baik sehingga aktivitas perekonomian masyarakat tidak terhambat, tahun 2021 tetap diramalkan akan mengalami penurunan PDRB, walaupun tidak serendah asumsi konservatif, yaitu sebesar 593,51 milyar rupiah, dan akan *rebound* pada 2022 menjadi 619,56 milyar rupiah. *Forecast* untuk lapangan usaha konstruksi selengkapnya dapat dilihat pada tabel 7.8 dan gambar 7.8.

Tabel 7.8 Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Konstruksi (Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Konstruksi		
	Lower Confidence Bound	Middle	Upper Confidence Bound
2010		340,95	

Tahun	Konstruksi		
	Lower Confidence Bound	Middle	Upper Confidence Bound
2011		362,65	
2012		387,55	
2013		414,46	
2014		440,51	
2015		469,70	
2016		500,69	
2017		535,08	
2018		564,07	
2019		596,72	
2020		561,39	
2021	556,66	593,51	630,37
2022	569,95	619,56	669,17

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)



Gambar 7.5 Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Konstruksi (Dalam Milyar Rupiah)

7.1.2.7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor juga termasuk lapangan usaha yang mengalami penurunan sangat besar semenjak terjadinya Pandemi COVID-19.

Seperti halnya lapangan usaha konstruksi, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor adalah salah satu lapangan usaha dengan kontribusi terbesar untuk PDRB Kota Tebing Tinggi setiap tahunnya. Melihat tren lima tahun ke belakang, persentase pertumbuhan selalu berkisar di angka 8%, namun ketika terjadi pandemi di tahun 2020, pertumbuhan menjadi negatif, yaitu sebesar -0,39%.

Jika dilihat secara PDRB ADHK, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor hanya mampu menyumbangkan PDRB Kota Tebing Tinggi sebesar 930,67 milyar rupiah, padahal di tahun sebelumnya mampu memberikan kontribusi perekonomian di Kota Tebing Tinggi sebesar 934,32 milyar rupiah.

Berdasarkan tren sejak 2010 hingga 2020, diperkirakan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dapat terus tumbuh positif hingga tahun 2022. Tahun 2021, diperkirakan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor di Kota Tebing Tinggi mampu menyumbangkan PDRB ADHK Kota Tebing Tinggi sebesar 935,1 milyar rupiah, dan akan terus meningkat pada 2022 menjadi 939,37 milyar rupiah. Namun dengan asumsi paling konservatif seperti misalnya penanganan COVID-19 di tingkat nasional atau Kota Tebing Tinggi tidak berjalan baik, maka tidak terlepas kemungkinan bahwa lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor di Kota Tebing Tinggi justru terus mengalami penurunan hingga 2022.

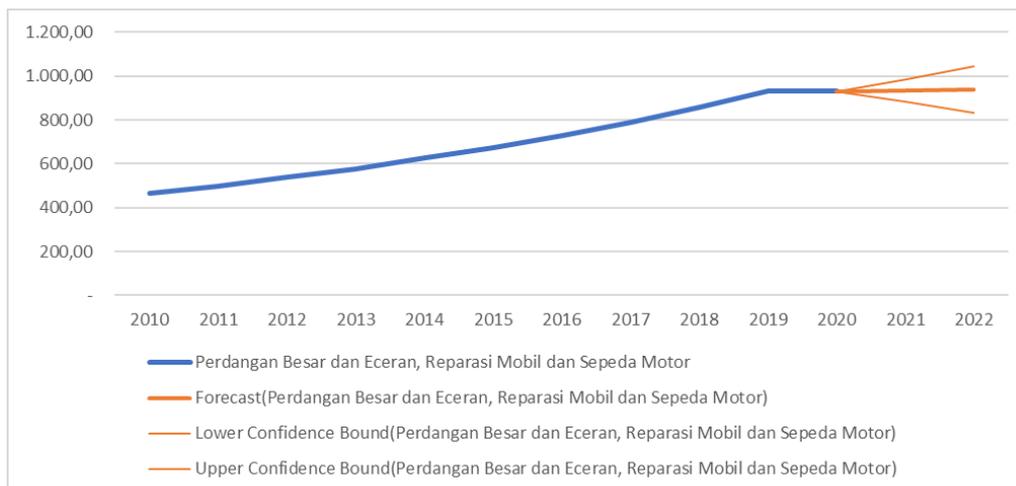
Dengan asumsi terburuk, pada tahun 2021 diperkirakan bahwa lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor pada tahun 2021 hanya mampu menyumbangkan PDRB ADHK Kota Tebing Tinggi sebesar 885,9 milyar rupiah, dan terus menurun pada 2022 menjadi 883,86 milyar rupiah.

Forecasting selengkapnya untuk lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor di Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada tabel 7.9 dan gambar 7.9.

Tabel 7.9 Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		
	Lower Confidence Bound	Middle	Upper Confidence Bound
2010		464,40	
2011		498,70	
2012		539,91	
2013		576,15	
2014		627,08	
2015		672,29	
2016		728,57	
2017		789,81	
2018		858,97	
2019		934,32	
2020		930,67	
2021	885,90	935,10	984,30
2022	833,86	939,37	1.044,88

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)



Gambar 7.6 Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Dalam Milyar Rupiah)

7.1.2.8 Transportasi dan Pergudangan

Lapangan usaha transportasi dan pergudangan juga termasuk pada lapangan usaha yang paling terdampak akibat pandemi COVID-19 yang terjadi pada 2020. Walaupun pada 5 tahun terakhir lapangan usaha transportasi dan pergudangan memang mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, namun selalu berada di angka positif. Namun pada 2020 lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami penurunan yang tajam hingga mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1,69%. Jika dilihat PDRB ADHK riil, terlihat bahwa tahun 2020 mengalami penurunan nilai PDRB, dari yang awalnya 320,37 milyar rupiah pada tahun 2019 menjadi 314,97 milyar rupiah pada tahun 2020.

Dengan data tren pertumbuhan yang ada sejak 2010, diproyeksikan bahwa lapangan usaha transportasi dan pergudangan akan terus mengalami penurunan hingga 2022. Tahun 2021 nilai PDRB ADHK yang disumbangkan oleh lapangan usaha transportasi dan pergudangan diproyeksikan hanya sebesar sekitar 313,59 milyar rupiah, dan pada 2022 sekitar 310,19 milyar rupiah.

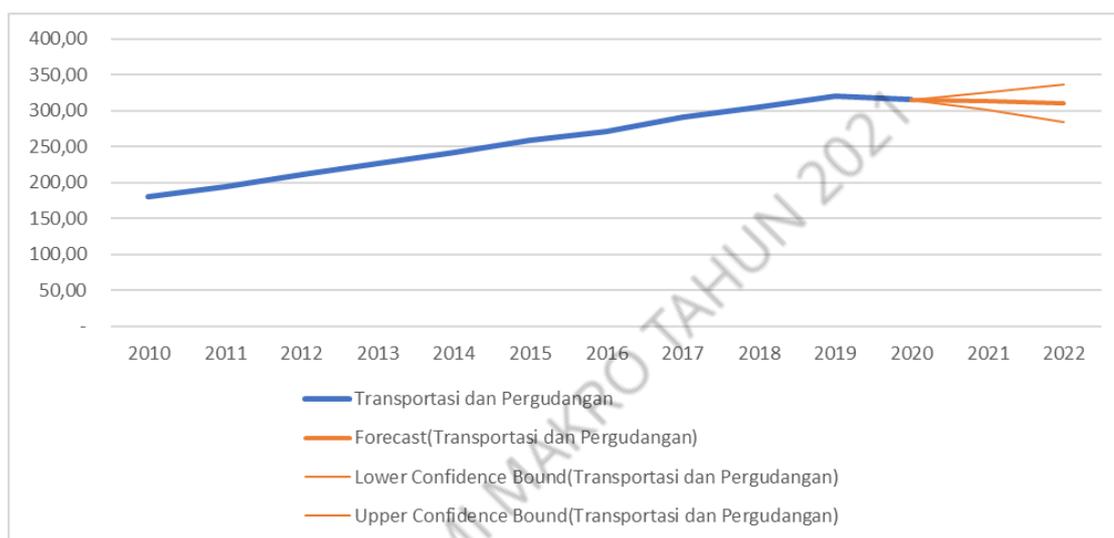
Dengan asumsi paling konservatif seperti misalnya angka penyebaran COVID-19 menjadi tidak terkendali dan berdampak pada keterhambatan aktivitas perekonomian, maka 2021 diproyeksikan lapangan usaha transportasi dan pergudangan di Kota Tebing Tinggi hanya akan menghasilkan PDRB ADHK sebesar 300,92 milyar rupiah, dan terus menurun pada 2022 menjadi 284,11 milyar rupiah. Satu-satunya harapan adalah meratanya vaksinasi yang dilakukan baik di tingkat daerah dan nasional, sehingga pergerakan masyarakat dapat dilakukan dengan lebih leluasa untuk meningkatkan lapangan usaha transportasi dan pergudangan, sehingga upper confidence bound dari forecasting dapat digunakan. Jika ini terjadi, maka ada harapan bahwa tahun 2021, PDRB ADHK yang disumbangkan dapat meningkat menjadi 326,26 milyar rupiah, dan terus meningkat pada 2022 menjadi 336,27 milyar rupiah. Proyeksi pertumbuhan lapangan usaha transportasi dan pergudangan di Kota Tebing Tinggi selengkapnya dapat dilihat pada tabel 7.10 dan gambar 7.10.

Tabel 7.10 Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan (Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Transportasi dan Pergudangan		
	Lower Confidence Bound	Middle	Upper Confidence Bound
2010		180,66	
2011		194,77	
2012		210,64	
2013		226,87	
2014		242,34	
2015		258,12	
2016		271,65	
2017		290,85	
2018		305,25	
2019		320,37	
2020		314,97	

Transportasi dan Pergudangan			
Tahun	Lower Confidence Bound	Middle	Upper Confidence Bound
2021	300,92	313,59	326,26
2022	284,11	310,19	336,27

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)



Gambar 7.7 Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan (Dalam Milyar Rupiah)

7.1.2.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan salah satu lapangan usaha yang turut terdampak perlambatan ekonomi yang diakibatkan oleh Pandemi COVID-19. Jika melihat tren lima tahun terakhir, lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum selalu mengalami peningkatan pertumbuhan.

Pada tahun 2016, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 5,02%, dan terus meningkat hingga tahun 2019 menjadi 6,55%. Namun pada tahun 2020, terjadi penurunan yang drastis menjadi -2,28%. Jika melihat PDRB ADHK riil, tahun 2019 lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum di Kota Tebing Tinggi mampu menyumbang nilai PDRB ADHK sebesar 180,49 milyar rupiah, namun pada 2020 turun menjadi 176,37 milyar rupiah.

Dengan stabilnya peningkatan pertumbuhan lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum di Kota Tebing Tinggi sejak 2010, walaupun terjadi penurunan PDRB ADHK tahun 2020 dari lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, diperkirakan tahun 2021 lapangan usaha ini mampu rebound, dengan kontribusi sebesar 188,34 milyar rupiah pada 2021 dan terus meningkat hingga 2022 menjadi 195,25 milyar rupiah. Dengan asumsi paling konservatif, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum di Kota Tebing Tinggi diproyeksikan masih mampu tumbuh positif di tahun 2021, dengan nilai PDRB ADHK sebesar 182,64 milyar rupiah pada 2021, dan 189,55 milyar rupiah pada 2022. *Forecasting* lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum di Kota Tebing Tinggi selengkapnya dapat dilihat pada tabel 7.11 dan gambar 7.11

Tabel 7.11 Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		
	Lower Confidence Bound	Middle	Upper Confidence Bound
2010		112,30	
2011		121,03	
2012		125,40	
2013		131,09	
2014		137,41	
2015		144,23	
2016		151,46	
2017		159,45	
2018		169,40	
2019		180,49	
2020		176,37	
2021	182,64	188,34	194,04
2022	189,55	195,25	200,95

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)



Gambar 7.8 Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Dalam Milyar Rupiah)

7.1.2.10 Informasi dan Komunikasi

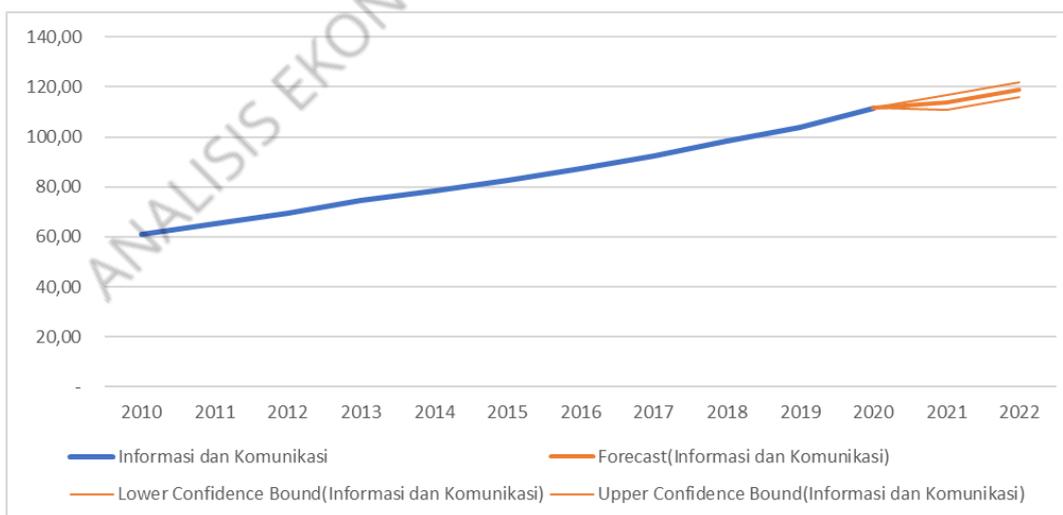
Tanpa bermaksud mengecilkan situasi yang saat ini sedang terjadi, namun lapangan usaha informasi dan komunikasi di Kota Tebing Tinggi merupakan salah satu lapangan usaha yang diuntungkan semenjak terjadinya pandemi di tahun 2020. Hal ini dapat dilihat berdasarkan peningkatan pertumbuhan yang cukup tajam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jika melihat tren lima tahun sebelumnya, rata-rata peningkatan persentase pertumbuhan lapangan usaha informasi dan komunikasi selalu di kisaran di bawah 1%. Namun pada tahun 2020, persentase peningkatan pertumbuhan meningkat menjadi 7,27%, yang sebelumnya adalah 6%. Artinya lapangan usaha informasi dan komunikasi mengalami peningkatan persentase pertumbuhan 1,27% pada 2020. Jika dilihat berdasarkan PDRB ADHK riil, pada tahun 2019 lapangan usaha informasi dan komunikasi di Kota Tebing Tinggi menyumbang PDRB ADHK Kota Tebing Tinggi sebesar 103,04 milyar rupiah, dan tahun 2020 meningkat menjadi 11,61 milyar rupiah.

Dengan tren pertumbuhan yang ada sejak 2010, diperkirakan lapangan usaha informasi dan komunikasi akan mampu terus tumbuh di tahun 2021 hingga 2022. Diproyeksikan lapangan usaha informasi dan komunikasi di Kota Tebing tinggi akan mampu menghasilkan PDRB ADHK sebesar 113,93 milyar rupiah, dan meningkat di tahun 2022 menjadi 118,83 milyar rupiah. Dengan asumsi paling konservatif, proyeksi terburuknya untuk tahun 2021 adalah 111,03 milyar rupiah, dan meningkat di tahun 2022 menjadi 115,84 milyar rupiah. *Forecasting* selengkapnya untuk lapangan usaha informasi dan komunikasi di Kota tebing Tinggi dapat dilihat pada tabel 7.12 dan gambar 7.12.

Tabel 7.12 Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi (Dalam Milyar Rupiah)
Informasi dan Komunikasi

Tahun	Lower Confidence Bound	Middle	Upper Confidence Bound
2010		60,93	
2011		65,12	
2012		69,66	
2013		74,61	
2014		78,44	
2015		82,54	
2016		87,31	
2017		92,60	
2018		98,16	
2019		104,04	
2020		111,61	
2021	111,03	113,93	116,82
2022	115,84	118,83	121,81

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)



Gambar 7.9 Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi (Dalam Milyar Rupiah)

7.1.2.11 Jasa Keuangan dan Asuransi

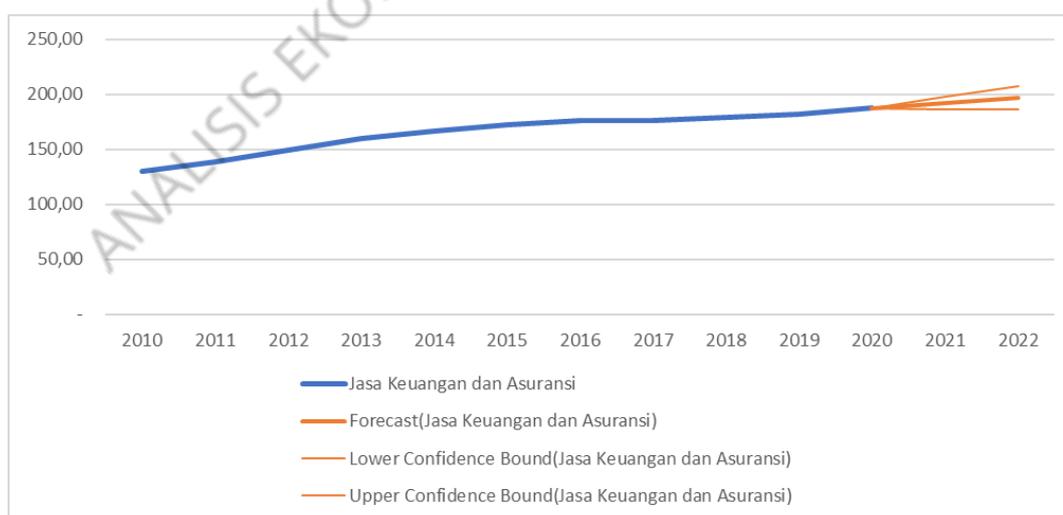
Seperti halnya lapangan usaha informasi dan komunikasi, lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi juga merupakan salah satu lapangan usaha yang justru mengalami peningkatan cukup besar, yaitu mengalami peningkatan persentase pertumbuhan sebesar 2,91% di tahun 2020, di mana pada tahun 2019 pertumbuhannya hanya sebesar 1,64%. Namun perlu diingat bahwa lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi di Kota Tebing Tinggi termasuk lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan fluktuatif. Jika dilihat dari PDRB ADHK riil, lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi pada tahun 2020 mampu menghasilkan PDRB ADHK Kota Tebing Tinggi sebesar 187,7 milyar rupiah, meningkat dibanding tahun 2019 yang sebesar 182,4 milyar rupiah.

Dengan tren pertumbuhan sejak 2010, diproyeksikan bahwa lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi di Kota Tebing Tinggi akan dapat terus tumbuh hingga 2022. Pada 2021, diproyeksikan lapangan usaha keuangan dan asuransi di Kota Tebing Tinggi mampu menghasilkan PDRB ADHK sebesar 192,06 milyar rupiah, dan terus meningkat di tahun 2022 menjadi 197,08 milyar rupiah. Namun, dengan asumsi paling konservatif, tidak menutup kemungkinan bahwa pelemahan dapat terjadi pada 2021, dengan hanya menghasilkan nilai PDRB ADHK sebesar 186,2 milyar rupiah, dengan sedikit peningkatan di 2022 menjadi 186,51 milyar rupiah. Kembali lagi, nilai *forecasting* mana yang akan menjadi kenyataan sangat bergantung pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam mengatasi penyebaran virus COVID-19. *Forecasting* selengkapnya untuk jasa keuangan dan asuransi di Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada tabel 7.13 dan gambar 7.13.

Tabel 7.13 Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi (Dalam Milyar Rupiah)

Jasa Keuangan dan Asuransi			
Tahun	Lower Confidence Bound	Middle	Upper Confidence Bound
2010		130,39	
2011		138,60	
2012		148,92	
2013		160,27	
2014		166,51	
2015		171,87	
2016		176,08	
2017		175,97	
2018		179,44	
2019		182,40	
2020		187,70	
2021	186,20	192,06	197,93
2022	186,51	197,08	207,66

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)



Gambar 7.10 Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi (Dalam Milyar Rupiah)

7.1.2.12 Real Estate

Lapangan usaha real estate adalah salah satu lapangan usaha di Kota Tebing Tinggi yang turut terdampak pandemi COVID-19, dengan penurunan 1,99% di tahun 2020. Namun memang, jika melihat tren lima tahun terakhir, peningkatan persentase pertumbuhan hanya terjadi di tahun 2017, berturut-turut hingga tahun 2020 terus terjadi penurunan, walaupun selalu mengalami pertumbuhan positif. Nilai riil PDRB ADHK yang bersumber dari lapangan usaha real estate pada tahun 2020 adalah sebesar 322,81 milyar rupiah, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 316,51 walau jika dilihat dari persentase pertumbuhannya sesungguhnya mengalami penurunan.

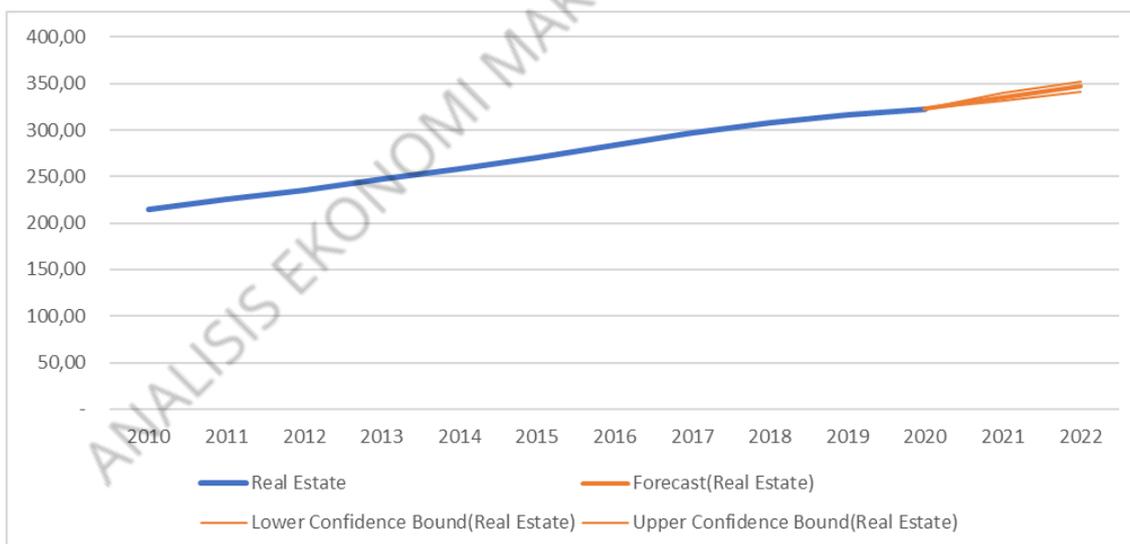
Berdasarkan tren pertumbuhan sejak 2010, diproyeksikan bahwa lapangan usaha real estate di Kota Tebing Tinggi akan dapat terus mengalami pertumbuhan positif. Pada tahun 2021, lapangan usaha real estate Kota Tebing Tinggi diproyeksikan mampu menghasilkan PDRB ADHK sebesar 335,45 milyar rupiah, dan terus meningkat di tahun 2022 menjadi sebesar 346,71 milyar rupiah. Jika menggunakan proyeksi paling konservatif pun, diproyeksikan lapangan usaha real estate di Kota Tebing Tinggi akan tetap mampu tumbuh positif hingga tahun 2022, dengan nilai PDRB ADHK 2021 setidaknya berjumlah 331,12 milyar rupiah, dan pada tahun 2022 sebesar 341,29 milyar rupiah. *Forecasting* selengkapnya untuk lapangan usaha jasa real estate dapat dilihat pada tabel 7.14 dan gambar 7.14.

Tabel 7.14 Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Jasa Real Estate (Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Real Estate		
	Lower Confidence Bound	Middle	Upper Confidence Bound
2010		215,27	
2011		226,08	
2012		235,50	
2013		247,70	

Tahun	Real Estate		
	Lower Confidence Bound	Middle	Upper Confidence Bound
2014		258,57	
2015		270,08	
2016		283,13	
2017		297,08	
2018		307,57	
2019		316,51	
2020		322,81	
2021	331,12	335,45	339,79
2022	341,29	346,71	352,13

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)



Gambar 7.11 Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Real Estate (Dalam Milyar Rupiah)

7.1.2.13 Jasa Perusahaan

Lapangan usaha jasa perusahaan cukup mengalami penurunan yang cukup parah sejak terjadinya pandemi. Sejak 2010, lapangan usaha jasa perusahaan selalu mengalami pertumbuhan yang positif, walaupun persentase peningkatannya fluktuatif dan tidak selalu meningkat.

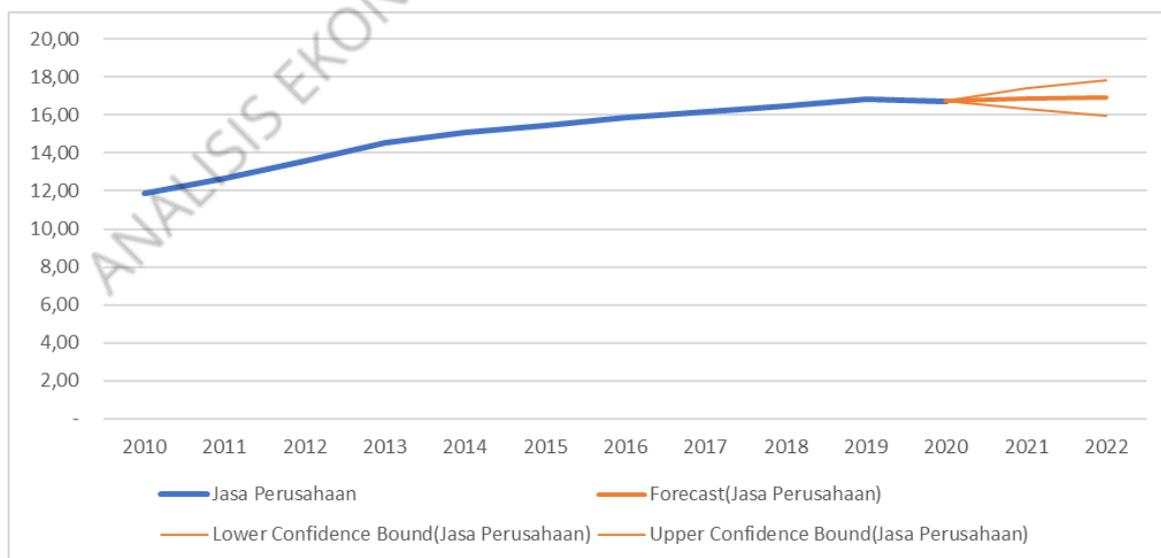
Namun pada tahun 2020, lapangan usaha jasa perusahaan di Kota Tebing Tinggi mengalami pertumbuhan negatif, yaitu sebesar -0,6%. Jika dilihat berdasarkan PDRB ADHK, maka nilai PDRB yang bersumber dari lapangan usaha jasa perusahaan pada tahun 2020 adalah sebesar 16,74 milyar rupiah. Angka ini merupakan penurunan, karena di tahun sebelumnya, nilai PDRB ADHK yang bersumber dari lapangan usaha jasa perusahaan adalah sebesar 16,84 milyar rupiah.

Dengan menggunakan tren pertumbuhan sejak 2010, diproyeksikan lapangan usaha jasa perusahaan dapat tumbuh positif di tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2021, diproyeksikan lapangan usaha jasa perusahaan akan mampu menghasilkan PDRB ADHK sebesar 16,88 milyar rupiah, dan 16,91 milyar rupiah pada 2022. Namun jika menggunakan asumsi proyeksi konservatif, tidak menutup kemungkinan kalau lapangan usaha jasa perusahaan akan mengalami penurunan hingga 2022, dengan nilai proyeksi PDRB ADHK di tahun 2021 sebesar 16,36 milyar rupiah, dan 15,97 milyar rupiah di tahun 2022. Semua ini bergantung pada pengambil kebijakan dalam mengendalikan penyebaran COVID-19, baik di tingkat daerah maupun nasional. *Forecasting* lapangan usaha jasa perusahaan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 7.15 dan gambar 7.15.

Tabel 7.15 Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Jasa Perusahaan (Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Jasa Perusahaan		
	Lower Confidence Bound	Middle	Upper Confidence Bound
2010		11,87	
2011		12,69	
2012		13,59	
2013		14,55	
2014		15,11	
2015		15,42	
2016		15,88	
2017		16,20	
2018		16,45	
2019		16,84	
2020		16,74	
2021	16,36	16,88	17,40
2022	15,97	16,91	17,84

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)



Gambar 7.12 Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Jasa Perusahaan (Dalam Milyar Rupiah)

7.1.2.14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial di Kota Tebing Tinggi adalah salah satu lapangan usaha yang ikut mengalami pertumbuhan negatif, yaitu sebesar -0,45%. Padahal lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial selalu mengalami pertumbuhan positif sejak tahun 2010 hingga 2019. Hal ini tentu saja diakibatkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang terjadi di awal 2020.

Jika melihat nilai riil PDRB ADHK yang bersumber dari lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial pada tahun 2020 adalah sebesar 397,65 milyar rupiah, menurun jika dibandingkan tahun 2019 dengan PDRB ADHK sebesar 399,44 milyar rupiah.

Menggunakan data PDRB ADHK sejak 2010, diperkirakan pertumbuhan negatif akan terus terjadi hingga 2022. Diproyeksikan nilai PDRB ADHK yang dihasilkan dari lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial pada tahun 2021 adalah sebesar 397,55 milyar rupiah, dan 397,42 milyar rupiah pada tahun 2022. Jika situasi pandemi terus memburuk, diproyeksikan PDRB ADHK yang bersumber dari lapangan usaha administrasi, pertahanan dan jaminan sosial wajib akan lebih rendah lagi, yaitu sebesar 380,95 milyar rupiah pada 2021, dan 361,82 milyar rupiah. *Forecasting* lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib selengkapnya dapat dilihat pada tabel 7.16 dan gambar 7.16.

Tabel 7.16 Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (Dalam Milyar Rupiah)

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib			
Tahun	Lower Confidence Bound	Middle	Upper Confidence Bound
2010		254,29	
2011		270,68	
2012		290,51	
2013		310,08	
2014		333,55	
2015		359,28	
2016		365,82	
2017		369,94	
2018		384,77	
2019		399,44	
2020		397,65	
2021	380,95	397,55	414,15
2022	361,82	397,42	433,02

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)



Gambar 7.13 Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (Dalam Milyar Rupiah)

7.1.2.15 Jasa Pendidikan

Lapangan usaha jasa pendidikan adalah salah satu lapangan usaha yang masih mampu tumbuh positif di tahun 2020, walaupun jika dilihat dari persentase pertumbuhan sesungguhnya mengalami penurunan. Pada tahun 2020, pertumbuhannya adalah sebesar 1,62 persen, di mana di tahun 2019 adalah sebesar 4,99%. Pada tahun 2020, nilai riil PDRB ADHK yang berasal dari lapangan usaha jasa pendidikan di Kota Tebing Tinggi adalah sebesar 245,91 milyar rupiah, masih meningkat dibanding sebelumnya yang sebesar 241,99 milyar rupiah.

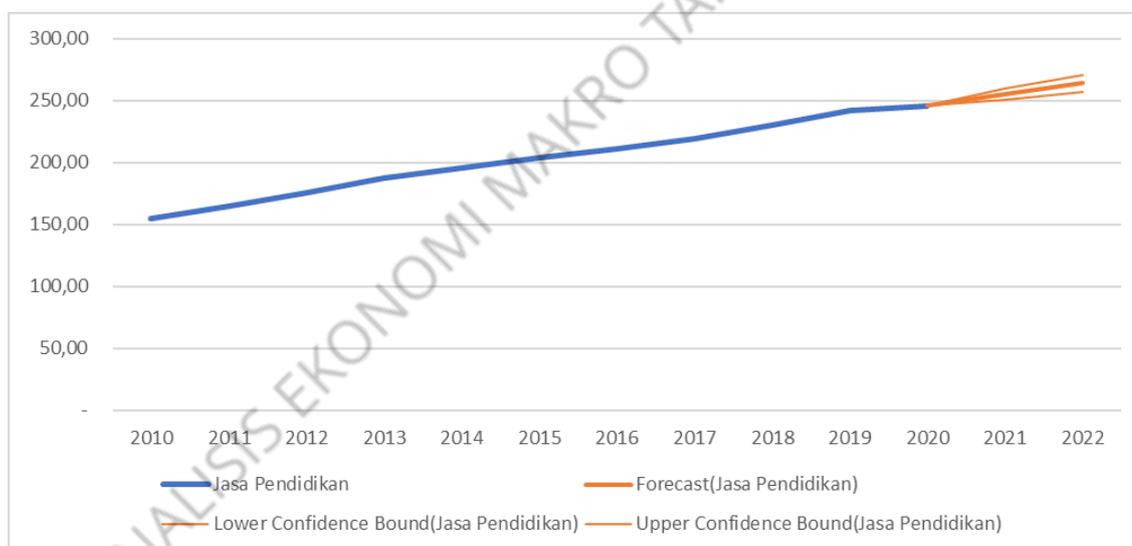
Melihat tren PDRB ADHK sejak 2010, lapangan usaha jasa pendidikan di Kota Tebing Tinggi diproyeksikan masih akan terus tumbuh positif hingga tahun 2022, dengan nilai PDRB ADHK sekitar 254,9 milyar rupiah pada 2021, dan 263,88 milyar rupiah pada 2022. Jika menggunakan asumsi paling konservatif pun, lapangan usaha jasa pendidikan diproyeksikan masih akan dapat terus tumbuh positif. Pada tahun 2021, lapangan usaha jasa pendidikan di Kota Tebing Tinggi diproyeksikan setidaknya dapat menyumbangkan PDRB ADHK sebesar 250,41 milyar rupiah, dan meningkat di tahun 2022 dengan PDRB ADHK sebesar 257,21 milyar rupiah. *Forecasting* PDRB ADHK lapangan usaha jasa pendidikan di Kota Tebing Tinggi selengkapnya dapat dilihat pada tabel 7.17 dan gambar 7.17.

Tabel 7.17 Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Jasa Pendidikan (Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Jasa Pendidikan		
	Lower Confidence Bound	Middle	Upper Confidence Bound
2010		154,43	
2011		164,38	
2012		175,44	
2013		187,36	
2014		195,54	

Jasa Pendidikan			
Tahun	Lower Confidence Bound	Middle	Upper Confidence Bound
2015		203,58	
2016		211,32	
2017		219,53	
2018		230,48	
2019		241,99	
2020		245,91	
2021	250,41	254,90	259,39
2022	257,21	263,88	270,55

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)



Gambar 7.14 Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Jasa Pendidikan (Dalam Milyar Rupiah)

7.1.2.16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial di Kota Tebing Tinggi adalah salah satu lapangan usaha yang mengalami penurunan pertumbuhan terbesar sejak terjadinya pandemi di 2020. Pada tahun 2019, lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial di Kota Tebing Tinggi masih mampu tumbuh positif sebesar 5,19%, namun pada 2020 mengalami pertumbuhan negatif sebesar -0,99 persen. Jika dilihat berdasarkan nilai riil PDRB ADHK yang bersumber dari lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial di Kota Tebing Tinggi pada 2020, nilai PDRB ADHK yang disumbangkan untuk perekonomian Kota Tebing Tinggi adalah sebesar 48,17 milyar rupiah. Angka ini adalah penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 48,65 milyar rupiah.

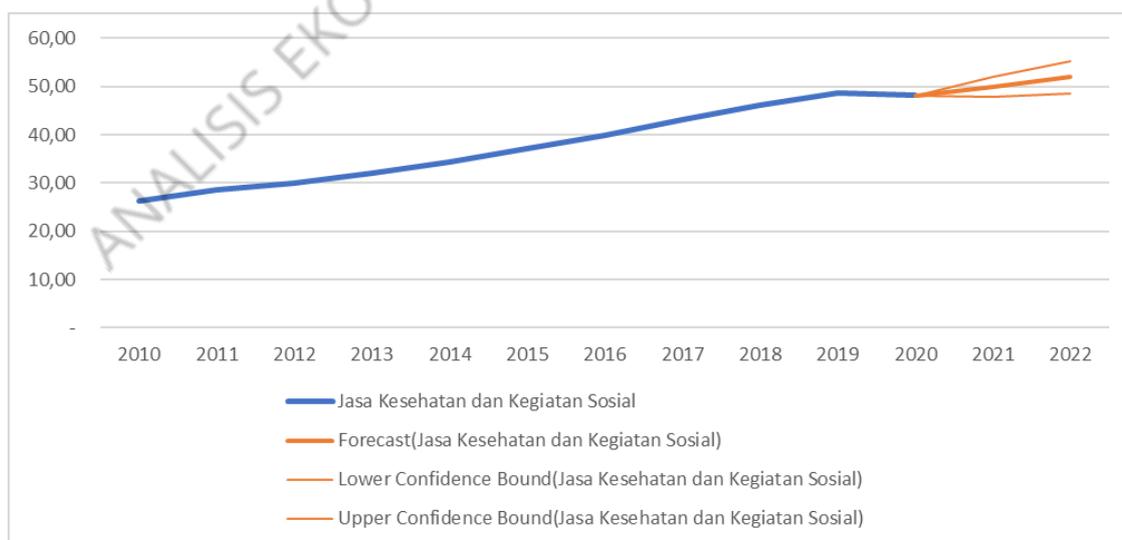
Dengan menggunakan data sejak 2010, diproyeksikan lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial masih akan dapat terus tumbuh positif hingga tahun 2022, dengan nilai proyeksi sebesar 50,06 milyar rupiah pada 2021, dan 51,94 milyar rupiah pada 2022.

Namun angka ini hanya berlaku jika penanganan COVID-19 di Kota Tebing tinggi dapat dilakukan dengan baik, jika tidak, maka *forecasting* harus dilakukan dengan lebih konservatif lagi. Jika demikian, maka pada 2021 diperkirakan akan terjadi penurunan PDRB ADHK menjadi 47,97 milyar rupiah, dan akan *rebound* pada tahun 2022 menjadi 48,6 milyar rupiah. *Forecasting* lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial di Kota Tebing Tinggi selengkapnya dapat dilihat pada tabel 7.18 dan gambar 7.18.

Tabel 7.18 Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial		
	Lower Confidence Bound	Middle	Upper Confidence Bound
2010		26,41	
2011		28,61	
2012		30,00	
2013		32,04	
2014		34,44	
2015		37,06	
2016		39,91	
2017		43,08	
2018		46,25	
2019		48,65	
2020		48,17	
2021	47,97	50,06	52,14
2022	48,60	51,94	55,27

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)



Gambar 7.15 Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Dalam Milyar Rupiah)

7.1.2.17 Jasa Lainnya

Lapangan usaha jasa lainnya turut mengalami penurunan yang cukup besar sejak terjadinya Pandemi COVID-19. Melihat tren lima tahun terakhir, lapangan usaha jasa lainnya selalu mampu tumbuh positif di kisaran 3%. Namun pada tahun 2020, persentase pertumbuhannya justru mengalami pertumbuhan negatif, sebesar -0,99%. Jika melihat nilai riil PDRB ADHK yang bersumber dari lapangan usaha jasa lainnya, pada tahun 2020 adalah sebesar 39,54 milyar rupiah, menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 39,93 milyar rupiah.

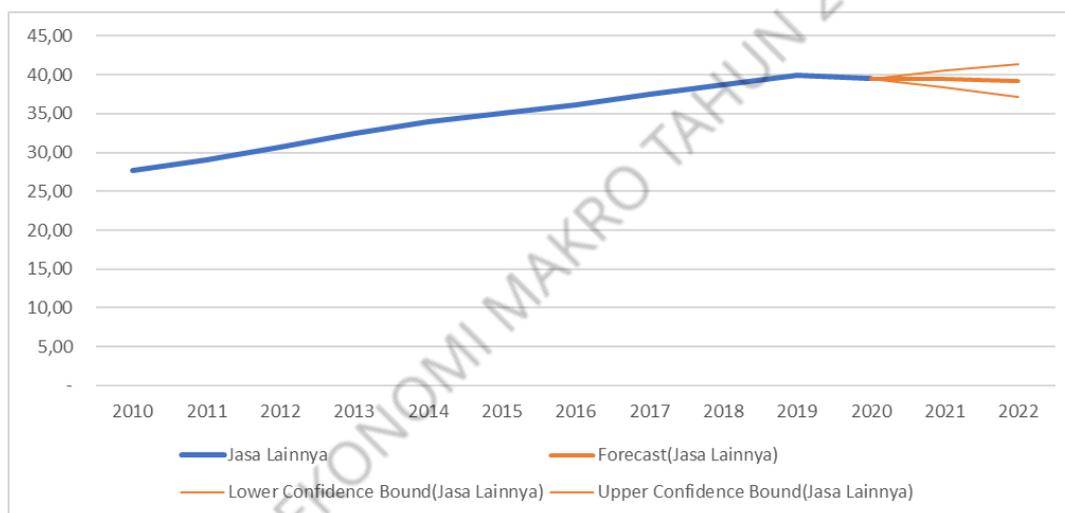
Berdasarkan tren sejak 2010, diperkirakan PDRB ADHK yang bersumber dari lapangan usaha jasa lainnya akan terus turun menurun hingga tahun 2022, dengan nilai proyeksi 2021 sebesar 39,48 milyar rupiah, dan 39,25 milyar rupiah pada 2022. Jika menggunakan asumsi konservatif, bisa jadi penurunan akan lebih dalam, dengan nilai proyeksi PDRB ADHK 2021 sebesar 38,45 milyar rupiah, dan 37,14 milyar rupiah pada 2022. Satu-satunya harapan adalah terkendalinya penyebaran COVID-19 sehingga perekonomian dapat *rebound*. Saat itulah proyeksi *upper confidence bound* dapat digunakan, dengan proyeksi 40,51 milyar pada 2021, dan 41,37 milyar pada 2022. *Forecasting* selengkapnya untuk lapangan usaha jasa lainnya dapat dilihat pada tabel 7.19 dan gambar 7.19.

Tabel 7.19 Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Jasa Lainnya (Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Jasa Lainnya		
	Lower Confidence Bound	Middle	Upper Confidence Bound
2010		27,64	
2011		29,07	
2012		30,70	
2013		32,44	
2014		33,94	
2015		35,07	
2016		36,19	

Tahun	Jasa Lainnya		
	Lower Confidence Bound	Middle	Upper Confidence Bound
2017		37,49	
2018		38,69	
2019		39,93	
2020		39,54	
2021	38,45	39,48	40,51
2022	37,14	39,25	41,37

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)



Gambar 7.16 Proyeksi pertumbuhan PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Jasa Lainnya (Dalam Milyar Rupiah)

7.1.3 Jenis-Jenis Lapangan Usaha Yang Terdampak Pandemi COVID-19

Selain melakukan *forecasting* kontribusi PDRB ADHK lapangan-lapangan usaha yang ada di Kota Tebing Tinggi terhadap perekonomian Kota Tebing Tinggi, maka perlu juga memahami lapangan-lapangan usaha apa saja yang terdampak Pandemi COVID-19 dilihat dari persentase pertumbuhan PDRB ADHK. Terdapat 14 lapangan usaha yang terdampak atas terjadinya Pandemi COVID-19, baik itu perlambatan pertumbuhan, maupun sampai mengalami pertumbuhan negatif, yaitu:

- Industri Pengolahan;
- Pengadaan listrik dan gas;
- Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang;
- Konstruksi;
- Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor;
- Transportasi dan pergudangan;
- Penyediaan akomodasi dan makan minum;
- Jasa perusahaan;
- Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib;
- Jasa pendidikan;
- Jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan
- Jasa lainnya

Selain lapangan usaha yang disebutkan di atas, sebenarnya masih terdapat dua lapangan usaha yang mengalami penurunan pertumbuhan semenjak terjadinya Pandemi COVID-19, yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, dan real estate. Namun kedua lapangan usaha ini sudah memiliki tren menurun sejak tahun-tahun sebelumnya, sehingga tidak dapat disimpulkan penurunan yang terjadi di 2020 diakibatkan oleh Pandemi COVID-19.

Di antara lapangan usaha yang terdampak Pandemi COVID-19, yang mengalami penurunan pertumbuhan paling besar adalah lapangan usaha konstruksi, dengan penurunan persentase pertumbuhan sebesar 11,71%, diikuti dengan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan penurunan persentase pertumbuhan dibanding tahun sebelumnya sebesar 9,16%.

Selanjutnya, lapangan usaha ketiga yang mengalami penurunan terbesar adalah lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, dengan penurunan persentase pertumbuhan sebesar 8,83% dibandingkan tahun sebelumnya. Usaha percepatan pertumbuhan di tahun berikutnya sangat diperlukan, karena lapangan usaha-lapangan usaha ini justru adalah lapangan usaha yang paling besar memiliki kontribusi atas perekonomian Kota Tebing Tinggi.

Tabel 7.20 Perbandingan Pertumbuhan Lapangan Usaha di Kota Tebing Tinggi Sebelum dan Sesudah Pandemi COVID-19

Lapangan Usaha	Sebelum Pandemi				Pandemi
	2016	2017	2018	2019	2020*
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,56	4,58	4,09	3,38	2,32
Pertambangan dan Penggalian	4,40	5,07	3,4	2,24	3,84
Industri Pengolahan	3,00	2,65	2,06	1,79	-0,27
Pengadaan Listrik dan Gas	3,40	4,35	2,95	5,4	5,11
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,41	6,94	3,08	3,36	-0,42
Konstruksi	6,62	6,87	5,42	5,79	-5,92
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,37	8,40	8,76	8,77	-0,39
Transportasi dan Pergudangan	5,24	7,07	4,95	4,95	-1,69
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,02	5,27	6,24	6,55	-2,28
Informasi dan Komunikasi	5,78	6,07	6	6	7,27
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,45	- 0,06	1,98	1,64	2,91
Real Estate	4,83	4,93	3,53	2,91	1,99
Jasa Perusahaan	2,96	2,03	1,54	2,34	-0,60
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,82	1,13	4,01	3,81	-0,45
Jasa Pendidikan	3,80	3,89	4,99	4,99	1,62
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,69	7,94	7,35	5,19	-0,99
Jasa Lainnya	3,18	3,60	3,21	3,21	-0,99

*Berwarna merah berarti lapangan usaha yang ter dampak Pandemi COVID-19

7.1.4 Proyeksi Jumlah Penduduk Miskin di Kota Tebing Tinggi

Jumlah penduduk miskin di Kota Tebing Tinggi bisa dibilang berfluktuatif sejak tahun 2010. Pada 2010, jumlah penduduk miskin di Kota Tebing Tinggi adalah sebesar 18.900 penduduk, terus menurun hingga tahun 2012 menjadi sebanyak 17.700 penduduk. Namun, tahun 2013 meningkat menjadi 18.000 jiwa. Fluktuasi jumlah penduduk miskin terus

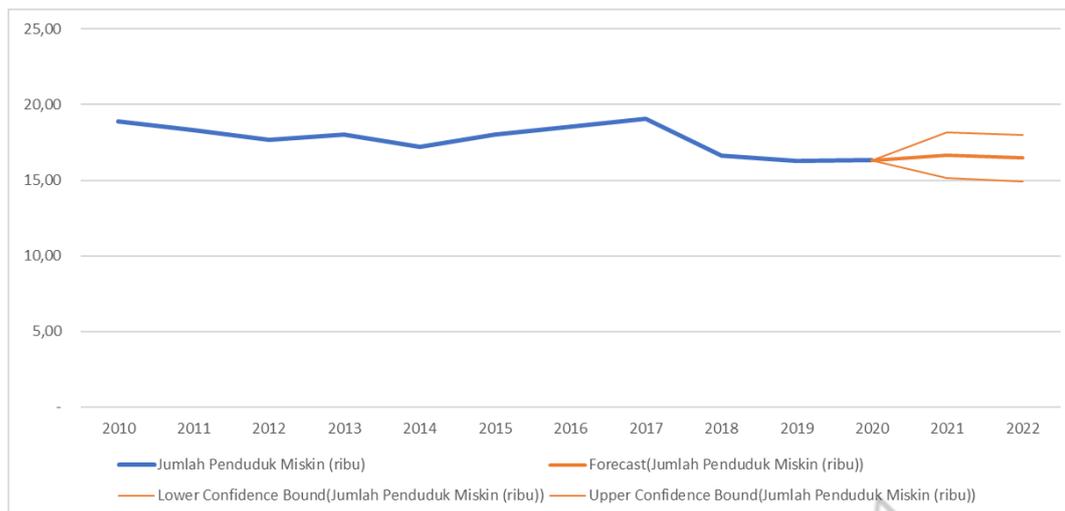
terjadi hingga 2017. Pada 2018, penurunan jumlah penduduk miskin terjadi cukup signifikan, menjadi sebesar 16.640 jiwa dan terus menurun hingga 2020 menjadi sebanyak 16.320 jiwa.

Dengan menggunakan data tren sejak 2010, diperkirakan jumlah penduduk miskin akan sedikit meningkat hingga tahun 2022 menjadi 16.660 jiwa pada 2021, dan meningkat lagi pada 2022 menjadi 16.470 jiwa pada 2022. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa angka jumlah penduduk miskin di Kota Tebing Tinggi mampu menurun, karena proyeksi untuk *lower confidence bound* adalah sebesar 15.120 jiwa pada 2021 dan 14.930 jiwa pada 2022. *Forecasting* selengkapnya untuk jumlah penduduk miskin di Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada tabel 7.21 dan gambar 7.20.

Tabel 7.21 Proyeksi Jumlah Penduduk Miskin di Kota Tebing Tinggi (dalam ribu)

Jumlah Penduduk Miskin			
Tahun	Lower Confidence Bound	Middle	Upper Confidence Bound
2010		18,90	
2011		18,30	
2012		17,70	
2013		18,00	
2014		17,20	
2015		18,00	
2016		18,52	
2017		19,06	
2018		16,64	
2019		16,30	
2020		16,32	
2021	15,12	16,66	18,19
2022	14,93	16,47	18,01

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)



Gambar 7.17 Proyeksi Jumlah Penduduk Miskin di Kota Tebing Tinggi (dalam ribu)

7.1.5 Proyeksi Indikator Kesejahteraan di Kota Tebing Tinggi

Untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat, salah satu indikator yang dapat digunakan adalah IPM, itulah mengapa pada subbab ini, proyeksi tingkat kesejahteraan menggunakan IPM. Sejak 2011, IPM di Kota Tebing Tinggi terus mengalami peningkatan. Pada 2011, nilai IPM di Kota Tebing Tinggi adalah sebesar 70,84, dan meningkat menjadi 75,15 pada 2020.

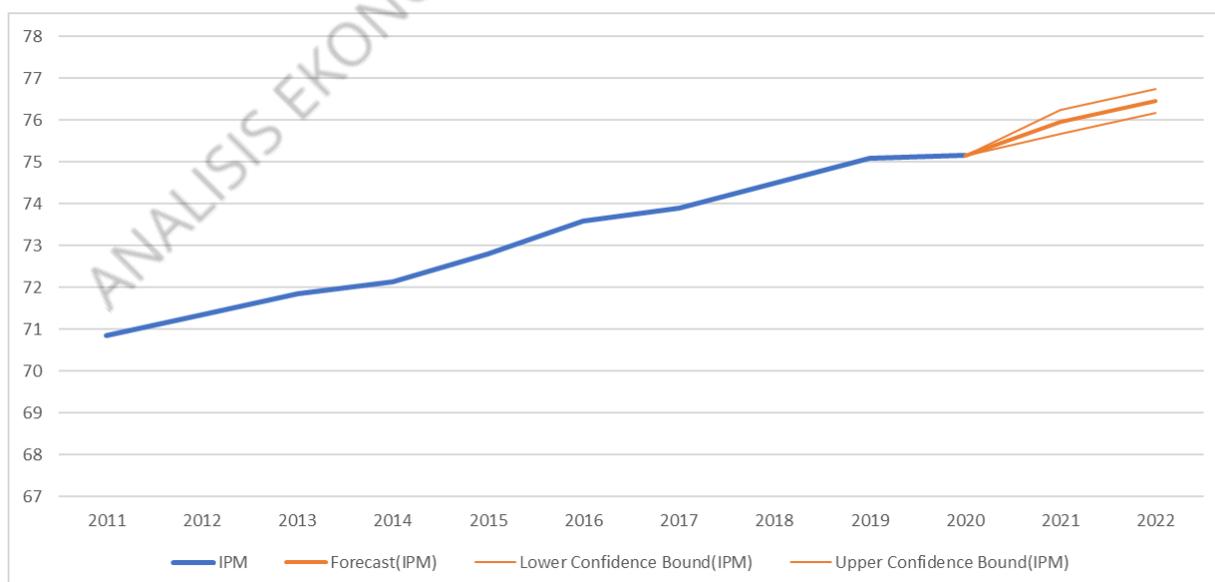
Dengan menggunakan tren sejak 2011, *forecasting* IPM di Kota Tebing Tinggi diperkirakan akan mampu terus meningkat. Pada 2021, diproyeksikan nilai IPM Kota Tebing Tinggi akan meningkat menjadi sebesar 75,95, dan akan terus meningkat di 2022 menjadi 76,46.

Jika menggunakan proyeksi yang lebih konservatif, diprediksi IPM di Kota Tebing Tinggi tetap akan mampu meningkat, walaupun tidak setinggi dengan menggunakan *middle forecasting*. Pada 2021, IPM di Kota Tebing Tinggi diproyeksikan akan meningkat menjadi sebesar 75,66, dan pada 2022 akan meningkat menjadi sebesar 76,17. *Forecasting* selengkapnya untuk indikator kesejahteraan di Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada tabel 7.22 dan gambar 7.21.

Tabel 7.22 Proyeksi Indikator Kesejahteraan di Kota Tebing Tinggi

Tahun	IPM		
	Lower Confidence Bound	Middle	Upper Confidence Bound
2011		70,84	
2012		71,34	
2013		71,85	
2014		72,13	
2015		72,81	
2016		73,58	
2017		73,9	
2018		74,5	
2019		75,08	
2020		75,15	
2021	75,66	75,95	76,23
2022	76,17	76,46	76,74

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi (diolah)



Gambar 7.21. Proyeksi Indikator Kesejahteraan di Kota Tebing Tinggi

BAB 8 KESIMPULAN DAN SARAN

8.1 Kesimpulan

Berdasarkan paparan yang telah disajikan, beberapa kesimpulan yang dapat diambil atas situasi ekonomi makro Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

1. Tingkat partisipasi tenaga kerja di Kota Tebing Tinggi tergolong bagus, dengan peningkatan setiap tahunnya, termasuk pada 2020 dengan TPAK sebesar 66,7% di tahun 2019 menjadi 69,3% pada 2020
2. Lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah lapangan usaha yang bergerak di sektor jasa, diikuti oleh industri, dan yang terakhir adalah pertanian, dengan status pekerjaan terbanyak sebagai buruh/karyawan/pegawai
3. Terjadi pergeseran pola pengeluaran atas kelompok komoditas yang dilakukan oleh masyarakat Kota Tebing Tinggi. Pada 2019, pengeluaran masyarakat lebih banyak dihabiskan pada pengeluaran untuk bukan makanan, sementara pada 2020, pengeluaran terbanyak adalah pada kelompok komoditas makanan
4. Selama lima tahun terakhir (2016-2020), Kota Tebing Tinggi terus menorehkan peningkatan PDRB dari sisi ADHB. Namun dari ADHK, PDRB 2020 Kota Tebing Tinggi mengalami penurunan. Hal tersebut secara tidak langsung menggambarkan efek pandemi COVID-19 terhadap perekonomian riil di Kota Tebing Tinggi.
5. Berdasarkan strukturnya, lapangan usaha yang berkontribusi terbesar pada perekonomian Kota Tebing Tinggi berturut-turut dari yang terbesar adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (24,03%; Konstruksi (14,22%);

Industri Pengolahan (11,98%); dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial (11,53)

6. Perekonomian Kota Tebing Tinggi tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif, atau terkontraksi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2019. Laju pertumbuhan PDRB ADHK Kota Tebing tinggi pada tahun 2020 adalah -0,7%, dibandingkan tahun sebelumnya yang mampu tumbuh cukup baik, yakni sebesar 5,15%.
7. Rasio neraca perdagangan Kota Tebing Tinggi terbinglang cukup konstan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana pada 2020 adalah sebesar -0,57
8. Persentase penduduk miskin mampu menorehkan penurunan angka meskipun ditengah Pandemi COVID-19, dimana pada 2020 adalah sebesar 9,85%, turun dibanding tahun 2019 (9,94%).
9. IPM di Kota Tebing Tinggi juga mampu mencatat kenaikan dibanding 2019, yang awalnya sebesar 75,08 menjadi 75,15 pada 2020
10. Koefisien Gini Kota Tebing Tinggi adalah sebesar 3,34, dimana mengindikasikan ketimpangan distribusi pendapatan yang tergolong sedang
11. Walaupun terjadi penurunan PDRB ADHK pada 2020, diproyeksikan kondisi ini akan *rebound* pada 2021 sampai 2022, bergantung pada efektivitas kebijakan pencegahan penyebaran COVID-19 di Kota Tebing Tinggi
12. Lapangan usaha di Kota Tebing Tinggi yang mengalami perlambatan sampai pertumbuhan negatif akibat Pandemi COVID-19 adalah lapangan usaha Industri Pengolahan; Pengadaan listrik dan gas; Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; Konstruksi; Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; Transportasi dan pergudangan; Penyediaan akomodasi dan makan minum; Jasa perusahaan; Administrasi

pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; Jasa pendidikan; Jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan Jasa lainnya.

8.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Perlu perhatian lebih oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi atas lapangan usaha terdampak pandemi, terutama beberapa lapangan usaha penyumbang PDRB terbesar, karena justru lapangan usaha inilah yang paling besar penurunannya sejak terjadinya Pandemi COVID-19 di awal 2020.
2. Lapangan usaha informasi dan komunikasi adalah lapangan usaha yang paling bersinar di situasi Pandemi COVID-19. Perlu peningkatan infrastruktur pada lapangan usaha ini demi peningkatan output dan pelayanan pada masyarakat, karena di tengah pembatasan yang terjadi, banyak masyarakat yang bergantung pada lapangan usaha ini baik untuk kegiatan bisnis maupun sosial.
3. Perlu adanya stimulus untuk peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat agar aktivitas ekonomi masyarakat tidak berpusat pada pengeluaran bahan makanan saja.
4. Agar Pemerintah Kota Tebing Tinggi mempercepat realisasi anggaran, terutama di sektor infrastruktur. Hal ini disebabkan sektor inilah yang paling terdampak atas Pandemi COVID-19 yang terjadi.
5. Mendorong pertumbuhan UMKM di Kota Tebing Tinggi dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam usaha untuk meningkatkan usahanya.

REFERENSI

- Afrianti, N., & Aditia, R. (2020). Online Learning Readiness in Facing the Covid-19 Pandemic at MTS Manunggal Sagara Ilmi, Deli Serdang, Indonesia. *Journal of International Conference Proceedings*, 3(2), 59–66. <https://doi.org/10.32535/jicp.v0i0.905>
- Badan Pusat Statistik. (n.d.-a). Retrieved September 7, 2021, from https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah_page=28&Istilah_sort=deskripsi_ind.desc
- Badan Pusat Statistik. (n.d.-b). Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha). <https://doi.org/10.1055/s-2008-1040325>
- Badan Pusat Statistik. (2008). Perubahan Tahun Dasar PDB Indonesia Berbasis SNA 2008. <https://doi.org/10.1055/s-2008-1040325>
- Collier, P. (2008). *The bottom billion: Why the poorest countries are failing and what can be done about it*. Oxford University Press, USA.
- Domar, E. D. (1946). Capital expansion, rate of growth, and employment. *Econometrica, Journal of the Econometric Society*, 137–147.
- Domar, E. D. (1947). Expansion and employment. *The American Economic Review*, 34–55.
- Ferguson, N., Laydon, D., Nedjati Gilani, G., Imai, N., Ainslie, K., Baguelin, M., ... others. (2020). *Report 9: Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID19 mortality and healthcare demand*.
- Gardner, E. S. (1985). *Exponential Smoothing: The State of the Art*. 4(October 1983), 1–28.
- Harrod, R. F. (1948). *Towards a Dynamic Economics: Some recent developments of economic theory and their application to policy*. MacMillan and Company, London.
- Keynes, J. M. (2018). *The general theory of employment, interest, and money*. Springer.
- Lone, S. A., & Ahmad, A. (2020). COVID-19 pandemic--an African perspective. *Emerging Microbes & Infections*, 9(1), 1300–1308.
- Mankiw, N. G. (2013). *Macroeconomics. Eight Edition*. Worth Publishers.

Mankiw, N. G. (2020). *Principles of economics*. Cengage Learning.

Rhyan, C., Turner, A., & Miller, G. (2020). Tracking the US health sector: the impact of the COVID-19 pandemic. *Business Economics*, 55(4), 267–278.

System of National Accounts. (2009). Retrieved September 7, 2021, from <https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna.asp>

ANALISIS EKONOMI MAKRO TAHUN 2021



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TEBING TINGGI